

BAB II

SOLO, KELOMPOK ISLAMIS LOKAL, DAN KEMUNCULAN TIM HISBAH

A. Solo, Wacana Islamisme dan Kelompok-Kelompok Islamis

Beberapa tahun pasca tumbangnya rezim Orde Baru di Indonesia, mulai bermunculan ragam organisasi masyarakat ataupun gerakan sosial dengan isu yang beragam: agama, hak asasi manusia, gender, hingga etnisitas. Hal ini wajar mengingat perubahan nuansa politik ke arah yang lebih demokratis dan menjadi wahana baru bagi *civil society*. Salah satu gerakan yang tumbuh subur setelah pemerintahan Soeharto ini adalah gerakan Islamis dan juga kelompok Islam paramiliter yang bersifat radikal seperti Laskar Pembela Islam (LPI) dibawah payung Front Pemebel Islam (FPI), Laskar Jihad, Laskar Mujahidin Indonesia (LMI) dibawah payung Majelis Mujahidin Indonesia³². Di Solo, gerakan laskar Islam seperti Tim Hisbah, Jundullah, FPI-S (Front Pemuda Islam Surakarta), Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS) hadir di setiap peristiwa yang dianggap bertentangan dengan Islam seperti pesta minuman keras, kristenisasi bahkan isu-isu sektarian seperti syi'ah selalu ditanggapi secara tegas dan frontal oleh laskar-laskar ini. Meskipun berbeda, organisasi laskar Islam ini memiliki kesamaan yaitu menjadi garda terdepan dalam penegakan *amar maruf dan nahi munkar* serta menuntut perubahan sistem pemerintahan di Indonesia menjadi sistem pemerintahan dengan berdasarkan syariat Islam (*Islamic law*).

³² Noorhaidi Hasan, *Laskar Jihad: Islam, Militansi dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca Orde Baru*, (Jakarta: KITLV, 2008) hlm 3-9.

Ide mengenai perubahan dasar negara kepada syariat Islam termanifestasi dalam beberapa varian gerakan. Sebagian ada yang ingin merubah dan memperbaiki sistem melalui internal pemerintah dan masuk ke dalam sistem partai politik, sebagian yang lain berusaha dengan membentuk gerakan sosial yang menyuarakan perlawanan terhadap pemerintahan.³³ Beberapa gerakan yang menyuarakan perlawanan, beraksi melalui demonstrasi, seminar-seminar, diskusi, bahkan bertindak langsung melawan secara fisik. Tidak dapat dinafikan bahwa gerakan perlawanan yang mengatas namakan Islam tersebut justru berkembang di berbagai daerah seperti Solo, Yogyakarta, Jakarta, Jawa Barat, Medan dan Poso pada era reformasi. Hal ini terjadi sebagai respon krisis sosial-politik yang terjadi di Indonesia karena situasi politik yang terbuka setelah 32 tahun kanal-kanal yang mengaliri suara perlawanan ditutup rapat oleh pemerintah.³⁴ Di sini gerakan Islam radikal berusaha muncul ke permukaan untuk mengklaim ruang publik dengan memanfaatkan situasi yang tengah berubah.³⁵ Tim Hisbah atau yang sering disebut Laskar Hisbah Solo adalah salah satu gerakan dari sekian banyak gerakan yang ada di Solo yang memilih model tindakan langsung untuk memberikan suara perlawanan terhadap pemerintahan.

³³ Masdar Hilmy, *Islamism and Democracy In Indonesia, Piety and Pragmatism*. (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2010), hlm. 2.

³⁴ Baca selengkapnya tulisan Peter Eisinger. Eisinger melihat dan membandingkan kesempatan politik ini pada dua kondisi politik; tertutup dan terbuka. Eisinger ingin mengetahui aksi-aksi protes dan timbulnya berbagai macam gerakan sosial tersebut disebabkan oleh kondisi politik yang dalam tekanan atau dalam keterbukaan? Kemudian Eisinger menyimpulkan bahwa justru ketika lembaga-lembaga negara terbuka, aksi protes dari gerakan sosial semakin meningkat. Peter Eisinger, "The Condition of Protest Behaviour in American Cities," *Paper American Political Science Review*, 1973 hlm. 28.

³⁵ Noorhaidi Hasan, *Islam Politik Di Dunia Kontemporer: Konsep, Geneologi dan Teori*. (Yogyakarta: Suka Press, 2012), hlm. 158.

Kehadiran Tim Hisbah sebagai sebuah fenomena menjamurnya berbagai macam laskar Islam di Solo bukanlah sebuah fenomena baru. Asal-usulnya dapat ditelusuri ke belakang sejak masa transisi perubahan iklim politik Indonesia dari era otoritarian, ke arah yang lebih demokratis. Bahkan jauh sebelum itu, Solo telah lebih dahulu melahirkan gerakan Islam pertama penentang pemerintahan kolonial Belanda yang dikenal dengan Sarekat Dagang Islam (SDI) dan kemudian berubah menjadi Sarekat Islam (SI). Pada tahun-tahun berikutnya, Solo terus melahirkan gerakan Islamis yang memiliki visi yang sama antara satu gerakan dan gerakan lainnya: penegakan syariat Islam. Berikut sebagai gambaran awal, akan dipaparkan beberapa macam gerakan Islamis di Solo dari era pra kemerdekaan dan era Orde Baru sebagai bahan analisis kemunculan dan menjamurnya laskar-laskar Islam pada era Reformasi dan di masa demokratisasi di Indonesia.

1. Pra Kemerdekaan: Kasus Sarekat Dagang Islam (SDI)

Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh H.Samanhudi pada 16 Oktober 1905 bukan tanpa alasan. Sebenarnya pendirian SDI adalah sebuah respon kultural akibat kesenjangan sosial-ekonomi para pekerja dan pedagang di karesidenan Surakarta secara khusus. Kesenjangan sosial ini dipicu oleh kebijakan pemerintah Belanda yang membedakan antara pribumi, bangsawan dan beberapa masyarakat Tionghoa. Bagi anak-anak *priayi* memiliki kesempatan untuk meneruskan pendidikan dengan model Belanda yang bersifat sekuler dan dianggap terkesan diskriminatif. Sedangkan masyarakat Tionghoa/etnis China memiliki kedudukan khusus dalam bidang ekonomi pada pemerintahan Belanda, hubungan perdagangan antara Negara Tiongkok dan

masyarakat China di Hindia Belanda dianggap mampu membawa keuntungan besar bagi Pemerintahan Hindia Belanda pada waktu itu. Akhirnya, akibat kemajuan di bidang perdagangan, pemerintah Hindia Belanda mengambil alih sistem pembiayaan pendidikan China dengan cara mendirikan sekolah China-Belanda *Hollandsche Chineesche Scholen* (HCS).³⁶ Kesenjangan sosial ini berdampak kepada kesenjangan ekonomi di tingkat para pekerja pribumi dan pekerja etnis China. Para pekerja China dan beberapa yang bekerja di perkebunan-perkebunan, pabrik-pabrik Eropa dan China mendapatkan penghasilan rata-rata (dari awal penerapan politik etis hingga tahun 1925 an) 370 Gulden per keluarga atau setara \$148 per tahun. Sedangkan, masyarakat pribumi yang hanya bekerja sebagai petani biasa dan tenaga kerja lepas (*casual laborers*) hanya mendapat 101 – 120 Gulden.³⁷

Kondisi ini membuat Samanhudi, sebagai aktor santri pribumi, membuat sebuah gerakan sosial. Ia sanggup memobilisasi sumber daya yang ada dengan membingkai kemiskinan para kaum pribumi dengan semangat perjuangan Islam. Pada awal-awal abad ke 20, pemerintah Belanda memulai zaman baru dalam sistem politik etis kolonial di Indonesia. Dukungan untuk menerapkan sistem politik etis yang dimotori oleh Conrad Theodore Van Deventer menjadikan kaum muda pribumi mendapat kesempatan untuk lebih aktif berorganisasi dan memiliki pendidikan formal.³⁸ Merujuk pada teori struktur kesempatan politik (*political opportunity*) dalam teori teori gerakan sosial,

³⁶ Nasihin, *Sarekat Islam Mencari Ideologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 31.

³⁷ George McTurnan Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, (New York: Cornell University Press, 1952), hlm. 20.

³⁸ Nasihin, *Sarekat Islam Mencari Ideologi*, hlm. 27.

Politik etis yang diterapkan ini kemudian tidak disia-siakan oleh Samanhudi dalam melakukan pertentangan terhadap kebijakan pemerintah Belanda dengan mendirikan sebuah gerakan sosial pribumi dalam bidang ekonomi atau perdagangan, yang dikenal dengan Sarekat Dagang Islam. Gerakan SDI tidak jarang menimbulkan sebuah *gap* yang serius antara masyarakat pribumi dan masyarakat Tionghoa, beberapa bentrokan dengan masyarakat Tionghoa ini membuat pemerintah Belanda menaruh curiga kepada Samanhudi sebagai aktor penggerak di balik peristiwa tersebut.³⁹

Bentrokan ini terus berlanjut hingga SDI bertransformasi menjadi Sarekat Islam (SI) yang juga memiliki semangat untuk menentang pemerintahan Belanda. Penentangan terhadap pemerintah Belanda terus dilancarkan oleh beberapa masyarakat pribumi yang bergabung bersama SI. Hingga pada tahun 1920, pergerakan SI terus mengalami peningkatan signifikan dengan bertambahnya anggota SI. Aksi demonstrasi dan mogoknya para buruh kerja dilakukan di beberapa wilayah pabrik. Akhirnya Gubernur Jendral Dirk Fork kembali menerapkan sikap pemerintahan yang represif terhadap pergerakan masyarakat pribumi.⁴⁰ Melalui pergerakan Islam awal ini dapat diketahui bahwa sejak masa pra kemerdekaan, Islam telah dijadikan sebuah ideologi sebagai strategi wacana dalam menyuarakan kemiskinan, kesenjangan sosial dan ketidakadilan pemerintah. Sebenarnya, bukan hanya Islam yang dijadikan sebagai ideologi perlawanan terhadap pemerintah Belanda. Beberapa orang

³⁹ *Ibid*, hlm.39.

⁴⁰ Agus Salim, "Hak Berserikat dan berkoempolan (pasal 33RR)" dalam A.Zainoel Hasan, *Aku Pemuda Kemarin di Hari Esok*, kumpulan tulisan, *pidato Tokoh Pergerakan Kebangsaan 1913-1938*, (Jakarta: Jayasakti, 1981), hlm. 8i.

dengan Ideologi sosialisme-komunisme pada tahun-tahun tersebut memiliki semangat untuk merebut negara dari pemerintahan Belanda. Bahkan di Solo, dikenal sosok KH Misbsch yang selalu melontarkan kalimat konvergensi dua ideologi bahwa seorang Muslim harus pula seorang komunis jika ia memiliki semangat akan sistem politik yang membebaskan.⁴¹ Bisa dipahami apabila KH Misbach melontarkan hal demikian, karena titik temu antara kedua ideologi ini adalah bahwa Islam memiliki semangat membela kaum *mustad'afien*, sementara sosialisme-komunisme –dalam istilah lain– membela kaum tertindas seperti kaum buruh dan petani. Satu titik temu ini seolah mempertemukan Islam dan komunisme dalam satu bingkai untuk bersama melakukan gerakan sosial.

2. Orde Lama dan Orde Baru: Gerakan Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir

Gerakan Islamis militan telah menjadi bagian dari sejarah sejak tahun-tahun awal kemerdekaan Indonesia. pada dasarnya, Gerakan Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir hanyalah penerus dari gerakan Darul Islam (DI)/ Negara Islam Indonesia (NII) yang diproklamirkan oleh Kartosuwiryo pada 7 Agustus 1949 di Cisampak, Tasikmalaya.⁴² Abdullah Sungkar adalah seorang muballigh keturunan Hadhramiy yang lahir di Solo 1937 dan salah satu inisiator pendirian pondok pesantren al-Mukmin Ngruki pada tahun 1972

⁴¹ Syamsul Bakri, *Gerakan Komunisme Islam di Surakarta 1914-1942*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, 2014).

⁴² Lihat perjalanan sejarahnya pada Ahmad Yani Anshari, *Untuk Negara Islam Indonesia, Perjuangan Darul Islam dan Al-Jama'ah Al-Islamiyah*, (Yogyakarta: Siyasat Press).

selain Abu Bakar Ba'asyir.⁴³ Sungkar menempuh pendidikan dan memulai pengalaman organisasinya di al-Irsyad⁴⁴ Solo dan Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), Sungkar kemudian menjadi simpatisan partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) di usianya yang masih relatif muda. Selain itu Sungkar sangat mengidolakan Natsir sebagai sosok politisi yang dianggap memperjuangkan syariat Islam melalui partai Masyumi yang dipimpinnya.⁴⁵ Tampaknya, dari al-Irsyad inilah Sungkar telah mengenal ideologi salafy, ditambah dengan aktifnya Sungkar di GPPI menjadikannya semangat berjuang untuk menegakkan syariat Islam sebagai suatu dasar negara.

Sungkar mulai akrab dengan Abu Bakar Ba'asyir ketika keduanya membuat Radio Dakwah Islamiyyah Surakarta (RADIS) dan mendirikan pesantren Ngruki.⁴⁶ Ba'asyir adalah seorang muballigh keturunan Arab yang lahir di Solo, dan sekarang terkenal dengan pendiri Jama'ah Ansharut Tauhid (JAT). Keduanya mulai aktif di dunia penentang pemerintah ketika bergabung menjadi anggota DI pada tahun 1976. Sebelum bergabungnya Sungkar dan Ba'asyir ke DI, mereka berdua berniat memobilisasi para ulama Solo untuk membangun sebuah jama'ah sebagai wadah perjuangan politik, yaitu pendirian negara Islam. Sungkar dan Ba'asyir mengajak serta 12 ulama Solo non partai termasuk Abdullah Marzuki (pendiri Pondok Pesantren as-Salam Solo) dan

⁴³ Selengkapnya mengenai pondok pesantren ini lihat karya Zuly Qadir, *Ada Apa dengan Pesantren Ngruki?* (Yogyakarta, Pondok Edukasi, 2003).

⁴⁴ Al-Irsyad sendiri pada awalnya adalah organisasi orang-orang Arab non-habaib (bukan keturunan Nabi Muhammad. Organisasi ini termasuk pembawa ajaran salafy ke Indonesia. Saat ini al-Irsyad menjadi sebuah yayasan dan memiliki lembaga pendidikan setingkat SD, SMP dan SMA di Solo.

⁴⁵ Solahuddin, *NII Sampai Ji, Salafy Jihadisme di Indonesia*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2011), hlm. 140.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 42.

Abdullah Thuffail Saputra (Pendiri Majelis Tafsir al-Qur'an, MTA) untuk membentuk jama'ah. Sungkar dan Ba'asyir menggunakan *atsar* (perkataan sahabat) Umar yang menyatakan "*lâ islâma illâ bi al jama'ah, wa lâ jamâ'ata illa bi al imârah, wa lâ imaarata illâ bi al ithâ'ah*" (tidak berislam seseorang kalau tidak masuk ke dalam jama'ah, tidak dianggap berjamaah kecuali dengan kepemimpinan, dan tidak ada kepemimpinan kecuali dengan ketaatan).⁴⁷

Tahun-tahun akhir 1970 hingga 1980 adalah waktu yang sangat berarti bagi Sungkar dan Ba'asyir untuk melakukan konsolidasi kekuatan di Solo raya, karena pada tahun itu Sungkar memegang kendali atas DI di wilayah Surakarta. Pada era Orde Baru tersebut ia juga sangat aktif mengkampanyekan gerakan anti Pancasila yang dijadikan Soeharto sebagai asas tunggal. Sungkar sempat menjadi kandidat imam DI sementara untuk menggantikan Adah Djailani yang sedang menjadi tahanan pemerintah. Ia dicalonkan bersama dua orang calon lainnya yaitu Abdul Fatah Wiranangapati, salah satu komandan DI Jawa Barat pertama, dan Ajengan Masduki yang diusulkan oleh majelis Syuro DI pada tahun 1987. Namun Sungkar kalah dengan seniornya yaitu Ajengan Masduki. Begitu terpilih sebagai pejabat Imam, Masduki menempatkan Abu Bakar Ba'asyir selaku Menteri Keadilan dan Abdullah Sungkar bertanggung jawab atas urusan luar negeri, terutama dalam rangka mencari dukungan politik dan pendanaan dari luar. Tujuan utama kabinet Masduki adalah membangun dukungan internasional serta memperkuat kemampuan militer DI. Sungkar memusatkan diri dalam upaya mencari dana dari Arab Saudi dan *Rabithah*,

⁴⁷ Ibid, hlm. 142.

selain itu Sungkar juga mendapat tugas memperlancar pengiriman rekrut DI ke Afghanistan. Pada tahun 1988, untuk kepentingan tujuan tersebut, Masduki berangkat bersama delegasi DI menuju Pakistan dan Afghanistan. Termasuk didalamnya Abdullah Sungkar, Abu Bakar Ba'asyir, serta dua orang lain. dalam kunjungannya tersebut, Sungkar paling vokal ketika berdialog dengan para elit mujahid di Afghanistan, hal ini karena Masduki tidak dapat berbicara Bahasa Arab dengan lancar. Konon Sungkar memanfaatkan kunjungan tersebut untuk memperkenalkan Masduki kepada Abdul Rasul Sayyaf, pendiri kamp di Sada yang tengah melatih para rekrutan DI, ideolog utama dari jihad salafi, berikut komandan mujahidin senior lainnya selain Abdullah Azzam.⁴⁸

Sungkar dan Ba'asyir masih terus bersama hingga perpecahan yang terjadi dalam tubuh DI menjadi dua kubu, Ajengan Masduki yang tetap dalam kubu DI, dan Sungkar-Ba'asyir yang mengorganisir diri menjadi Jama'ah Islamiyah. Hal ini disinyalir karena Sungkar-Ba'asyir semakin tidak setuju dengan tauhid Masduki yang cenderung bersifat sufistik.⁴⁹ Namun terdapat versi lain bahwa Pecahnya DI ini disinyalir karena perebutan jabatan posisi Amir NII yang sebelum tahun 1992 diduduki oleh Adah Djaelani Tirtapradja.⁵⁰ Sungkar-Ba'asyir berhasil mendirikan Jama'ah Islamiyah pada 1 Januari 1993, ideologi yang ia gunakan adalah ideologi Salafy Jihadis. JI menganggap rezim Orde Baru sebagai musuh yang harus diperangi karena dianggap sangat menindas kepentingan umat Islam dengan menjadikan Pancasila sebagai asas

⁴⁸ International Crisis Group (ICG), *Recycling Militants in Indonesia, Darul Islam and Australian Embassy Bombing*, (Asia Report, 22 Februari 2005), hlm. 21.

⁴⁹ Lihat Natsir Abbas, *Membongkar Jama'ah Islamiyah*, (Jakarta: Grafindo, 2003).

⁵⁰ Ahmad Yani Anshari, *Untuk Negara Islam Indonesia...*, hlm. 92.

tunggal dalam kehidupan bernegara dan bersifat represif terhadap kekuatan-kekuatan lain yang mengancam kekuasaannya. Karenanya, kaum Islamis tidak dapat bebas berbicara mengkritik pemerintah. Soeharto sang pemimpin Orde Baru dianggap sebagai *kafir mahally*, yaitu orang yang beragama Islam dari satu wilayah, namun berkuasa bukan atas nama Islam dan menjadikan ideologi selain syariat Islam sebagai dasar negara dan cenderung diktator. Dalam pandangan kaum JI, *kafir mahally* tersebut lebih berbahaya daripada *kafir ajnaby*; yaitu kaum kafir yang menduduki negara-negara Muslim seperti di Palestina.⁵¹

Dalam posisinya sebagai Amir Jama'ah Islamiyah, Sungkar juga gencar melakukan perekrutan anggota dari beberapa kota termasuk Solo yang ia gerakkan dari Malaysia. Tidak sulit bagi Sungkar-Ba'asyir untuk kembali membangun organisasi, karena minimal mereka telah memiliki basis massa di Solo, ditambah dengan model *usrah* yaitu model organisasi yang diambil dari Ikhwan al-Muslimin dalam mengorganisir jama'ah. Ketika nuansa politik di Indonesia berada dalam kekacauan akibat krisis Asia yang berdampak pada lengsernya rezim Orde Baru, Sungkar-Ba'asyir kembali ke Tanah Air setelah pelariannya selama kurang lebih 15 tahun dari negeri jiran Malaysia. Mereka mendapat sambutan baik yang luar biasa dari para jamaahnya yang ada di Indonesia, terutama di Solo. Namun tidak lama setelah kepulangannya ke Tanah Air, Sungkar menghembuskan nafas terakhir karena sakit yang dideritanya pada 1999. Padahal beberapa jama'ah Sungkar sudah bersiap

⁵¹ Solahuddin, *NII Sampai JI, Salafy Jihadisme di Indonesia*, hlm. 274.

kembali untuk memperjuangkan ide politik Islamnya dengan mengumpulkan banyak jamaa'ah yang tersebar di sekitar Solo. Perjuangan politik pun dilanjutkan oleh Ba'asyir. Alam demokrasi tampaknya juga dinikmati oleh Ba'asyir dan para Jamaahnya. Pada tahun-tahun awal era reformasi, Ba'asyir kembali sering mengisi pengajian di beberapa masjid di Solo seperti masjid al-Ikhlâs dan Baitul Amin Cemani, masjid Laweyan, dan masjid Marwa Semanggi.⁵² Setelah kejadian Bom Bali 2002, Ba'asyir ditangkap dengan tuduhan memiliki keterkaitan dan jaringan dengan Jama'ah Islamiyah yang ada di Mesir dan Afghanistan.

3. Terbukanya Pintu Demokrasi: Laskar-Laskar Islam Lokal Era Reformasi

Lengsernya Soeharto membawa dampak yang luas dalam perpolitikan nasional. Laju gelombang demokratisasi sudah terlalu kuat untuk dibendung. Huntington mengatakan gelombang demokratisasi dapat diketahui dengan lahirnya kelompok-kelompok pada masa transisi dari rezim-rezim non demokratis ke rezim yang lebih demokratis, yang terjadi dalam kurun waktu tertentu dan dengan jumlah sangat signifikan, lebih banyak daripada kelompok pada masa transisi menuju arah sebaliknya (non demokratis).⁵³ Demokratisasi yang dikatakan Huntington ini dapat dianalisis dari beberapa hal, diantaranya adalah terciptanya ruang kebebasan pers, aksi dan gerakan sosial yang semakin leluasa menunjukkan eksistensinya, sistem pemilihan yang semakin demokratis, hingga kebebasan berkumpul, berserikat dan membentuk

⁵² Wawancara dengan Yusuf Parmadi, Solo, Februari 2015.

⁵³ Samuel P. Huntington, *The Third Wave: Democratization in The Late Twentieth Century*, (Oklahoma: University of Oklahoma Press, 1991), hlm. 13.

organisasi yang telah dijamin undang-undang dengan ragam ideologi dan keyakinan (kecuali komunisme). Akibatnya, semua organisasi dan perkumpulan maupun perserikatan ini tiba-tiba hadir dalam jumlah yang banyak sebagai wahana baru bagi *civil society*.

Tidak disangka, demokratisasi dimanfaatkan bukan hanya dari kalangan nasionalis yang menerima Pancasila sebagai ideologi negara. Beberapa perkumpulan Islam yang secara geneologi mengakar pada kelompok Islamis di masa lalu (seperti DI/NII) juga berkembang di tengah euforia demokrasi yang terjadi di Indonesia. Beberapa kelompok ingin mensucikan dan menegakkan syariat Islam sebagai sebuah buku panduan dalam memberantas ketidakadilan, kesewenang-wenangan dan perilaku amoral lainnya seperti perjudian, mabuk-mabukan dan perzinahan. Contohnya adalah di Ibukota, berdiri gerakan yang ingin menjadikan syariat Islam sebagai sebuah acuan dalam memberantas kemaksiatan yaitu Front Pembela Islam (FPI). Di Solo, muncul beberapa gerakan yang lebih percaya diri untuk membangun identitasnya sebagai sekelompok orang yang ingin memperjuangkan politik Islam. Terbentuklah beberapa laskar lokal Solo yang memiliki ideologi untuk mewujudkan Islam politik seperti Laskar Jundullah yang merupakan sayap dari Forum Komunikasi Aktivis Masjid (FKAM, 1999), Laskar Hizbullah, (1999), Front Pemuda Islam Surakarta (FPIS, 1999) dan Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS, 2000).

FKAM adalah salah satu organisasi masyarakat (Ormas) Islam lokal Solo yang terbentuk di tengah hingar bingarnya krisis politik dan tuntutan reformasi

pada tahun 1998. FKAM dibidani oleh beberapa aktifis masjid al-Amin Laweyan, Surakarta. Beberapa diantara pendiri tersebut adalah Muhammad Kalono, M. Sholeh Ibrahim, Yayan, Agus Priyanto dan Maman Abdurrahman. FKAM aktif melakukan advokasi dan kampanye terhadap isu-isu yang mereka anggap sebagai berita yang merugikan umat Islam seperti invasi militer Amerika atas Afghanistan dan Irak, pemberitaan terorisme, hingga mengkampanyekan pembebasan atas ketertindasan umat Islam selama Orde Baru dan turut ikut andil dalam menggulingkan penguasa otoriter tersebut. Seperti ormas Islam lainnya, FKAM memiliki satuan tugas keamanan atau sayap organisasi yang sifatnya paramiliter, sayap organisasi FKAM mereka namakan dengan Laskar Jundullah. Selain FKAM, laskar yang kerap melakukan aksi-aksi lain adalah Laskar Hizbullah. Laskar ini sebenarnya kurang sesuai jika dikatakan sebagai gerakan Islamis lokal, karena secara organisatoris Laskar Hizbullah adalah satuan paramiliter dari Partai Bulan Bintang (PBB) yang berdiri pada tahun 1998. Namun, laskar Hizbullah di wilayah Solo Raya sangat aktif melakukan aksi anti kemaksiatan dan menyuarakan penerapan syariat Islam di bawah komando Yani Rahmanto. Inilah yang membedakan Laskar Hizbullah dengan laskar lainnya yang berada di luar kota Solo. Sebagaimana partisan partai politik lainnya, Laskar Hizbullah juga aktif berkampanye untuk kemenangan PBB dalam Pemilu 1999. Laskar Hizbullah memiliki anggota yang berasal dari kaum muda Solo, bahkan Sigit

Qardhawi Sang Panglima Hisbah pernah menjadi salah satu anggota aktif di laskar ini.⁵⁴

Selain Hizbullah dan laskar Jundullah FKAM. Gerakan Islamis lain adalah Front Pemuda Islam Surakarta (FPIS). FPIS terbentuk pada tahun 1999 oleh beberapa orang yang pada dasarnya pernah menjadi jama'ah pengajian Gumuk (Jama'ah Gumuk)⁵⁵. Gerakan ini lahir dengan pemicu yang sama seperti Laskar Jihad, yaitu permasalahan konflik Ambon, meskipun memang mereka tidak secara langsung terjun untuk melibatkan diri secara institusional. FPIS pada tahun-tahun selanjutnya menjadi sebuah gerakan yang menurut mereka adalah gerakan anti maksiat, selain itu mereka ikut menanggapi isu-isu politik nasional dan internasional yang diklaim cenderung menyudutkan umat Islam, salah satu contohnya adalah kebijakan Amerika Serikat yang gencar untuk melawan terorisme. Selain itu setelah jatuhnya era Orde Baru, FPIS seakan diakuisisi oleh Jama'ah Gumuk karena anggotanya yang dominan dari jama'ah tersebut.⁵⁶ Namun saat ini, FPIS sedikit berseberangan dengan beberapa gerakan Islamis lokal lainnya seperti LUIS, FKPM dan Tim Hisbah. Hal ini karena para anggotanya yang terkena imbas perjalanan Mudzakkir yang pernah mempelajari Ilmu Islam di beberapa tempat yang disinyalir sebagai

⁵⁴ Wawancara Amin, anggota Tim Hisbah, Semangi, Februari 2015.

⁵⁵ Jamaah Gumuk adalah kelompok pengajian yang didirikan oleh H. Mudzakkir pada tahun 1976 di sebuah masjid di daerah Gumuk, Mangkubumi, Solo. Pada tahun 1980 an, masjid Gumuk dicurigai oleh beberapa kelompok di Solo sebagai tempat pengajian eksklusif kalangan Syiah. Alasan atas kecurigaan ini adalah bahwa Mudzakir pernah menimba ilmu di Yayasan Pendidikan Islam (YAPI) Bangil, salah satu yayasan di Indonesia yang berafiliasi kepada Syiah itsna 'asyariah di Iran. Selain itu, Mudzakir juga pernah belajar Islam di Iran. Tapi semua itu dibantah oleh jamaahnya karena mereka juga belajar kitab karangan beberapa ulama Sunni seperti Ahmad Mustafa al-Maraghi dan Ibnu Katsir.

⁵⁶ Muhammad Wildan, *Mapping Radical Islamism in Solo*, hlm.55.

pusat pergerakan Syiah seperti di Iran dan di Yayasan Pendidikan Islam (YAPI) Bangil.

Beberapa kelompok lokal ini menemukan momentumnya untuk mengonsolidasikan kekuatan ketika peristiwa pertikaian Ambon Berdarah. Pada pertengahan tahun 1999, umat Islam di kota Solo dihebohkan dengan rumor yang beredar bahwa pihak-pihak Kristen akan berusaha menyebar konflik ke luar Maluku. Rumor ini didasari dari banyaknya selebaran gelap yang beredar bahwa Solo adalah kota tujuan untuk menyulut konflik tersebut dengan alasan bahwa banyaknya pondok yang berdiri sebagai pondok anti Kristen dan ingin menghancurkan Kristen, karenanya pihak Kristen telah melakukan pembekalan termasuk pelatihan militer untuk persiapan konflik Solo berdarah. beberapa permasalahan ini telah dibicarakan dalam sebuah rapat tertutup di Sekolah Menengah Kejuruan Kristen (SMKK) Simo Boyolali pada akhir Maret 1999.⁵⁷

Informasi gelap tersebut menjadi ramai ketika terjadi insiden penyerangan Pondok Pesantren Darus Syahadah, Simo Boyolali pada malam hari 8 April 1999. Sebuah truk yang membawa sekelompok massa datang ke pesantren tersebut dan memutus kabel aliran listrik pesantren, lalu mereka masuk ke dalam komplek dan berniat merusak pesantren. Namun kejadian tersebut dilawan oleh para santri yang ada, setelah terjadi kejar-kejaran, akhirnya massa yang tidak dikenal tersebut kembali menuju truk dan kemudian

⁵⁷ Majalah Media Dakwah, (Edisi Mei, 1999), hlm.10-15.

meninggalkan pesantren.⁵⁸ Insiden yang terjadi di Pesantren Darus Syahadah ini kemudian dikaitkan dengan informasi gelap yang beredar akan adanya kerusuhan serupa Ambon berdarah di kota Solo. Saat itu beberapa komponen umat Islam di Solo bersatu untuk menggalang solidaritas dengan mengadakan apel siaga. Agenda mengenai perkumpulan dan apel siaga ternyata disambut baik oleh umat Islam Solo. Pada tanggal 16 April 1999, ribuan organisasi masyarakat (ormas) Islam berkumpul di stadion Manahan Solo. Saat itu, mobilisator massa dipegang oleh Jamaa'ah Islamiyyah Solo.⁵⁹

Satu tahun setelah awal tersulutnya konflik di Ambon pada Januari 1999 ternyata belum membawa kabar gembira akan perdamaian di tanah *Manise* tersebut. Alih-alih perdamaian, konflik atas nama agama kembali meledak di daerah lain di Indonesia, tepatnya di Poso Sulawesi Tengah pada April 2000. Karena krisis sosial di Ambon yang telah menelan ratusan nyawa belum juga tuntas, beberapa orang yang mewakili organisasi Islam di Solo kemudian melakukan pertemuan di kediaman Sriyadi, daerah Pajang, Solo. Dalam pertemuan itu disepakati untuk membentuk organisasi *tansikh* atau semacam aliansi beberapa organisasi Islam yang siap melakukan aksi solidaritas Muslim mengenai tragedi berdarah Ambon di kota Solo. Maka dibentuklah Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS) dengan sepuluh orang inisiator utama pendirian organisasi: Edi Lukito, Salman al-Farisi, Hendro Sudarsono (Laskar Mujahidin), Jayendra Dewa, Yusuf Suparna, Muhammad Kalono (FKAM/Laskar Jundullah), Yani Rahmanto (Hizbullah), Khairul (FPIS), Heru

⁵⁸ Ibid, hlm.13

⁵⁹ Solahuddin, *NII Sampai Ji*, hlm. 257.

Prayetno (Satuan Tugas Majelis Tafsir al-Qur'an, Satgas MTA) dan Sriyadi (Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah, KOKAM). Pertemuan tersebut juga mengagendakan mengenai konferensi umat Islam menanggapi kasus Ambon yang belum kunjung usai. Agenda mengenai perkumpulan ternyata disambut baik oleh umat Islam. Pada tanggal 16 Desember 2000, beberapa ormas Islam berhasil dimobilisasi memadati Stadion Kota Barat untuk melakukan aksi solidaritas dan apel siaga. Ketika itu pula, LUIS dideklarasikan sebagai sebuah organisasi *tansikh* seluruh elemen umat Islam, deklarasi tersebut juga disaksikan oleh ketua MUI Solo.⁶⁰

Setelah LUIS terbentuk, dan diketuai oleh Edi Lukito, para anggota didominasi oleh kalangan Islamis Solo. Para anggota LUIS aktif melakukan pengawalan terhadap kegiatan-kegiatan di sekitar Solo, LUIS lebih banyak bergerak dalam advokasi *non litigasi*, misalnya : isu penegakan syariat Islam, isu perlawanan atas stigmatisasi terorisme, isu Anti Amerika, isu penistaan agama, pemberantasan tempat-tempat maksiat, pemberdayaan umat Islam, isu pembubaran Ahmadiyah, RUU Pornografi, dan sebagainya. LUIS melancarkan aksinya bukan hanya kepada masyarakat, melainkan ikut memprotes kebijakan instansi pemerintahan, misalnya meminta mediasi dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) kota Solo untuk menyuarakan aspirasi mereka atas pembubaran Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri. Lembaga-lembaga pendidikan pun menjadi tempat tujuan aksi LUIS, misalnya kampanye anti *valentine* di sekolah-sekolah. Bahkan, LUIS berani memprotes kerjasama

⁶⁰ Wawancara dengan Yusuf Parmadi, Solo 4 Maret 2015.

antara IAIN dan kedutaan besar Iran di Indonesia. kejadiannya bermula ketika IAIN Surakarta, bekerja sama dengan Kedutaan Besar Iran di Indonesia ingin mendirikan *Iranian Corner*. Proses kerjasama diawali dengan kunjungan Duta Besar (Dubes) Iran untuk Indonesia yang diwakili oleh Hojjatullah Ibrahimian dan mempromosikan Iran sebagai sebuah Negara dengan banyak warisan peradaban Persia dan sebagai Negara Islam modern saat ini.⁶¹ Kabar pendirian Iranian Corner tersebut terdengar oleh LUIS, mereka menolak dengan alasan menjaga Islam sebagai sebuah agama yang murni dan tidak ingin Syiah yang dianggap menodai agama Islam berkembang di Indonesia, penolakan tersebut semakin tidak diterima karena Syiah justru masuk melalui Perguruan Tinggi Islam.⁶² Laskar Umat Islam Surakarta menyuarakan penolakannya melalui beberapa tahap, pertama LUIS mengaku mengirimkan surat kepada pihak IAIN yang dianggap sebagai surat peringatan akan bahaya Syiah di Indonesia. Surat tersebut direspon dengan proses dialog antara LUIS dan IAIN. Hasil dari dialog tersebut dianggap oleh pihak LUIS sebagai hasil yang ambigu. Laskar umat Islam Surakarta menilai bahwa Iranian Corner tetap akan didirikan. Menanggapi hal tersebut LUIS mengerahkan massa untuk melakukan aksi penolakan, pekikan kalimat takbir terdengar nyaring dan garang dari para laskar Islam Solo tersebut, mereka berorasi menyuarakan penistaan, penodaan dan kesesatan kaum Syiah yang dianggap menyelewengkan agama Islam.

Melihat berbagai reaksi kelompok Islamis pada masa pra-kemerdekaan, awal kemerdekaan-Orde Baru, hingga era Reformasi menghadirkan sebuah

⁶¹ Wawancara dengan Syamsul Bakri, Desember 2014.

⁶² Wawancara dengan Edi Lukito, 2 Maret 2015.

pertanyaan: mengapa masyarakat Muslim Solo selalu muncul di permukaan untuk melakukan gerakan perlawanan di setiap zaman? Jawabannya bukan karena banyaknya masyarakat Muslim yang menguasai ruang publik, namun hal ini justru dikarenakan banyaknya masyarakat *abangan* yang berhasil diprovokasi oleh pemangku kepentingan gerakan Islam radikal. Mereka tetap bukan aliran *mainstream* di Solo, namun mereka selalu muncul di permukaan.⁶³ Disparitas ekonomi, sosial dan politik telah membuat masyarakat terbuai akan janji-janji Islam yang membebaskan. Ketika zaman penjajahan mereka melemparkan isu-isu perlawanan atas ketertindasan masyarakat pribumi dengan satu kata “Jihad”. Ketika zaman berubah menjadi negara merdeka, dalam pemerintahan represif para aktor gerakan Islamis membuat sebuah gerakan anti slogan-slogan pemerintah seperti anti pancasila dan menawarkan Islam sebagai format negara tandingan. Era reformasi, di mana nuansa politik dituntut harus lebih demokratis, gerakan Islamis lebih leluasa untuk bersuara, berserikat dan berkumpul tanpa adanya tuduhan kelompok subversif. Dengan demikian gerakan berhasil membingkai kemiskinan, ketidakadilan, kebobrokan moral hingga adanya konspirasi besar dari negara adidaya untuk menghancurkan negara-negara Muslim karena dianggap sebagai lawan politik, dan menawarkan Islam sebagai sebuah solusi untuk segala permasalahan. Fokus yang mereka wacanakan pada era demokrasi bukan menajamkan pada persoalan jihad di medan peperangan, namun lebih ke arah amar ma’ruf nahi munkar, paling tidak dalam *scoup* lokal.

⁶³ Lihat Penelitian Muhammad Wildan, “Mapping Radical Islamism in Solo: A Study of the Proliferation of radical Islamism In a Town in Central Java”. Dalam Martin Van Bruinessen (ed), *Contemporary Developments In Indonesian Islam, Explaining The Conservative Turn*, (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2013).

Sebagaimana keberhasilan Ja'far Umar Thalib dalam membentuk Laskar Jihad pada tahun 1999, yang mana keberhasilannya dipengaruhi keberhasilan ekspansi kaum salafi di Indonesia dalam berbagai bidang, diantaranya lembaga sosial dan pendidikan,⁶⁴ menjamurnya gerakan Islamis tidak lepas dari peran serta ideologi salafi jihadis di Solo yang dibawa oleh aktor terdahulu, Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir. Para aktor gerakan salafi jihadis ini berhasil menancapkan ruh perlawanan terhadap rezim berkuasa dengan melakukan ekspansi ideologi di Indonesia, khususnya di Solo.

B. Sigit Qardhawi dan Deklarasi Tim Hisbah

Sebagai kajian yang berkaitan dengan sosiologi Islam politik. Maka kajian ini bukan saja menitik beratkan Tim Hisbah sebagai sebuah gejala keagamaan, namun sebuah gejala sosial-politik yang digerakkan oleh sekelompok individu Muslim yang melakukan gerakan dengan landasan ideologi yang diyakini bersama. Terdapat tiga unsur terpenting dalam kajian mengenai Islam politik yang berbentuk sebuah gerakan. Unsur tersebut berupa: Aktor yang terlibat, aktivisme dan ideologi.⁶⁵ Sub-bab ini akan membahas ketiga unsur tersebut yang terdapat dalam gerakan Tim Hisbah dengan menggunakan teori gerakan sosial.

⁶⁴ Lihat Penelitian Noorhaidi Hasan, *Laskar Jihad, Islam, Militansi dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca Orde Baru*.(Jakarta: KITLV, 2008).

⁶⁵ Noorhaidi Hasan, *Islam Politik Di Dunia Kontemporer: Konsep, Geneologi dan Teori*. (Yogyakarta: Suka Press,2012), hlm. 2-3.

1. Sigit Qardhawi Sang Panglima Hisbah

Sebagai sebuah gerakan sosial, kelompok Islamis tidak dapat lepas dari peran para aktor. Aktor merupakan suatu unsur penting dalam perbincangan mengenai sebuah gerakan selain kondisi sosial-politik dan ideologi.

Sigit Qardhawi bukanlah seorang tokoh yang berasal dari keturunan Arab sebagaimana tokoh gerakan Islamis di Solo sebelumnya; Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir. Sigit adalah seorang putera daerah asli Solo dan memiliki keturunan Bangsawan Solo, ayahnya R. Wiharto masih memiliki keturunan darah dari Raja Pakubuwono IX (meskipun dari pihak *selir*), dan bekerja mengelola sebuah apotek di Solo. Sedangkan ibunya, Endang Wiharto adalah anak dari pensiunan militer dan bekerja sebagai guru di sebuah sekolah farmasi. Sigit lahir pada bulan Mei 1975 dan diberi nama Sigit Hermawan Wijayanto, seorang putera ketiga dari empat bersaudara. Sigit banyak mengenyam pendidikan di berbagai Sekolah Negeri Umum. Sigit memulai pendidikan formalnya di Sekolah Dasar (SD) Kesatrian Keraton, dilanjutkan ke Sekolah menengah Pertama (SMP) 6 Surakarta, kemudian berlanjut ke Sekolah Menengah Atas (SMA) 7 Surakarta. Semasa kecil, Sigit dikenal sebagai pribadi yang manja, patuh dan taat kepada orang tua. Bahkan hingga Sigit menjadi ketua Tim Hisbah pun masih sesekali meminta perlakuan manja dari ibunya, ibunda Sigit menuturkan bahwa anaknya tidak segan untuk meminta modal materi untuk berdakwah, Sigit sering mengatakan “mami, ayok mi kita cari

pahala, mami modalin bensin Sigit untuk *ngisi ta'lim* di masjid".⁶⁶ Kesantunan Sigit tidak hanya diakui oleh keluarga-keluarganya, tetangga dan kawan-kawannya juga mengatakan bahwa Sigit adalah seorang yang ramah dan santun dalam berbicara.⁶⁷

Kesantunannya dalam berbicara ini sangat mungkin menjadi karakter Sigit Qardhawi karena ia terlahir dari keluarga Kraton. Sebagaimana tradisi Jawa, orang tua sangat memegang teguh kesantunan dalam berbicara dengan mengajarkan kepada anak-anaknya bahasa *kromo inggil*, tingkatan bahasa Jawa yang dianggap menunjukkan kesantunan pengucapnya, digunakan ketika berbicara pada strata sosial yang lebih tinggi seperti orang tua, tokoh terhormat dan orang yang usianya jauh lebih tua.

Selepas SMA, Sigit melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi. Ia mengambil fakultas hukum di Universitas Selamat Riyadi (UNISRI) Surakarta. Ketika jenjang inilah Sigit mulai mendalami hobinya sebagai pemain musik, sebenarnya bakatnya telah terlihat semasa SMA saat Sigit sering menyanyikan lagu-lagu grup band papan atas dengan gitar yang dimiliki. Ketika lulus SMA dan merasakan dunia yang lebih luas, Sigit akhirnya mendalami minat di bidang musik dengan membentuk sebuah grup band beraliran *rock*, dan terkadang tampil di beberapa restoran di Solo.

Sekitar akhir tahun 1996, Sigit sempat diajak oleh orang tua salah satu kawannya untuk ikut ke pengajian di masjid ar-Riyadh, tempat perkumpulan majlis para *habaib*. Tahun-tahun selanjutnya Sigit sering mendatangi pengajian

⁶⁶ Wawancara Iyok Santoso dan Endang Winarto, Keluarga Sigit Qardhawi. Solo, 13 Maret 2015.

⁶⁷ Wawancara dengan Fara, kerabat Sigit, 12 Maret 2015.

di beberapa masjid, masjid Istiqamah Penumping adalah salah satu masjid tujuan Sigit mempelajari Islam secara intens. Melalui beberapa masjid inilah Sigit mulai mengenal perjuangan akan syariat Islam, apalagi suasana sosial-politik menjelang tahun 1998 sedang dalam kondisi yang tidak stabil.⁶⁸

2. Respon Terhadap Situasi Nasional

Para teoritis gerakan sosial baru telah sependapat bahwa terdapat tiga struktur kunci penting ketika membahas sebuah gerakan sosial. Ketiga struktur kunci tersebut adalah Struktur kesempatan politik (*political opportunity structure*), struktur pembingkai (*framing process*), dan struktur mobilisasi (*mobilizing structure*). Struktur kesempatan politik dapat menjelaskan bahwa munculnya sebuah gerakan sosial seringkali dipicu oleh perubahan perubahan signifikan terhadap nuansa politik. Struktur ini merupakan pelengkap dari konsep pertentangan politik (*contentious politics*) yang menganggap pertentangan adalah aksi yang secara psikologis sangat tertekan, bersifat brutal dan irasional yang dipancing oleh provokator demi melawan sebuah rezim.⁶⁹ Sub sub-bab ini akan dimulai dengan pembahasan mendalam mengenai gerakan Islamis yang dikupas melalui teori gerakan sosial dengan lebih dahulu menjelaskan hubungan antara Tim Hisbah dan kondisi perubahan nuansa politik yang terjadi semenjak runtuhnya rezim Orde Baru. kekacauan yang terjadi pada tahun terakhir pemerintahan Soeharto menjadi awal dari harapan dan mimpi terlepasnya belunggu-belunggu otoriter. Ketika reformasi terwujud,

⁶⁸ Semua informasi mengenai kepribadian Sigit didapatkan dari wawancara bersama keluarga Sigit.

⁶⁹ Quintan Wiktorowicz (ed), *Islamic Activism, A Social Movement Theory Approach*, (Indiana University Press), hlm.9-10.

harapan dan mimpi tersebut menjadi kenyataan sekaligus menjadi kesempatan bagi siapa saja yang ingin ikut andil dalam kontestasi kekuasaan di Indonesia.

Mendekati tahun 1998, isu-isu demokratisasi semakin menguat, perpecahan politik mulai tumbuh, tuntutan kebebasan pers, masalah kesejahteraan hingga kemiskinan menjadi isu penting dalam proses demokratisasi.⁷⁰ Keadaan ini diperjelas dengan terjadinya krisis moneter (krismon) di Indonesia. Secara kronologis, krisis di Asia Tenggara pertama terjadi di Thailand, sejak krisis keuangan melanda Thailand, banyak investor yang menarik dananya keluar dari wilayah Asia Tenggara (termasuk Indonesia) karena mereka menganggap karakteristik perekonomian negara-negara Asia Tenggara relatif sama, akibatnya negara-negara mengalami inflasi akibat pelarian modal ke luar negeri. Beberapa analis ekonomi mengatakan bahwa krisis ekonomi di Indonesia terindikasi pada bulan Juli 1997, ketika Rupiah terdepresiasi sebesar 7%, dan semakin melemah pada bulan-bulan berikutnya.⁷¹ Krisis ekonomi global yang melanda hampir di seluruh wilayah Asia Tenggara membawa dampak besar dalam situasi ekonomi, sosial dan politik nasional. Dampak yang paling terlihat adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pengangguran di mana-mana. Krisis pada tahun 1997 menjadikan pengangguran meningkat sekitar 13.7 juta Jiwa.⁷²

⁷⁰ Samuel P. Huntington, *The Third Wave..*, hlm. 27.

⁷¹ Sri Adiningsih (et.al), *Satu Dekade Pasca-Krisis Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2008), hlm. 8.

⁷² Indrasari Tjandraningsih "Industrial Relations in the Democratizing Era", dalam Aris Ananta (ed), *The Indonesian Economy, Entering a New Era*, (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2011), hlm. 249.

Krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara dan Asia Timur mendorong terjadinya deportase buruh migran Indonesia dari negara yang terkena dampak krisis, seperti Malaysia dan Korea Selatan. Pada saat itu, kebijakan Pemerintah Malaysia menerapkan sistem deportase massal untuk kurang lebih satu juta pekerja yang mayoritas dari Indonesia. Pada tahun yang sama pula, lebih dari 35 ribu tenaga kerja dari Saudi Arabia dipulangkan ke Indonesia sehingga menambah buruk kondisi kesejahteraan sosial-ekonomi di desa asal para imigran. Presiden Soeharto menginstruksikan kepada Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) untuk menampung ribuan penganggur tersebut guna dipekerjakan dalam berbagai program padat karya.⁷³ Situasi semacam ini menjadi kesempatan politik bagi partai oposisi maupun pemangku kepentingan lainnya untuk menyuarkan protes. Suara-suara protes sebenarnya sudah mencuat sebelumnya, tepatnya pada masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 1997. Di Solo, seorang ketua Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mudrick Setiawan Sangidoe menyuarkan slogan “Mega-Bintang”, yaitu koalisi massa Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan PPP. Kata “Mega” mengacu pada Megawati, dan “Bintang” mengacu pada lambang PPP sebelum berubah kembali menjadi Ka’bah. Masyarakat Abangan dan kaum santri Solo dimobilisasi oleh koalisi ilegal tersebut, bahkan mobilisasi massa masih terjadi pasca pemilu untuk melakukan aksi demonstrasi dan aksi radikalisme lainnya

⁷³ Riwanto Tirtosudarmo, *Mencari Indonesia, Demografi-Politik Pasca-Soeharto*, (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2007), hlm. 269.

demi menumbangkan rezim Orde Baru.⁷⁴ Salah satu dampak politik dari semua krisis ini adalah lengsernya Soeharto dari tampuk kekuasaan.

Krisis ekonomi, sosial dan politik hanyalah salah satu faktor mengenai jatuhnya Soeharto dari tampuk kekuasaan. Begitu pula beberapa faktor lainnya seperti korupsi, kolusi, nepotisme, ketidakadilan, kemiskinan, kesejahteraan dan kontradiksi di dalam oligarki bukanlah satu-satunya faktor lengsernya Orde Baru. Dalam tesisnya, Max Lane mengungkapkan bagaimana beberapa gejala runtuhnya bangunan kekuasaan Orde Baru hanyalah bingkai yang digunakan para aktor untuk menggulingkan kekuasaan. Faktor yang sangat penting dalam proses lengsernya Soeharto – dan yang menentukan karakter kejatuhannya – adalah munculnya kepeloporan politik yang mempopulerkan konsep aksi massa dan berhasil menumbuhkan kebangkitan gerakan sosial dan gerakan protes yang luas dalam kesempatan politik yang tepat.⁷⁵ Dengan cepat, gerakan sosial sebagai sebuah “metode” yang dianggap paling efisien memprotes sebuah rezim politik, menyebar ke berbagai ideologi termasuk Islam.

Demi merespon kondisi nasional yang sedang melanda Indonesia, para pemangku kepentingan kelompok atau golongan ingin ikut serta mengambil peran seolah semuanya menyuarakan solusi untuk keterpurukan tersebut, tidak terkecuali kelompok Islam. Sebagai contoh, di Solo terbentuk sebuah Komite Aksi Penanggulangan Akibat Krisis (Kompak). Saat kondisi nasional yang goyah inilah Sigit mempertegas dirinya untuk meninggalkan dunia band yang

⁷⁴ Max Lane, *Unfinished Nation, Ingatan Revolusi, Aksi Massa dan Sejarah Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Djaman Baroe, 2014), hlm. 252.

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 141.

juga secara ekonomi, industri musik terkena dampak krisis. Sigit lebih memilih untuk mencari sebuah identitas dan melemparkan kekecewaan pada sistem pemerintahan yang dalam keadaan *chaos*.

Sesaat setelah mundurnya Soeharto sebagai Presiden Indonesia, kalangan elite politik pada era Reformasi membawa pekerjaan rumah yang berat. Para tokoh reformasi tersebut harus cepat merumuskan empat agenda besar Reformasi yang mungkin hingga saat ini agenda tersebut mengalami berbagai hambatan. Agenda reformasi tersebut berupa:

1. Amandemen UUD yang sudah sangat *out of date*, karena UUD 1945 bersifat sementara (enam bulan, setelah dibuat) tetapi sampai sekarang masih difungsikan dan tidak sejalan dengan semangat demokrasi.
2. Reposisi TNI/Polri. Dwifungsi TNI/Polri dicabut, TNI/Polri direkonstruksi karena dianggap sudah menyalahi aturan akibat partisipasi mereka dalam dunia politik.
3. Menegakkan supremasi hukum yang sudah mulai rapuh akibat kesalahan-kesalahan Orde Baru yang menggunakannya sebagai alat kekuasaan.
4. Membangun *good governance* yang mampu memberantas KKN yang telah menjamur pada era Orde Baru.⁷⁶

Pemilu pertama pada era Reformasi membawa babak baru dalam liberalisasi politik di Indonesia. Saat itu terdapat 48 partai dari segala spektrum politik (kecuali komunisme) yang bersaing memperebutkan

⁷⁶ Baca selengkapnya mengenai tuntutan reformasi dan tantangannya ini pada tulisan Amin Rais, "Menyelamatkan Agenda Reformasi", dalam Lukman Hakim (ed), *Reformasi Dalam Stagnasi*, (Jakarta: Yayasan al-Quran-Mukmin, 2001).

kekuasaan di era Reformasi yang masih terbuka lebar. Fusi beberapa ideologi partai Islam menjadi PPP kembali tercerai berai. Saat itu, paling tidak terdapat delapan partai yang berasaskan Islam. Salah satu partai yang berasaskan syariat Islam pada waktu itu adalah Partai Bulan Bintang (PBB). Partai PBB inilah sebagai rumah pertama Sigit dalam memulai belajar keras untuk memperjuangkan syariat Islam.

Partai Bulan Bintang adalah reinkarnasi dari partai Masyumi yang telah dibubarkan oleh pemerintah Sukarno pada tahun 1960. Para anggota dan pendukung Masyumi kemudian menamakan diri mereka Keluarga Bulan Bintang, Komunitas yang mendambakan syariat Islam tegak di Indonesia. Sekian lama Keluarga Bulan Bintang ini menunggu sebuah momentum yang tepat untuk bangkit. Reformasi menjadikan Keluarga Bulan Bintang mendapatkan angin segar untuk melanjutkan perjuangan melalui partai politik. Akhirnya, pada 26 Juli tahun 1998 dideklarasikanlah Partai Bulan Bintang yang menjadikan syariat Islam sebagai asas partai. Partai ini memiliki tujuan umum mengembangkan kehidupan berdemokrasi, sedangkan tujuan khususnya adalah mewujudkan masyarakat beriman, bertakwa, adil dan makmur yang diridhai oleh Allah. Partai ini bersifat mandiri dan bebas aktif melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*. PBB memiliki basis masa melalui jaringan masjid-masjid yang dikoordinasi oleh Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII).⁷⁷ Karenanya, tidak begitu sulit untuk mengonsolidasikan

⁷⁷ Banyak referensi mengenai profil PBB ini, misalnya lihat Tim Litbang Kompas, *Partai-partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004), Musa Kazhim dan Alfian Hamzah, *Lima Partai dalam Timbangan, Analisis dan Prospek*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999).

kekuatan massa di Solo melalui FKAM yang dibentuk oleh Muhammad Kalono. Salah satu orang yang masuk dalam jaringan ini adalah Sigit Qardhawi.

3. Respon Global, Aksi Lokal

Sigit mencoba untuk mengawali karir politik dengan bergabung menjadi anggota Partai Bulan Bintang bersama beberapa kawan lainnya di Kartopuran Solo. Sejumlah kawan Sigit mengatakan bahwa dirinya sempat beberapa kali aktif melakukan pertemuan membahas kesuksesan partai pada pemilu 1999.⁷⁸ Setelah melewati pemilu, Sigit lebih memfokuskan diri untuk bergabung dengan Laskar Hizbullah, kelompok paramiliter dari PBB. Ia memilih untuk memfokuskan diri di laskar tersebut karena dinilai dapat terlibat langsung dalam kegiatan amar ma'ruf nahi munkar. Selain itu, partai politik dianggap kotor oleh Sigit karena hanya mementingkan para pemegang modal yang menjadi petinggi partai.

Sigit kemudian banyak melakukan kegiatan amar ma'ruf nahi munkar bersama kawanannya di Laskar Hizbullah. Sigit dipandang paling vokal dalam menyuarakan perlawanan terhadap perilaku maksiat seperti judi dan mabuk-mabukan, karena keaktifan itulah, tidak jarang Sigit dijadikan koordinator apabila terdapat aksi gabungan dari beberapa gerakan di Solo. Gencarnya Sigit melakukan beberapa aksi *sweeping* di Solo bukan tanpa alasan, secara pribadi Sigit menilai aparat keamanan kurang bertindak tegas dalam penindakan kriminal dan pencegahan minuman keras di Solo. Melalui pergerakan inilah

⁷⁸ Wawancara dengan Mohamad Arif, Purwosari, Solo, Februari 2015.

Sigit banyak mendapatkan simpati dari beberapa ikhwan⁷⁹ lainnya. Aksi sigit baru mendapatkan perhatian serius dari aparat keamanan pada tahun 2005, ketika itu Sigit memimpin gerakan gabungan dari beberapa gerakan Islamis di Solo lainnya yang menggelar *sweeping* di kafe Pring Kuning dan Restoran Waru Doyong, Grogol Sukoharjo. Dua tempat ini sudah diintai lama oleh Sigit dan kawanannya karena sering menjual minuman keras secara terbuka dan tanpa ada rasa takut sedikitpun. Aksi ini sempat menimbulkan keriuhan di sekitar kawasan kafe hingga aparat keamanan datang dan menangkap koordinator aksi gerakan yaitu Sigit, Khalid dan Awud. Karena aksi ini Sigit dan dua orang lainnya ditahan di kepolisian selama tiga bulan.⁸⁰

Setelah bebas dari penjara, Sigit menjadi sosok yang banyak disegani beberapa ikhwan di Solo. Tidak terlalu lama setelah bebasnya dari penjara, Sigit memutuskan untuk keluar dari PBB yang dianggapnya hanya memeralat beberapa ikhwan demi kepentingan negara demokrasi yang menurutnya jelas tidak menjadikan syariat Islam sebagai sumber hukum. Pada tahun 2006 Sigit membentuk jamaah sendiri dan sering melakukan kegiatan di masjid Arafah. Semenjak itu, dengan modal keilmuannya, sigit memberanikan diri untuk menjadi *da'i* dengan menyampaikan tausiah di beberapa masjid, terutama masjid Arafah. Sigit kerap mengajak beberapa kawannya ikut andil

⁷⁹ *Ikhwan* dalam tata bahasa Arab adalah bentuk jamak dari *akhun*, yang secara harfiah dalam bahasa Arab berarti saudara. Sebutan yang biasa digunakan oleh anggota gerakan Islamis untuk menunjuk kepada beberapa anggota lainnya yang sepaham dan seideologi. Pada bab selanjutnya, penulis akan lebih menggunakan terminologi ikhwan ini sebagai ungkapan lain dari anggota Tim Hisbah, guna kemudahan dalam mendeskripsikan keanggotaan.

⁸⁰ Wawancara dengan Maftuh, Solo, Maret 2015.

dalam perbaikan akhlak dan moral masyarakat Solo yang dianggap jauh dari moral yang diidealkan oleh Islam.

Sigit melakukan kegiatan anti kemaksiatan di beberapa malam secara acak, mengontrol wilayah Solo dan sekitarnya agar terhindar dari perbuatan yang diklaim oleh para kelompok Sigit melanggar aturan Islam. Dalam melakukan kontrol tersebut, Sigit memberlakukan beberapa aturan yang harus dipatuhi oleh para anggota. Agus Junaedi menceritakan pengalaman lebih mendalam ketika mengikuti aksi bersama Sigit

“Ustadz Sigit itu dulu vokal sekali menyuarakan aksi pemberantasan kemaksiatan mas, apalagi orang-orang yang mabuk. Sebelum melakukan aksi, beliau lebih dulu melakukan *briefing* kepada jamaah untuk selalu mengingat bahwa aksinya harus diniatkan sebagai ibadah. Ustadz Sigit dulu juga sering berpesan agar tidak menggunakan senjata tajam apapun dalam melakukan aksi amar ma’ruf nahi munkar. Selain itu, kami, para jamaah dilarang bertindak secara berlebihan seperti menyakiti terlalu berlebihan dan merusak berlebihan, apabila ada anggota yang seperti itu, beliau kenakan *iqab* atau sanksi gitu mas, macem-macem, ada yang disuruh *push up* atau langsung ditampar. Selain itu, ustadz Sigit itu benci banget dengan namanya thaghut, apalagi aparat kepolisian. Beliau itu tau bahwa tempat-tempat hiburan yang menjadi perusak generasi itu sering di *back-up* oleh polisi, bahkan kalo ada kejahatan itu bisa selamat dari hukum, itu semakin membuat beliau benci dengan ansharut thaghut. Bahkan saking bencinya beliau itu sampai ndak mau salaman sama polisi loh mas. Kalau saya sekarang masih bisa gandengan, jabatan tangan atau kerja sama dengan polisi, kalau beliau itu *blass* mas ndak mau.”

Aksi kontrol terhadap para pelaku maksiat inilah menjadi alasan mengapa kelompok ini dinamakan Tim Hisbah, sebuah konsep yang sering disinggung dalam filsafat politik Islam. Beberapa sarjana Muslim abad ke 10 M seperti al-Mawardi sering mengulas konsep ini. Hisbah masuk dalam pembahasan hukum, yang mana hukum pada zaman Mawardi hidup bukanlah

hukum positif, melainkan hukum agama. Jadi, segala ketentuan yang masuk dalam ranah hukum berasal dari sumber primer agama Islam: al-Qur'an Dan as-Sunnah. Konsekuensinya, tidak ada lembaga untuk membuat hukum yang tidak terdapat panduannya pada dua sumber tersebut, karena itu semua produk hukum mendapat legalitas agama dan selalu bersinggungan dengan halal dan haram. Argumen yang dianggap logis dari para sarjana Muslim era Abbasiyah tersebut adalah bahwa Tuhan menjadikan halal dan haram bukan untuk mengekang manusia, melainkan sebagai hukum yang menjamin kemashlahatan makhluk dan mengokohkan prinsip-prinsip kebenaran. Hal ini menjadi pendapat Mawardi membuka hukum-hukum Tuhan dan mengejawantahkannya menjadi sebuah panduan bernegara. Pejabat-pejabat yang bersinggungan dengan wilayah hukum terbagi menjadi tiga: Hakim, wali pidana (*wilayat al-mazhalim*) dan petugas hisbah. Petugas hisbah inilah sebagai eksekutor atas tindakan pelanggaran ringan yang dilakukan oleh masyarakat seperti orang yang tidak melakukan shalat Jum'at, kemaksiatan ringan hingga menunda membayar hutang.⁸¹ Di Indoensia, Institusi serupa dapat ditemui di Aceh dengan nama Wilayatul Hisbah,⁸² atau polisi syariat yang mengawasi pelanggaran hukum Islam terutama masalah berpakaian, minuman keras dan *khalwat*. Selain aksi *sweeping*, Sigit mengadakan

⁸¹ Abu Hasan 'Ali Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah wal Wilayaat ad-Diniyyah*, (Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyyah, 2011), hlm.200-220. Baca juga karya Mawardi lainnya seperti *Qawanin al-Wizarah wa siyasat al-Mulk* (Beirut: Dar ath-Thalai'ah li ath-Thiba'ah wa an-Nasyr, 1979) *Durar as-Suluk fi Siyasat al-Muluk* (Riyadh: Dar al-Wathan lin Nasyr, 1997)

⁸² Sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 1 tahun 2004. Wilayatul hisbah sekarang berada di Bawah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Aceh.

kegiatan lainnya seperti pelatihan fisik para laskar dengan berlari-lari dan renang setiap hari minggu pagi atau setiap terdapat waktu senggang lainnya.⁸³

Setelah lama bermarkas di masjid Arafah, Sigit melebarkan sayap pergerakannya dengan meletakkan pusat kegiatannya di masjid al-Anshar Ahmad Maryam, Semanggi.⁸⁴ Daerah ini merupakan daerah tanggul dan berada di bantaran sungai Bengawan Solo, wilayah ini diakui oleh warga setempat

⁸³ Wawancara dengan Amin, Sahabat dan salah satu jamaah Sigit, Semanggi Solo, Februari 2015.

⁸⁴ Versi lain dari berita ini terdapat pada laporan Setara Institut bahwa Sigit sempat diusir oleh ta'mir masjid Arafah karena ditekan oleh kepolisian setelah kejadian perkelahian melawan Gondes Solo pada tahun 2008. Dalam perkelahian ini Zulkifli atau yang sering disapa Kipli tewas karena serangan para Laskar Islam. Selengkapnya laporan Setara Institut sebagai berikut:

“Setelah keluar dari penjara Sigit menjadi sosok yang cukup disegani di Solo, pada 2006 dia membentuk kelompok sendiri yang disebut Laskar Arafah. Sebutan ini merujuk kepada markas kelompoknya yang ada di Masjid Arafah, yang terletak di sebuah jalan di kawasan antara Ngruki dan Majelis Tafsir Al Quran. Dia mengangkat dirinya sebagai komandan sekaligus Amir Laskar. Laskar ini aktivitasnya sama dengan Laskar Bismillah, yaitu melakukan berbagai aksi anti maksiat. Pada Maret 2008, Laskar Arafah bersama-sama kelompok radikal lainnya seperti LUIS, FKAM dan lain lain terlibat bentrokan melawan Gondes, kelompok preman di Solo. Pemicunya, lantaran para preman yang dipimpin Kipli melakukan aksi penyerangan ke Masjid Muslimin, Kusumodilagan, Solo. Aksi penyerangan ini buntut perselisihan beberapa hari sebelumnya ketika para aktivis masjid menegur para preman mabuk-mabukan di pertigaan Kusumodilagan. Tak terima dengan teguran itu, Gondes menyerang Masjid Muslimin. Aksi penyerangan preman Gondes ini memicu kemarahan laskar-laskar Islam di Solo, termasuk Sigit Qardhawi dan kawan-kawan. Mereka kemudian melakukan aksi balasan dengan menyerang para preman Gondes. Dalam bentrokan ini, Kipli, ketua Gondes, tewas terbunuh. Namun akibat bentrokan ini juga menyebabkan Sigit dan kawan-kawannya tak bisa beraktivitas di Masjid Arafah. Pengurus masjid ini mendapat tekanan dari aparat keamanan untuk mengusir Sigit dan kawan-kawan. Sigit kemudian memindahkan markasnya ke Masjid Al Anshor, Semanggi Solo. Dia kemudian mengganti nama kelompoknya menjadi Laskar Hisbah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar atau biasa disingkat dengan sebutan Laskar Hisbah.”

Tidak hanya itu, Setara Institut lebih detail menjelaskan perekrutan anggota Tim Hisbah. “Sigit menata ulang kelompoknya ini. Sigit menerapkan metode baru dalam perekrutan anggota. Untuk menjadi anggota inti Tim Hisbah, mereka harus mengikuti kegiatan minimal 10 minggu berturut turut. Kegiatan meliputi latihan fisik bela diri pada Rabu sore, pengajian malam minggu di Masjid Al Anshor yang diisi oleh Sigit Qardhawi yang dilanjutkan dengan sweeping. Pada hari minggu minggu ke-11, mereka diajak lari ke sebuah kawasan Umbul di Boyolali, pulang pergi, dan setibanya di markas, disematkan kaos Tim Hisbah, sebagai simbol pembaretan ala Kopasus. Mereka menempuh jarak lari hingga puluhan kilometer, tanpa alas kaki. Berlari dari Lapangan Sriwedari, jam 7 pagi. Mereka menyusuri sejumlah jalan di Kota Surakarta, melewati Adi Sumarno, hingga sebuah dusun di Boyolali. Sesampainya di Umbul, mereka terjun, mandi untuk kemudian berlari lagi kembali ke Sriwedari. Kemudian para anggota itu dibagi-bagi dalam kelompok-kelompok yang disebut sebagai kabilah-kabilah dimana setiap kabilah beranggotakan 10 orang. Keanggotaan kabilah ini merujuk pada tempat para anggota tinggal. Misalkan Ari Budi Santoso alias Abas, karena tinggal di wilayah Joyo Suran maka dia dimasukkan kedalam kabilah Joyo Suran. Sementara Nang Ndut yang tinggal dekat Ngruki masuk ke kabilah Cemani.”

sebagai daerah penduduk dengan tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata dan merupakan kawasan yang rawan tindakan kriminal. Sigit dianggap berhasil menjadikan masjid al-Anshar sebagai markas karena sebelumnya, masjid ini tidak pernah diperdulikan oleh warga.⁸⁵

Setelah berhasil menancapkan pengaruh ke beberapa anggota gerakan Islamis lainnya, Sigit menjadi orang yang tidak asing dalam dunia gerakan Islamis di Solo. Beberapa anggota kelompok di luar kelompok Hisbah sangat mengenal Sigit sebagai sosok yang dianggap memiliki keteguhan dalam menyuarakan amar ma'ruf nahi munkar. Jejaring kelompok Tim Hisbah bukan hanya menjalar di wilayah Solo, namun merambat ke wilayah lain seperti Klaten, Boyolali bahkan hingga ke Cirebon dan Medan. Di Medan, para anggota Tim Hisbah membangun jejaring dengan kelompok-kelompok yang sepaham. Belum terlalu jelas nama kelompok di Medan yang dimotori oleh Muhammad Abdi atau sering disebut Sabar. Hanya saja diketahui bahwa Yuki Wantoro yang ditembak mati dalam sebuah operasi polisi pada tahun 2010 dengan tuduhan perampokan Bank CIMB Niaga Medan yang mereka anggap sebagai amal *fa'i*, adalah salah satu dari anggota Tim Hisbah. Cirebon juga termasuk wilayah di mana Tim Hisbah melebarkan sayap selama Sigit hidup dan aktif dalam gerakan Islamis. Jejaring Cirebon dibangun oleh Musolah, seorang aktifis kelompok Islam radikal di Cirebon dan sering terlibat aktif dalam aksi amar ma'ruf nahi munkar di Cirebon bersama dengan kelompok Gerakan Anti Maksiat (GAMAS). Diketahui, Musolah juga sempat

⁸⁵ Wawancara dengan Pak Sri, Februari 2015.

berkunjung ke Solo dan ikut dalam pengajian Sigit.⁸⁶ Kelompok Islamis yang berasal dari Cirebon memang diakui oleh para ikhwan pernah menimba ilmu mengenai aksi amar ma'ruf nahi munkar kepada Sigit selama beberapa minggu.⁸⁷ Setelah bom yang diledakkan di masjid Mapolres Cirebon, para anggota Islam radikal Cirebon diburu oleh aparat kepolisian. Perburuan ini berimbas pada Sigit, yang dianggap membantu pelarian dan ikut terlibat dalam serangkaian bom yang terjadi di wilayah Solo hingga Cirebon sejak tahun 2010. Akhirnya, perjalanan Sigit sebagai panglima laskar Hisbah harus berakhir pada Mei 2011 setelah beberapa peluru menghujani tubuhnya dalam sebuah operasi kontra terorisme yang dilakukan oleh Densus 88 Anti Teror.

Jejaring yang telah terbentuk selama Sigit aktif di dunia gerakan laskar membuatnya tidak sulit untuk mengumpulkan massa. Massa yang berasal dari jamaah pengajian di beberapa masjid merupakan sumber daya informal yang dapat digerakkan dalam melakukan sebuah aksi. Sidney Tarrow menjelaskan dengan cukup rasional mengenai kemampuan dan kemauan sumber daya informal ini bergerak ketika melakukan sebuah aksi, Tarrow mengatakan bahwa sebuah gerakan militan memiliki beberapa hal dasar yang harus dipupuk (*basic properties of movements*). Diantaranya adalah tantangan kolektif (*collective challenge*) yang membuat mereka harus melakukan sebuah penyelaan pendapat (*interrupting*), menghalangi kegiatan (*obstructing*) dan perlawanan (*opposing*) secara bersama-sama, ditujukan untuk aktifitas kelompok lain yang tidak memiliki ideologi seperti mereka, atau sikap yang

⁸⁶ Laporan International Crisis Group (ICG), "From Vigilantism to Terrorism in Cirebon." (Jakarta/Brussels, 16 July 2012), hlm. 5

⁸⁷ Wawancara Agus Junaedi, Solo Februari 2015.

dianggap bertentangan dengan Islam. Hal dasar lainnya adalah tujuan bersama (*common purpose*), yang digunakan untuk meraih kepentingan kelompok. Tujuan bersama menjadi alasan bagi para jejaring massa mengambil resiko untuk bertindak secara kolektif dengan mengatas namakan solidaritas kelompok, yaitu rasa perjuangan dan nasib yang sama di dalam sebuah komunitas. Selain itu, sebuah pergerakan yang militan memiliki pertahanan aksi kolektif. Mereka harus mampu mempertahankan kelompok dari berbagai tantangan dengan memanfaatkan kesempatan apa saja yang hadir di sekitar mereka.⁸⁸

Penggunaan jejaring sosial dan sumber-sumber daya informal untuk mobilisasi sangat lazim ditemukan dalam masyarakat-masyarakat atau enklave yang kurang terbuka. Karena hanya dengan seperti itu sebuah gerakan dapat mempertahankan aktivismenya, dengan sumber daya yang berakar pada hubungan-hubungan sosial sehari-hari sehingga tidak terlacak oleh lawan politik termasuk rezim yang represif.⁸⁹

Fenomena aksi-aksi Sigit dapat disentuh dengan teori identitas kaum muda, yang sering diidentikkan dengan kondisi di mana seseorang terjebak pada persimpangan jalan yang rumit atas ketertekanan struktur sosial dan relasi kuasa. Kondisi ini menjadikan kaum muda mencoba melawan relasi kuasa yang mengekang dengan melakukan tindakan-tindakan pemberontakan (*rebellion*). Ekpresi identitas dan realisasi mimpi kaum muda sangat dipengaruhi oleh situasi global dan proses lokal yang mengelilingi identitas

⁸⁸ Sidney Tarrow, *Power in Movement*, hlm. 3-5.

⁸⁹ Quintan Wiktorowicz (ed), *Islamic Activism*, hlm. 12-13

pemuda tersebut.⁹⁰ Dapat dilihat kaum muda dengan kemampuan finansial di kota-kota besar, mereka mampu mengekspresikan diri dengan pergi ke tempat-tempat karaoke, menikmati musik hip-hop, rap atau jazz sebagai perlawanan atas kepenatan aktifitasnya yang mengekang di kota besar. Kaum muda terpelajar membuat gerakan protes terhadap kebijakan-kebijakan penguasa yang dinilai menghambat kepentingan mereka atas nama demokrasi dan rakyat kecil. Bagi pemuda Muslim, mereka harus memposisikan dua identitas, antara menyatakan diri sebagai kaum muda yang bebas, modern dan produktif di satu sisi, dan menjadi seorang Muslim yang taat terhadap aturan-aturan agama di sisi yang lain. Akibat dari mempertahankan dua posisi ini, ekspresi identitas kaum Muslim muda berbeda-beda di berbagai belahan dunia. Sebagian mereka mengekspresikan diri dengan membentuk kelompok-kelompok yang mencerminkan dua nuansa sekaligus: nuansa muda dan nuansa “Islam”, contohnya adalah grup musik Rap Muslim Fun-Da-Mental yang membawa tema jihad di Inggris.⁹¹ Sebagian kaum muda lainnya membentuk gerakan-gerakan protes yang membawa isu-isu keadilan demi merespon situasi politik di beberapa negara Muslim Timur Tengah.

Dengan mendeklarasikan gerakan Islamis, Sigit menunjukkan identitasnya sebagai seorang pemuda Muslim yang modern, dan peka terhadap isu-isu sosial-politik. Sigit menganggap kondisi sosial politik harus mengalami perubahan yang signifikan. Karena tidak dapat melakukan aktifitas langsung

⁹⁰ Linda Herrera dan Asef Bayat (ed), *Being Young and Muslim, New Cultural Politics in the Global South and North*, (New York: Oxford University Press, 2010), hlm. 32.

⁹¹ Ted Swedenburg, “Fun^Da^Mental’s Jihad Rap”, dalam Linda Herrera dan Asef Bayat, *Being Young and Muslim, New Cultural Politics in the Global South and North*, hlm. 291

yang berhubungan dengan urusan-urusan sosial politik, Sigit membangun wacana dan gerakan alternatif untuk merespon situasi politik yang dirasakannya sangat merugikan kaum Muslim muda di Indonesia.

4. Ideologi Tim Hisbah

Ideologi merupakan unsur penting dalam sebuah gerakan. Ideologi dapat menjelma menjadi sebuah semangat, keberanian dan kekuatan untuk melawan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang ingin diwujudkan oleh suatu kelompok. Konsep ideologi mulai ramai diperbincangkan ketika periode getir masyarakat Eropa pada abad ke 18, di mana sering dihubungkan dengan perubahan sosial menuju abad modern, yaitu peralihan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan urbanisasi besar-besaran.⁹² Secara teoritik, ideologi memang merupakan sebuah gagasan, keyakinan ataupun nilai yang merupakan basis representasi identitas suatu kelompok. Ideologi inilah yang menjadi panduan atau yang mengatur dan mendasari sebuah perbuatan itu dianggap baik atau buruk, benar atau salah, dan keharusan atau larangan bagi suatu individu maupun kelompok. Tentu hal ini untuk mewujudkan cita-cita bersama.⁹³ Melalui definisi teoritik tersebut, terdapat dua unsur terpenting dalam sebuah ideologi. Pertama, gagasan tersebut dapat menjadi panduan penyelesaian masalah. Kedua, meliputi cara penerapan, penjagaan dan penyebaran sebuah gagasan tersebut agar tercipta sebuah kepentingan bersama.

⁹² William D. Sunderlin, *Ideology, Social Theory and The Environment*, (USA: Rowman and Littlefield Publishers, 2003) hlm.15.

⁹³ Teun A. Van Dijk, *Ideology, Multidisciplinary approach*, (London: Sage Publication.Ltd, 2000), hlm. 8.

Dalam kaitannya dengan gerakan sosial dan Islam politik, ideologi tidak kalah pentingnya daripada proses pembingkaiian (*framing*), karena ideologi dapat menyampaikan makna yang lebih rumit dan lebih dalam. Artinya, ideologi dapat menangkap keyakinan dan gagasan aktor dengan cara selain proses pembingkaiian. Sementara, sebagai wacana, aksi dan gerakan, gerakan Islam radikal seperti Tim Hisbah sering digambarkan sebagai gejala ideologi-keagamaan. Lahir dari sebuah gagasan dan pandangan tertentu tentang tatanan dunia yang didasari doktrin-doktrin dan keyakinan keagamaan.⁹⁴ Coclanis dan Bruchey mengingatkan, bahwa para peneliti harus mengetahui bagaimana ideologi tersebut diterjemahkan oleh suatu gerakan sosial ke dalam program aksi, yang mana akan menggiring peneliti kepada pertanyaan hal-hal seputar proses pembingkaiian, strategi dan taktik.⁹⁵

Sebagaimana pandangan kaum Islamis pada umumnya, Tim Hisbah tidak memiliki perbedaan ideologi mendasar. Landasan paling doktrinal adalah sebuah kepercayaan sakral dan tanpa kompromi, tauhid. Tauhid adalah hal terpenting yang harus diperkuat dan diteguhkan oleh seorang Muslim dalam kondisi apapun. Kalangan Islamis mengambil contoh dari *tarikh* Rasulullah yang lebih dahulu merombak tauhid para sahabat sebelum mengajarkan syariat. Kekokohan tauhid inilah yang dianggap membuat para sahabat Nabi Muhammad rela berhijrah dan berjihad untuk kepentingan politik kaum Muslimin di Madinah. Seperti para pendahulunya, Tim Hisbah juga memegang

⁹⁴ Noorhaidi Hasan, *Islam Politik di Dunia Kontemporer*, hlm. 66.

⁹⁵ Peter A. Coclanis and Stuart Bruchey (ed), *Ideas, Ideologies and Social Movements, The United States Experience Since 1800*, (Columbia: University of South Carolina Press, 1999), introduction xi.

teguh tauhid *Rububiyah*, *Mulkiyah* dan *Uluhiyyah*, satu doktrin tauhid yang inti ajarannya adalah *hakimiyyatullah*, kekuasaan politik tertinggi berada pada kekuasaan Allah. Harapan praksis dalam mengusung ideologi ini adalah tegaknya syariat Islam sebagai sebuah dasar negara. Untuk rujukan buku-buku pegangan, Tim Hisbah tidak berpegang pada salah satu kitab apapun. Para ikhwan mendapatkan pengetahuan doktrinernya melalui beberapa masjid yang sering mengadakan kajian-kajian Tauhid seperti masjid al-Anshar, masjid Marwa dan masjid Muhajirin Purwosari. Selepas maghrib pada hari-hari tertentu, para ikhwan sangat antusias untuk membahas kitab-kitab yang mengulas tentang tauhid dan jihad menegakkan syariat Islam seperti beberapa pemikiran Sayyid Qutb (1906 – 1966), dan kitab-kitab ulama kontemporer lain seperti *Al-ushul As-Syari'ah Fi Ahkam as-Siyâsah* dan *As-Sunan An-Nabawiyyah Fi al-Ahkâm As-Siyâsah* karangan Syaikh Hakim al-Muthairi, seorang ulama Kuwait dengan pemahaman salafi jihadis yang mengajar di Fakultas Syariah Universitas Kuwait.

Beberapa ideologi yang dipahami dari Tim Hisbah sangat dekat dengan beberapa pemikir Islam seperti Abul A'la Al-Maududi (1903 – 1979), seorang penggagas Negara Islam di tanah India dan ketua partai politik Jama'at Islami. Dalam bukunya Maududi menjelaskan Tiga macam kejahiliahan: *al-jâhiliyah al-mahdhah*, yaitu paham materialisme dan atheisme. Kedua *jâhiliyyah syirk*, yaitu semacam paham yang terlalu meninggikan para Nabi dan orang suci lainnya sehingga hampir menyembahnya. Ketiga *al-jâhiliyyah ar-ruhbâniyyah*, yaitu yang menganggap bahwa dunia adalah penjara dan manusia tidak suci

jiwanya selama di penjara, apabila ingin menjadikan jiwanya suci maka ia harus menjadi rahib atau pendeta.

Bagi Maududi, atas kejahiliahan manusia inilah Muhammad diutus oleh Tuhan dengan tiga misi utama. Pertama melakukan revolusi sistem dan pranata keagamaan, sosial dan politik guna memuliakan manusia, dan tidak sekedar berorientasi pada dunia belaka. Kedua, menggelorakan semangat jihad untuk memperkuat aqidah yang meliputi tauhid, risalah dan khilafah. Ketiga, menegakkan sistem pemerintahan Islam dengan syariat Islam sebagai hukum tertinggi suatu negara.⁹⁶ Para anggota Tim Hisbah meyakini bahwa jihad adalah bentuk aktualisasi keimanan dan ketauhidan dari seorang Muslim. Sebagaimana yang juga pernah disinggung oleh Maududi dan beberapa ulama kaum Islamis lainnya. Terdapat tiga perjalanan manusia untuk mengaktualisasikan keimanan dan ketauhidannya. Ketiga perjalanan tersebut adalah iman, hijrah dan jihad. Beberapa pemahaman semacam ini sering disebut di berbagai karya Maududi dan Sayyid Qutb, tokoh yang menurut Quintan adalah akar ideolog kaum Islamis kontemporer yang sering menggunakan jihad sebagai pertarungan merebut negara dan menjadikannya negara Islam.⁹⁷

Pertama, iman berarti percaya secara mendalam, dan seorang Muslim yang beriman harus dengan sepenuh keyakinan tanpa mempertanyakan kembali secara kritis. Kedua berhijrah, dalam artian ia harus menjadi umat

⁹⁶ Abu A'la al-Maududi, *Tarikh Tajdid ad-Din wa Ihyâihi*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1975), hlm. 34-35

⁹⁷ Lihat Quintan Wiktorowicz, *A Geneology of Radical Islam*, (London: Routledge, 2005).

yang memisahkan diri dari bagian *jâhiliyah*, dalam konteks ke-Indonesiaan adalah golongan yang harus mengingkari hukum positif di Indonesia, yang tidak bernafaskan syariat Islam. Ketiga adalah berjihad. Apabila lembaran kitab klasik dibuka kembali, maka akan terhampar banyak makna mengenai jihad. Beberapa ulama klasik seperti Ibnu Hajar, as-Shan'ani dan as-Syaukani memang masih memiliki pendapat yang sama mengenai jihad, bahwa jihad secara umum dan dalam makna syariatnya adalah "*badzlu al-juhdi fi qitâli al-kuffâr*", perdebatan yang terjadi hanyalah pada hukum berperang melawan kaum kafir: apakah fardhu 'ain atau fardhu kifayah. Selain itu, terdapat juga beberapa makna jihad termasuk *mujahadatu an-nafs* yaitu jihad memperdalam berbagai keilmuan dan *mujâhâdatu as-syaithân*, yaitu mawas diri dari perbuatan *syubhat* dan syahwat yang merupakan perbuatan setan.⁹⁸ As-Shan'ani memiliki tambahan interpretasi yang sedikit lebih berwarna di dalam *kital al-jihad* mengenai pemberontak (*bughat*), dalam pengertian ini berperang melawan kaum pemberontak juga dapat dikatakan sebagai bentuk jihad.⁹⁹ Bahkan, Ibnu al-Qoyyim al-Jauziyah, ideolog yang tidak jarang menjadi rujukan kaum Islamis menjelaskan jihad ini dengan varian yang lebih dapat dipahami secara kontekstual, ia mengemukakan *jihâdu an-nafs*, *jihâdu as-*

⁹⁸ Pendapat mereka bisa dibaca pada bab mengenai Jihad, seperti Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Bulughu al-Marâm* (Beirut: Dar al-Fiqr li ath-Thiba'ah wa an-Nasyr, 1996), dan *Fathu al-Bari, Syarhu Shahihi al-Bukhari*, juz 2, edisi ke 2, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2009, hlm. 143-145.

Pendapat Ibnu hajar ini juga dinuqil oleh Muhammad Ibnu 'Ali ibnu Muhammad As-Syaukani dalam kitabnya *Nailu al-Awthâr, Syarh Muntaqa al-Akhhâr Min Ahâdits Sayyidi al-Akhyâr*, juz 7, (Beirut: Darul Ihyait Turatsil 'Arabi, 1999), hlm. 215.

⁹⁹ Muhammad bin Isma'il as-Shan'ani, *Subulussalam, Syarhu Bulughi al-Marâm* (Format Maktabah Syamilah).

*syaitan, al-jihadu 'ala al-kuffar wa al-munafiqin dan jihadu 'ala arbabi az-zulmi wa al-bida'.*¹⁰⁰

Meskipun perbedaan pendapat dan pelbagai makna jihad diperdebatkan oleh beberapa sarjana klasik, di tangan ulama seperti Qutb dan Maududi, jihad lebih bermakna sebagai satu cara atau mekanisme yang diharuskan dikala jalan dakwah mengalami kebuntuan, untuk menerapkan syariat Islam sebagai sebuah hukum tunggal dalam bernegara.¹⁰¹ Dalam pandangan kelompok Islamis, tampaknya jihad adalah sebuah keniscayaan yang harus dihadapi oleh setiap Muslim ketika umat dalam keadaan terancam. Keadaan terancam tersebut meliputi berbagai aspek, baik terancam secara ekonomi, hegemoni sosial budaya dan politik. Begitu pula Tim Hisbah, sebagai kelompok Islamis lokal, mereka menganggap bahwa jihad harus dimulai dari hal terkecil. Ketika Negara Indonesia (yang mayoritas Muslim) dalam kondisi damai seperti saat ini, kewajiban bagi seorang Muslim yang telah berhijrah kepada sebenarnya tauhid adalah melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, tidak dalam bentuk perang. Mereka menganggap kerusakan moral seperti bermain di tempat hiburan ataupun cafe yang menjual minuman keras adalah hasil dari hegemoni kaum non Muslim untuk menjauhkan umat Islam dari agamanya. Karenanya, mereka lebih memilih menghancurkan sebuah perbuatan yang mereka anggap sebagai sebuah kesalahan di depan mata sebelum menghancurkan musuh sebenarnya, yang tertuju kepada negara-negara Barat (prinsip *close enemy* dan *far enemy*). Namun, apabila aksi amar ma'ruf nahi

¹⁰⁰ Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, *Zâdu al-Ma'âd fi Hadyi Khairi al-'Ibâd*, Juz 3 (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2005), hlm. 7-15.

¹⁰¹ Noorhaidi Hasan, *Islam Politik di Dunia Kontemporer*, hlm. 94.

munkar tersebut menemui perlawanan yang serius, maka jihad dapat saja dikobarkan dengan melihat kondisi.

Anggota Tim Hisbah menjadikan konsep tauhid yang utuh ini sebagai landasan untuk bertindak secara radikal, mereka meyakini bahwa hanya dengan konsep tauhid yang utuh inilah manusia dapat terbebas dari cengkraman-cengkraman jahiliah yang saat ini dianggap menjangkiti masyarakat Indonesia. Ajaran tauhid yang utuh ini ditandai dengan hukum yang dianut oleh suatu negara adalah hukum Tuhan. Ketika suatu negara menganut hukum Tuhan, maka segala sesuatu dianggap telah berjalan di atas jalur yang benar: ibadahnya, sistem ekonominya, sistem politik dan pemerintahannya, hingga sistem sosial dan budayanya. Tetapi, apabila suatu negara tidak memegang syariat Islam sebagai sumber hukum, maka yang terjadi adalah *chaos*. Mereka meyakini semua kekacauan politik, permasalahan ekonomi dan kesenjangan sosial adalah akibat dari kurangnya penerapan tauhid masyarakat Indonesia secara utuh. Masyarakat Indonesia belum bersandar pada tauhid yang utuh karena masih berpegang pada hukum-hukum sekuler yang bukan berdasarkan syariat Islam.

Mereka sangat meyakini bahwa hukum sekuler tidak dapat menyelesaikan segala permasalahan moralitas dan kriminalitas dalam satu waktu. Hukum sekuler menurut mereka dapat meminimalisir permasalahan kriminalitas seperti pembunuhan dan perampokan. Namun, permasalahan moralitas di balik aksi pembunuhan dan perampokan tersebut belum dapat diatasi oleh hukum negara sekuler. Satu-satunya hukum yang dapat menangani

permasalahan moralitas adalah hukum Tuhan. Semua keyakinan-keyakinan yang dipegang teguh oleh Tim Hisbah menjadikan anggota Tim Hisbah berkeinginan untuk merubah segala kerusakan tersebut. Hijrah yang dianggap sebagai ideologi perubahan menjadi langkah awal mereka untuk beraksi. Dengan hijrah, mereka memiliki alasan untuk membuat jarak antara ikhwan dan masyarakat luas yang diyakini masih penuh dengan kekufuran. Setelah berkomitmen untuk berhijrah, para ikhwan tersebut dengan mudah melakukan aksi-aksi konfrontatif terhadap negara, dan tidak mengindahkan prosedur penegakan hukum yang berlaku di Indonesia. Melalui semangat yang begitu tinggi untuk merubah keadaan di Indonesia, akhirnya mereka bersedia melakukan tindakan-tindakan radikal meskipun diawali dengan aksi-aksi lokal. Dengan melakukan aksi-aksi radikal tersebut, mereka meyakini bahwa impian akan penerapan syariat Islam di Indonesia secara perlahan akan terwujud.



BAB III

IDENTITAS, KAUM MUDA DAN PAYUNG GERAKAN SOSIAL

A. Identitas dan Perubahan Sosial

Kematian Sigit tidak berarti kematian gerakan bagi anggota Tim Hisbah. Saat ini, anggota dari Tim Hisbah masih banyak menyebar di berbagai permukiman penduduk dan melakukan kegiatan di beberapa masjid yang ada di sudut-sudut kota Solo. Para anggota masih menunjukkan eksistensinya dengan melakukan gerakan radikal yang mereka anggap sebagai gerakan anti kemaksiatan, sekalipun beberapa anggota Tim Hisbah masih berada di dalam sel tahanan. Beberapa dari mereka adalah pemuda baru dalam kelompok Tim Hisbah. Hal ini menandakan bahwa para pemuda sejak dua atau tiga tahun belakangan masih ada yang termotivasi untuk bergabung dengan Tim Hisbah, bahkan setelah pemberitaan di berbagai media bahwa Sigit Qardhawi adalah seorang teroris, dan dianggap sebagai musuh negara.

Keterlibatan kaum muda dalam Tim Hisbah biasanya diawali dengan keikutsertaan mereka dalam kelompok pengajian di beberapa masjid (seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya). Para kaum muda juga bergabung melalui ajakan dari beberapa kawan atau keluarga. Selain itu, memang diakui oleh para ikhwan sendiri bahwa keanggotaan kelompok ini bersifat eksklusif, mereka mengklaim hanya orang yang terpanggil dan dengan komitmen tinggi pada pemberantasan kemaksiatan yang dapat masuk sebagai saudara dalam kelompok ini. Diakui pula bahwa para ikhwan ini mayoritas dari kalangan “mantan preman”, mereka yang pada awalnya adalah kalangan yang tersisihkan, sekarang berbuat

demikian kepentingan kelompok yang mereka anggap sangat memperjuangkan agama.¹⁰² Berhubungan dengan hal tersebut, sedikit mengingat fungsi agama dalam rumusan Bryan Turner, bahwa agama merupakan respon manusia terhadap persoalan-persoalan fundamental, dan juga mengutip penulis lain seperti Pareto dan Freud bahwa agama adalah suatu produk mental dari kepentingan ekonomi ataupun ketertindasan kelas.¹⁰³

Tampaknya wajar jika para kaum muda bergabung dengan kelompok Islamis, dengan menjadikan agama tempat bernaung sebagai bagian dari refleksi pengalaman para anggota atas kejadian-kejadian sosial-politik yang mungkin sebelumnya menindas mereka sebagai kaum muda.

Bab ini mengkaji latar sosial para anggota maupun simpatisan dari Tim Hisbah. Kajian dalam bab ini mencoba menelusuri kehidupan para ikhwan, berikut pengalaman yang dilalui ketika menghadapi perubahan sosial, pemerintahan yang demokratis, globalisasi dunia yang semakin tidak terbendung, dan segala akses pendidikan, ekonomi dan politik terbuka lebar, dihubungkan dengan pengalaman mereka ketika bersentuhan dengan Islam. Sehingga dari fenomena pengalaman-pengalaman tersebut akan dilakukan analisis terhadap motivasi, dorongan ataupun keuntungan yang didapatkan ketika bergabung ke dalam kelompok Tim Hisbah.

Beberapa ilmuwan sosial menyadari meluasnya globalisasi dan modernisasi yang turut membawa pada perubahan iklim politik, turut menyumbang pula pada kompleksitas permasalahan sosial yang semakin tinggi. Sebagai contoh, ketika

¹⁰² Wawancara dengan Warman, Semanggi Solo, Februari 2015.

¹⁰³ Bryan S. Turner, *Relasi Agama dan Teori Sosial Kontemporer*, terj. Inyik Ridwan Muzir, (Yogyakarta: IRCiSoD Publishing, 2012), hlm. 469 dan 478.

peralihan masyarakat agraris ke masyarakat industri, sangat banyak melahirkan permasalahan yang berkaitan dengan disparitas sosial seperti kemampuan atau kemahiran individu dalam tuntutan produksi. Masyarakat agraris pada dasarnya merupakan masyarakat produktif (dalam hal agraria), mereka juga mampu memproduksi kebutuhan manusia. Namun, seiring proses industrialisasi, pola pikir masyarakat industri terus menuntut sebuah percepatan produksi, sehingga masyarakat agraris dengan sistem-sistem produksinya yang lebih tradisional memberikan protes cukup serius terhadap tatanan sosial yang lebih modern tersebut. Tidak hanya itu, perubahan sosial turut pula menyumbang pada perubahan iklim politik, seperti berkembangnya sistem negara bangsa (*nation state*) yang membuat universalisme kekuasaan semakin memudar dan kemudian lahirlah anggapan “satu kultur satu negara” (*one culture one nation*).¹⁰⁴

Dalam kaitannya dengan perubahan sosial, para sosiolog awal hingga pertengahan abad 20 sering menghubungkan perubahan sosial dengan aksi kolektif massa dalam sebuah gerakan perlawanan dari kaum miskin yang cenderung anarkis dan irasional. Hubungan tersebut melahirkan sebuah teori deprivasi relatif (*relative deprivation*). Teori ini memiliki empat alur untuk menganalisis sebuah fenomena sosial. Alur ini terdiri dari dua variabel (dimisalkan A dan B) dan satu objek (x). Pertama, variabel A sadar bahwa ia tidak memiliki X. Kemudian A mengetahui bahwa terdapat variabel lain (B) yang memiliki X. Karena A menyadari bahwa segala kekurangannya disebabkan karena ia tidak memiliki X, maka membuat A ingin memiliki X. Setelah itu A memiliki

¹⁰⁴ Ernest Gellner, *Nation and Nationalism*, (UK: Blackwell Publishing, 1983, 2006) hlm. 38-42.

keyakinan bahwa X harus dimiliki untuk menutupi sebuah kekurangan tersebut, oleh karena itu, merebut X adalah sesuatu yang realistis menurut A.¹⁰⁵ Dalam kasus radikalisme agama, A diibaratkan pemangku kepentingan gerakan Islam radikal. X adalah sebuah objek yang diperebutkan, yaitu politik dan kekuasaan. Keadaan sosial masyarakat yang semakin terjepit oleh disparitas modal kapital, membuat kalangan menengah ke bawah membentuk sebuah gerakan perlawanan untuk merebut kekuasaan. Dengan bumbu-bumbu ideologi, dan bingkai-bingkai kemiskinan, mereka percaya bahwa kekuasaan harus dimiliki oleh kalangan agamawan, bagaimanapun caranya untuk merebut. Akhirnya tindakan kekerasan pun dilakukan sebagai realisasi awal untuk mewujudkan usaha kepemilikan kekuasaan tersebut.

Memahami gerakan Islam radikal tidak cukup hanya berkuat dengan teori deprivasi relatif, teori deprivasi relatif saat ini sudah mulai ditinggalkan banyak sosiolog karena dianggap kurang relevan dalam membaca beberapa kasus. Faktor kemiskinan yang sering digaungkan oleh teori ini belum dapat membaca secara holistik fenomena-fenomena sosial berkaitan dengan radikalisme agama. Faktanya, banyak masyarakat kelas menengah bawah yang tidak ikut andil dalam aksi-aksi radikal, atau sebaliknya, tidak jarang masyarakat yang secara finansial berkecukupan terseret dalam aksi tersebut. Para sosiolog kemudian menambah perhatian mereka pada teori identitas sebagai pelengkap dari teori deprivasi relatif, dan sekarang dikenal luas sebagai teori politik identitas. Calhoun menyatakan

¹⁰⁵ Walter G. Runciman, *Relative deprivation and Social Justice: a Study of Attitudes to Social Inequality in Twentieth Century England*, (California: California University Press, 1966), hlm. 71.

bahwa identitas butuh sebuah pengakuan dari orang di luar diri subjek.¹⁰⁶ Hal ini yang menjadi penting dalam pembahasan politik identitas, bahwa aksi daripada gerakan Islam radikal sebenarnya ingin menunjukkan bahwa mereka butuh pengakuan dari sebuah masyarakat luas berikut dengan ideologi yang mereka yakini sebagai kebenaran. Castells menyebut Identitas yang diperjuangkan tersebut bukan tanpa sebab, identitas yang dibangun, dikomunikasikan dan diperjuangkan setidaknya memiliki tujuan agar identitas tersebut dapat menempati posisi baru dalam masyarakat.¹⁰⁷ Para anggota Tim Hisbah bergumul, berkomunikasi dan membentuk enklave dengan memanfaatkan beberapa orang yang kecewa pada tatanan dunia global, termasuk urusan-urusan politik yang seolah tidak di pihak mereka.

B. Adonan Sosial Tim Hisbah

Sistem keanggotaan Tim Hisbah bukanlah sebagaimana sistem keanggotaan organisasi masyarakat Muslim lainnya seperti Nahdhatul Ulama (NU) ataupun Muhammadiyah yang lebih terorganisir. Bukan pula seperti keanggotaan Ahmadiyah, yang tidak pernah luput mendokumentasikan informasi lengkap mengenai data diri setiap anggota dari seluruh dunia yang baru berbai'at dan menyatakan taat pada aturan organisasi. Tim Hisbah lebih terlihat semacam perkumpulan yang sifatnya sporadis dengan satu orang tokoh sentral, dan selebihnya, terdapat pula struktur semacam sekretaris dan bendahara. Meskipun begitu, Tim Hisbah mengklaim memiliki sekitar dua ratus anggota dan simpatisan

¹⁰⁶ Calhoun dalam Manuel Castells, *The Power of Identity*, (United Kingdom: Blackwell Publishing Ltd, 2010), hlm. 6.

¹⁰⁷ Manuel Castells, *The Power of Identity*, (United Kingdom: Blackwell Publishing Ltd, 2010), hlm. 8.

dari berbagai karesidenan Surakarta yang meliputi Sukoharjo, Klaten dan Boyolali. Untuk anggota, mereka kerap ikut serta dalam aksi-aksi pemberantasan apa yang mereka sebut sebagai perbuatan maksiat dan sumber dari penyakit masyarakat (pekat), seperti minuman keras dan perjudian, bahkan para pasangan muda-mudi yang berasyik-masyuk di beberapa kawasan sekitar Solo. Sementara itu, simpatisan Tim Hisbah adalah mereka yang tidak mengikuti aksi, hanya saja sering berkumpul bersama dalam sebuah pengajian-pengajian rutin di beberapa masjid dan mushalla, diskusi ataupun berbincang santai di HIK,¹⁰⁸ dan melakukan renang atau memancing bersama para kelompok Tim Hisbah. Secara ideologi, para simpatisan tersebut sangat setuju dengan Tim Hisbah yang menganggap negara Islam adalah negara dengan sistem pemerintahan utama, sementara demokrasi adalah sistem yang telah diselewengkan oleh pihak-pihak Barat dan menjerumuskan manusia pada kekufuran, dekadensi moral, dan membuat suatu negara terus dilanda permasalahan ekonomi, sosial dan politik.

Selama masa penelitian, beberapa anggota Tim Hisbah bersedia untuk diajak berbincang-bincang berbagi pengalaman terkait data dan informasi penelitian lapangan. Mereka berasal dari berbagai wilayah di sekitar Solo, Semanggi, Bekonang, Kartasura, Purwosari dan Tipes. Para anggota ini ditemui di berbagai tempat seperti masjid, HIK, rumah kediaman, hingga rumah tahanan (rutan) polresta Surakarta di daerah Manahan Solo. Para anggota Tim Hisbah umumnya berusia antara 20 hingga 40 tahun. Beberapa di antara mereka lulusan

¹⁰⁸ HIK sering diakronimkan oleh masyarakat Solo dan sekitarnya sebagai Hidangan Istimewa Kota. Semacam warung kecil di sudut-suut jalan dengan model gerobak yang sifatnya temporer: hanya pada malam hari saja ataupun siang hari saja. Menghidangkan berbagai makanan dan jajanan seperti “nasi kucing”, tempe dan tahu goreng, teh, kopi, susu hingga minuman jahe. Di daerah lain seperti Yogyakarta, warung model seperti ini disebut dengan Angkringan.

Perguruan Tinggi Umum, di antaranya adalah Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta dan Universitas Jendral Soedirman (UNSOED), dan beberapa lagi lulusan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Para lulusan universitas tersebut berasal dari jurusan-jurusan non-agama seperti teknik, manajemen, dan periklanan.

Lulusan universitas hanyalah sebagian kecil dari para anggota Tim Hisbah. Mayoritas para anggotanya adalah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sekarang berprofesi sebagai wiraswasta seperti pedagang pakaian, klontong, plastik, besi rongsok juga onderdil motor dan mobil. Beberapa di antara mereka juga bekerja sebagai karyawan di sebuah toko, pekerja bangunan hingga tukang parkir. Begitu pula para simpatisan dari kelompok ini, mereka adalah para rekan kerja, kawan pengajian, dan beberapa masyarakat yang merasa pernah tertolong oleh aktifitas-aktifitas para anggota Tim hisbah selain kegiatan *sweeping*.¹⁰⁹ Bahkan, di antara para simpatisan Tim Hisbah, adalah guru di sekolah-sekolah negeri dan menyandang status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Memang, suatu hal yang kontradiktif dan unik melihat para pengusung ideologi Islam radikal ketika berada pada lingkup pemerintahan dan menjadi Abdi Negara Indonesia. Mereka mendapat penghidupan, gaji dan berbagai *privilege* lainnya dari negara demokratis di satu sisi, dan mereka mengatakan bahwa Indonesia adalah Negara dengan sistem kafir yang mana aparturnya dianggap sebagai *ansharut thaghut* (para pembantu thaghut) di sisi yang lain.

¹⁰⁹ Di antara kegiatan ini adalah pertolongan pada korban banjir sungai Bengawan Solo yang beberapa kali terjadi di kawasan penduduk bantaran kali Semanggi.

Sebagian besar dari anggota Tim Hisbah tidak memiliki latar belakang yang kuat memegang Islam sebagai satu-satunya keyakinan. Mereka mengakui terlahir dari keluarga *abangan* dan mengkaji Islam hanya dari tradisi-tradisi kakek moyang terdahulu. Sangat berbeda dengan kaum santri yang mengerti tata bahasa Arab lebih dini, dan mengenal sedikit kitab-kitab dalam bahasa Arab yang dikarang oleh para ulama klasik seperti Nu'man Bin Tsabit atau Abu Hanifah (80H/699M – 148H/767M), Malik bin Anas (93H/714M – 179H/800M), Muhammad Idris as-Syafi'i (150H/767M – 204H/819M) dan Ahmad ibn Hanbal (164H/780M – 241H/855M). Mereka pada umumnya mengenal Islam baru pada era Reformasi, dan diakui pula beberapa dari mereka masih terbata-bata dalam membaca al-Qur'an, apalagi kitab-kitab berbahasa Arab yang tidak disertai tanda baca (Arab gundul). Mereka mempelajari sumber-sumber Islam klasik melalui ceramah-ceramah singkat di berbagai tempat. Oleh karena minimnya pengetahuan mereka mengenai bahasa Arab, maka buku-buku terjemahan dari ulama-ulama Islam Politik yang berbahasa Arab seperti Sayyid Qutb (1906 – 1966) sangat berarti bagi mereka. Begitu pula buku-buku karangan Abu Bakar Ba'asyir, dan Aman Abdurrahman, yang merupakan ustadz para kalangan Islamis khas dalam negeri. Selain itu, tulisan-tulisan di berbagai blog bernuansakan Islam politik pun turut menjadi asupan gizi bagi keilmuan Islam para ikhwan tersebut.¹¹⁰

¹¹⁰ Untuk blog yang cukup banyak dirujuk, silahkan buka website pada link: <https://millahibrahim.wordpress.com/>. Di tengah ramainya pemberitaan pemblokiran situs-situs yang dianggap pemerintah berpaham radikal, situs dengan konten blog wordpress ini masih leluasa berkeliaran di dunia maya. Dalam SEO (*search engine optimization*), blog ini menduduki peringkat pertama pada beberapa indeks *search engine* seperti Google dan Bing dengan kata kunci (*keyword*) “jihad menegakkan tauhid”

Para ikhwan ini tidak hanya dapat dijumpai di masjid dan mushala. Mereka dapat dijumpai di berbagai pasar tradisional, tempat parkir motor dan mobil, pangkalan becak, toko-toko, dan di sudut-sudut jalan. Beberapa di antara mereka berjualan pulsa dan jajanan dengan kios mini, hingga menjajakan susu segar khas Boyolali. Pakaian yang dikenakan pun tidak selalu mengenakan busana bernuansa Arab dengan jubah menjuntai. Bagi kaum muda yang berusia sekitar 20 hingga 30 tahun, mereka berpenampilan layaknya masyarakat dan kaum muda di Indonesia pada umumnya; celana jeans ataupun celana dengan motif loreng-loreng dan memiliki banyak saku ala *army style*, kaos model trendi yang disablon dengan semboyan-semboyan Islami, semboyan tersebut tidak jarang menggunakan bahasa Inggris seperti "*Islam is our choice*". Bahkan, tidak sedikit dari mereka masih terlihat tato yang terukir di pergelangan tangan ataupun betis dengan gambar Naga atau tulisan-tulisan lain. Fenomena ini seolah mengkonfirmasi bahwa banyak di antara mereka yang sebelumnya bergelut di dunia "hitam". Berasal dari kaum pinggiran Solo yang jauh dari agama memang sebuah perjalanan yang pernah mereka lalui. Perbedaan pakaian sehari-hari antara mereka dan masyarakat pada umumnya hanyalah pada celana yang di atas mata kaki. Para anggota Tim Hisbah sangat anti terhadap celana ataupun pakaian yang menjuntai di bawah mata kaki (*isbal*). Apapun yang mereka kenakan, selalu saja diusahakan untuk tidak menjuntai ke bawah melebihi mata kaki. Mereka membeli celana ataupun pakaian bawahan lainnya yang kemudian mereka potong kembali, agar celana tetap menggantung di atas mata kaki.

Jika melihat dari kehidupan para ikhwan dari sisi ekonomi, mereka dapat dikategorisasikan ke dalam masyarakat kelas menengah bawah, walaupun terdapat pula sebagian di antara mereka golongan kelas menengah tengah. Pengklasifikasian ekonomi ini merujuk pada Asian Development Bank yang diamini oleh Bank Dunia bahwa kelas menengah adalah mereka dengan pengeluaran harian per kapita antara \$2 dan \$20, atau kisaran Rp.26.000 – Rp. 260.000. Rentang pengeluaran perkapita tersebut dibagi lagi ke dalam tiga kelompok yaitu masyarakat kelas menengah bawah (*lower middle class*) dengan pengeluaran perkapita perhari sebesar \$2-4; kelas menengah tengah (*middle-middle class*) sebesar \$4-10; dan kelas menengah atas (*upper-middle class*) \$10-20.¹¹¹

C. Kaum Muda Yang Berhijrah

Beberapa kaum muda dengan pengalaman masa lalu yang mereka anggap sebagai pengalaman kelam, menjadikan para pemuda ini calon potensial yang bersentuhan dengan Islam. Sulitnya ruang sosial yang menerima kaum muda ini, dan juga keterbatasan kemampuan untuk tampil di hadapan publik di tengah persaingan yang semakin ketat membuat mereka berbondong-bondong mencari tempat yang pas untuk bernaung. Agama dalam hal ini *dengan religious commitment*-nya untuk mengatasi berbagai macam persoalan sosial, menjadi salah

¹¹¹ Laporan Perkembangan perekonomian Indonesia, “Perkembangan Perekonomian Indonesia, Mengulangi tahun 2008?” format pdf, *World Bank*, Maret 2011, hlm. 44.

satu faktor untuk mendorong seseorang masuk dan mendekat sebagai rumah singgah atas kekecewaan pribadi.¹¹²

Beberapa kisah para anggota Tim Hisbah bisa menggambarkan bagaimana mereka berkenalan dengan Islam. Para laskar ini mengaku pindah dari ideologi Islam yang hanya sebatas sebagai simbol keyakinan akan Tuhan kepada keyakinan yang menyeluruh. Dengan semboyan “Islam adalah Solusi” mereka berusaha memecahkan masalah melalui Islam yang masih sangat abstrak dan kurang sistematis. Perpindahan ini dikatakan oleh para anggota Tim Hisbah sebagai hijrah menuju Islam *kaffah* (menyeluruh), ungkapan yang sebagaimana pernah disinggung oleh ideolog Islamisme terdahulu. Agus Junaedi, seorang pria yang saat ini sebagai penanggung jawab dan menganggap telah dipasrahkan amanat untuk mengkoordinir ikhwan Tim Hisbah oleh Sigit sebelum ia meninggal dunia mengaku bahwa kedekatannya dengan para ikhwan dimulai setelah Agus sering mengunjungi masjid Arafah yang dahulu menjadi tempat pengajian Sigit dan jamaahnya.

“Pertama saya bergabung dengan para ikhwan itu waktu saya sering mengikuti kegiatan dan pengajian sama ustadz Sigit mas, di masjid Arafah itu. Saya juga tertarik dengan para ikhwan ketika melihat ustadz Sigit itu bertindak secara totalitas untuk menegakkan syariat Islam. Bukan hanya itu mas, ustadz Sigit sering menyadarkan para preman yang dulu pernah bergelut di dunia hitam. Ya sebagian mereka ada yang mantan pencopet, pemabuk, maling, macam-macam lah mas. Selain itu aksi mereka bukan cuma sweeping mas, tapi juga bakti sosial seperti membuka posko relawan membantu korban banjir di bawah jembatan mojo ini. Nah, mulai saat itu saya yakin bahwa saya harus ambil bagian, dalam artian membantu para ikhwan ini untuk terus menyuarkan Islam.”

¹¹² Zuly Qodir, *Radikalisme Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2014), hlm.97.

Sebagaimana diungkapkan oleh M. Amin, seorang ikhwan yang telah mengenal gerakan amar ma'ruf nahi munkar dari para Laskar Hizbullah ketika dirinya masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas. Amin mengatakan bahwa ketertarikannya kepada gerakan ini dimulai ketika masa pertobatannya dari kenakalan remaja dan mulai aktif di dunia remaja masjid, atau IRMA (Ikatan Remaja Masjid):

“Dulu saya cuma aktif di remaja masjid (IRMA) di daerah Cemani, karena saya tinggalnya di situ. Masjid dulu itu masih dibuat tempat minum (mabuk-mabukan), kadang jadi tempat main musik, parah pokoknya mas. Remaja masjid juga cuma sebatas kumpul-kumpul. Kami juga dulu sering melakukan *khalwat*. Belum ada kegiatan dan pembimbing yang jelas. Setelah para ikhwan masuk ke masjid, kami mulai diajarkan masalah agama, sebagai anak muda itu harus aktif dan peduli terhadap agamanya. Aktifitas-aktifitas remaja itu ditinggalkan saja. Memang *sih* kalau dipikir, manfaatnya sedikit, lebih banyak *madharatnya* (hal yang membahayakan) mas. Dari sana kami di ajak untuk aktif melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Seingat saya, Awalnya itu saya ikut razia besar-besaran oleh para ikhwan saat bulan Ramadhan, ketika malam hari.¹¹³

Dengan aktif sebagai remaja masjid yang bisa dikatakan sebagai tempat kegiatan Islam di suatu wilayah, Amin bergabung dengan diajak terlebih dahulu oleh para ikhwan. Hal ini menandakan bahwa gerakan Tim Hisbah melakukan ekspansi dan menancapkan pengaruhnya melalui masjid-masjid. Para ikhwan menyentil kehidupan kaum muda yang belum jelas arah dan tujuan beragamanya. Pengalaman yang sama juga dialami oleh beberapa ikhwan lainnya seperti Amdan dan Eko. Minat mereka terjun ke dunia Islamisme melalui ajakan seorang kawan yang sering bertemu di masjid. Mereka mengatakan Solo sebagai kota yang rusak

¹¹³ Wawancara dengan M.Amin, Semanggi, Solo. Februari 2015

karena jauh dari Tuhan, karenanya harus ada para Muslim yang bergerak untuk membenahi kerusakan tersebut.

Cerita lain datang dari Yanto, pria yang akrab disapa Bagor oleh para warga Semanggi. Bagor selama ini terkenal sebagai pembesar preman yang berkuasa di sekitar pasar Klitikan Solo. Namun pada pertengahan bulan Februari, Bagor memilih untuk merubah kelakuan dan aktifitasnya ke arah yang lebih positif. Cerita ini berawal ketika kediaman Bagor yang berada di timur Pasar Klitikan Solo, kerap dijadikan arena hiburan oleh pemuda setempat dengan bermain judi dan membawa *ciu*¹¹⁴, yang sudah dikemas dalam botol air mineral untuk dikonsumsi. Kegiatan ini diketahui oleh para kawan Tim Hisbah yang kemudian segera mengambil tindakan. Beberapa ikhwan mencoba menghentikan kegiatan tersebut dengan menegur Bagor, sang pemilik rumah dan dianggap sebagai orang nomor satu di antara kawanannya. Para ikhwan mengancam akan mengambil tindakan yang lebih keras jika kegiatan tersebut masih terjadi. Bagor, yang dalam posisi tertekan dengan ancaman tersebut memilih untuk diam dan bersedia merubah kehidupannya menjadi lebih baik. Tentu, hal ini kemudian disambut baik oleh para ikhwan dengan memberikan tawaran kepada Bagor. Tawaran tersebut berupa pilihan apakah Bagor yang akan memperingati kawanannya sendiri untuk meninggalkan aktifitas-aktifitas negatif, atau, para ikhwan yang akan datang secara rutin untuk mengontrol (dalam bahasa mereka

¹¹⁴ *Ciu* atau biasa disebut *ciu* Bekonang oleh masyarakat Solo adalah minuman keras tradisional khas Solo. Biasanya Diolah dari bermacam-macam bahan, dari fermentasi beras, ragi tape, hingga hasil penyulingan tetes tebu yang dicampur alkohol. Minuman ini sangat terkenal di Solo dan memiliki kawasan sentra industri kecil di daerah Bekonang, Mojolaban Sukoharjo, Jawa Tengah. Kawasan yang cukup dekat dengan daerah Semanggi dan Pasar Klitikan.

mendakwahi) kompleks rumah susun yang menjadi tempat kediaman Bagor.¹¹⁵ Tentu, tawaran tersebut dibumbui dengan beberapa justifikasi benar-salah, dosa-pahala, hingga legenda mengenai surga dan neraka.

Dua minggu setelah peringatan yang disampaikan oleh kawan Tim Hisbah, para ikhwan mengetahui bahwa di kompleks kediaman Bagor masih sering terlihat sekelompok orang yang membawa beberapa botol air mineral yang diduga berisi minuman keras. Beberapa aktor Tim Hisbah kemudian memobilisasi kelompoknya untuk melakukan aksi *sweeping* di kompleks kediaman Bagor. Pada Senin malam menjelang pagi, 2 Februari 2015 pekikan takbir bersautan seiring dengan ambisi para laskar Tim Hisbah untuk melakukan aksinya kepada Bagor. Meskipun Bagor tidak berada di tempat, tetapi di dalam kamar yang terletak di lantai dua tersebut, para laskar menemukan banyak botol air mineral bekas yang digunakan sebagai wadah minuman keras dan kartu *remi* yang diduga digunakan untuk berjudi. Aksi tersebut tidak menimbulkan kerusakan berarti, karena dihalang oleh beberapa aparat kepolisian yang datang dan beberapa Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari Komando Resort Militer (Koramil) Pasar Kliwon Solo.

Beberapa hari setelah kejadian, dilakukan proses rekonsiliasi antara pihak Laskar Tim Hisbah dan Bagor. Tim hisbah diwakili oleh Agus Junaidi, Fajar dan Ramdhan. Sedangkan di pihak Bagor, diwakili Bagor sendiri. Hadir pula dua orang dari Babinsa Koramil sebagai mediator yang mencoba menengahi kedua belah pihak. proses perdamaian itu diadakan di masjid Majelis Ulama Indonesia

¹¹⁵ Wawancara dengan Agus Junaedi, Kenteng, Solo. Februari 2015

(MUI) Solo yang terletak di sebelah selatan pasar Klitikan. Dengan menganggap bahwa mereka dalam posisi yang paling benar di antara lainnya, beberapa anggota Tim Hisbah terus berargumen bahwa perbuatan Bagor dan kawan-kawannya telah dianggap meresahkan banyak warga, dan karena itulah para ikhwan kemudian bergerak melawan. Mereka menantang aparat keamanan apabila ingin menangkap dan mengadili mereka secara hukum yang berlaku di Indonesia, namun mereka tetap tidak merasa bersalah atas kasus ini, mereka meyakini bahwa aksinya sudah memiliki prosedur tersendiri sesuai teks-teks suci dalam Islam. Di pihak lain, Bagor hanya tertunduk dan merasa tertekan akan perbuatan atau aksi yang dilakukan Tim Hisbah. Bagor kemudian berjanji untuk membawa para kawanannya kepada arah yang lebih positif, dan dari proses rekonsiliasi itu, disepakati pula bahwa para ikhwan dari Tim Hisbah akan melakukan pendampingan ke komplek tempat tinggal Bagor melalui kegiatan-kegiatan kajian agama. Setelah proses rekonsiliasi, para ikhwan memantau Bagor dan mendampingi Bagor dengan pendekatan persuasif dan kekeluargaan. Tim Hisbah terus mendekati Bagor, bahkan ketika anak laki-laki Bagor terserang penyakit dan harus melakukan perawatan inap di rumah sakit, para ikhwan tidak segan berkumpul dan membesuk Bagor sekeluarga di rumah sakit. Pendekatan persuasif ini diklaim oleh kawanannya hisbah sebagai proses pendampingan dan dakwah kepada orang yang mereka anggap ingin bertobat dan meninggalkan dunia kejahatan. Dengan pendekatan ini, Tim Hisbah ingin menunjukkan sebuah aksi yang juga dinilai sebagai aksi-aksi kemanusiaan dan menolak anggapan masyarakat bahwa mereka sangat dekat dengan perilaku anarkis.

Fenomena Bagor bukanlah satu-satunya fenomena yang menjelaskan mengapa individu-individu yang sebelumnya adalah seorang preman rela bergabung kepada Tim Hisbah. Banyak kasus serupa yang terjadi dalam perjalanan Tim Hisbah menjadi gerakan sosial, sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa orang Tim Hisbah bahwa semasa Sigit Qardhawi masih hidup, tidak sedikit para preman yang ditantang beradu fisik oleh Sigit. Bagi para anggota Hisbah, kemungkaran terkadang harus dilawan dengan paksaan dan kekerasan, dari paksaan tersebut, akan terlahir sebuah kebiasaan yang akan melekat pada diri seseorang.¹¹⁶

Dari kasus Bagor yang bersedia hijrah, dapat dilihat bahwa proses perekrutan bukan hanya melalui kedekatan personal antara satu tokoh dengan lainnya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Lorne Dawson bahwa kedekatan personal (misalnya keluarga mengajak keluarga lainnya) adalah faktor yang cukup menentukan dalam proses *joining* gerakan sosial keagamaan tersebut.¹¹⁷ Proses penentangan yang diikuti dengan pendekatan personal bisa menjadikan seseorang terbawa ke dalam aksi gerakan Islamis. Agama, yang pada dasarnya merupakan sebuah sistem pemujaan (*cults*) berubah menjadi gerakan sosial keagamaan baru (*new religious movement*) karena tuntutan modernisasi dan globalisasi yang mengharuskan seseorang membentuk dan mengkonsolidasikan identitas yang termarginalkan. Inilah salah satu yang menjadikan orang berkeinginan bergabung kepada gerakan-gerakan sosial keagamaan seperti Tim Hisbah. Ditambah lagi, di

¹¹⁶ Wawancara dengan Sidiq, masjid al-Anshar, Semanggi Solo. Februari 2015.

¹¹⁷ Lorne L Dawson (ed), *Cults and New Religious Movements: A Reader* (UK: Blackwell, 2003), h.118-120.

dalam nuansa yang demokratis seperti ini, seseorang boleh membentuk ataupun terlibat dalam gerakan sosial manapun, termasuk gerakan sosial keagamaan.¹¹⁸

D. Wacana Kaum Muda yang Dihantam Globalisasi

Globalisasi adalah suatu kondisi ataupun proses di mana tidak ada lagi definisi baku terhadap suatu sistem budaya tertentu. Ia adalah proses buramnya batasan budaya dan juga politik, yang menjadikan suatu wilayah tidak mampu mempertahankan homogenitasnya. Sebuah proses yang niscaya terjadi ketika beberapa wilayah saling terkoneksi. Masyarakat dalam sebuah wilayah tersebut membentuk sebuah masyarakat dunia baru, yang mana saling mempengaruhi satu sama lain, berjalan sangat dinamis tanpa mampu dihalau oleh tembok politik suatu negara.¹¹⁹

Globalisasi ini berdampak banyak dalam dimensi kehidupan. Dalam hal politik, globalisasi menjadikan negara-bangsa sebagai sebuah konsep kenegaraan yang mengalahkan bentuk kekuasaan universal seperti konsep khalifah seluruh dunia Muslim, ataupun kekaisaran dengan banyak daerah kekuasaan. Karena globalisasi, demokrasi saat ini menjadi sebuah sistem populer negara-bangsa yang memudarkan sistem pemerintahan monarki. Dunia beramai-ramai menggaungkan nilai-nilai demokrasi setelah peristiwa perang dunia pertama dalam sejarah, gaung suara demokrasi tersebut terus dibicarakan hingga sekarang. Globalisasi pun turut membawa ramainya restoran-restoran cepat saji beraroma Amerika dan Italia di

¹¹⁸ Thomas Robbins and Philip Charles Lucas, "From Cults To New Religious Movement: Coherence, Definition, and Conceptual Framing in The Study of New Religious Movement", dalam James A. Beckford, N.J Demerath (ed), *The Sociology of Religion*, (London: SAGE Publications, 2007), h.238.

¹¹⁹ Frank J. Lechner, *Globalization, The Making of World Society*, (UK: Blackwell Publishing, 2009), h.1-2.

Indonesia: *Kentucky Fried Chicken* (KFC) dan *Pizza Hut*. Berhamburnya permainan adu ketangkasan anak dengan menggunakan “*stick*”: Nintendo, Sega dan Playstation, yang semakin meninggalkan pola permainan adu ketangkasan anak dengan kontak fisik: seperti lomba gerobak sodor, balap lari, dan bola bekel. Perubahan dari khilafah, kekasiaran kepada negara-bangsa, monarki ke demokrasi, dan dari adu ketangkasan fisik kepada adu ketangkasan “*stick*” inilah simplifikasi gambaran dari meluasnya ekspansi globalisasi.

Di tengah ekspansi globalisasi, yang mendorong akselerasi pertumbuhan demokrasi, beberapa segmen masyarakat justru tidak kuat menopang ide-ide demokrasi tersebut. Mereka adalah kaum muda yang kecewa dengan janji-janji demokrasi dan telah terbuai dengan janji-janji Islamisme. Hal ini tentu terkait dengan perubahan politik yang melahirkan kebijakan-kebijakan pemerintahan baru dan terkadang tidak menentu. Setelah Reformasi, elit-elit politik dan pemerintah berkomitmen untuk membuat Indonesia menjadi negara yang lebih terbuka yang mana kekuasaan harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Reformasi bukan hanya di wilayah politik, namun di bidang lainnya seperti pendidikan dan ekonomi.

Di bidang pendidikan, masyarakat harus merespon tuntutan pendidikan Indonesia yang tertinggal jauh di antara negara-negara Asia lainnya. Setelah Reformasi, hasil survey Political and Economic Risk Consultancy (PERC) Hongkong melaporkan bahwa dari 12 negara, Korea Selatan dinilai memiliki sistem pendidikan terbaik, disusul Singapura, Jepang, Taiwan, India, Cina, dan Malaysia. Indonesia menduduki urutan ke 12 di bawah Vietnam. Akhirnya,

pemerintah harus berjuang mereformasi sistem pendidikan dengan melihat berbagai pertimbangan, terdapat delapan pertimbangan yang dibicarakan terkait reformasi pendidikan tersebut, salah satunya pertimbangan globalisasi dan pengaruh jangka panjangnya terhadap bangsa Indonesia. karena hal inilah pemerintah harus mencanangkan bukan hanya pendidikan wajib belajar sembilan tahun.¹²⁰ Globalisasi tentunya menuntut percepatan agar tidak tertinggal dengan negara-negara lain, kondisi ini membuat profesionalisme semakin dijunjung tinggi dalam dunia yang semakin global. Bukan hanya pada ranah ekonomi, profesionalisme juga dibutuhkan di dunia-dunia tenaga kerja, baik itu yang bersifat pekerjaan lapangan maupun pekerjaan administratif. Untuk mencapai hal tersebut, orang berbondong-bondong mengejar jurusan keahlian di bidangnya masing-masing pada lembaga-lembaga Pendidikan Tinggi. Tuntutan profesionalisme mendorong seseorang untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi setara Ahli Madya ataupun Sarjana, bahkan hingga tingkat doktoral. Para pemuda dari keluarga kelas menengah di Solo, banyak mendaftarkan dirinya di Perguruan Tinggi ternama di kota tetangga, Yogyakarta. Sementara tidak sedikit pula pemuda yang mendaftarkan diri di Perguruan Tinggi dalam kota seperti UNS dan Universitas lokal Solo lainnya seperti UNISRI dan UMS.

Tuntutan globalisasi ini ternyata belum siap dihadapi baik dari pemerintah ataupun dari kalangan masyarakat pada tahun-tahun awal era Reformasi. Pemerintah belum mampu menyediakan beasiswa yang cukup dan meng-cover segala kebutuhan biaya selama masa pendidikan, apabila ada itupun hanya bersifat

¹²⁰ Paul Suparno (et.all), *Reformasi Pendidikan, Sebuah Rekomendasi*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2002), hlm. 9.

stimulan. Kondisi ini berimbas pada kaum muda. Bagi kaum muda yang tidak mampu mencapai tuntutan globalisasi pendidikan tersebut, mereka hanya bekerja semampunya dengan keahlian dan modal sebatas yang dimiliki. Pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh pun (khususnya pengetahuan agama) dibangun dengan fondasi-fondasi eksklusifitas, didapat dari pengajian-pengajian di masjid atau mushalla khusus. Pendidikan setara SMA tampaknya dirasakan belum cukup bagi mereka.

Kekecewaan ini disuarakan dengan meneriakkan wacana-wacana anti pemerintah, pemerintahan dituding sebagai sekelompok elit penguasa penyebab keterpurukan sosial ekonomi dan politik, terlebih nuansa pemerintahan Indonesia yang demokratis menjadi sasaran empuk bagi para ikhwan tersebut untuk menggulirkan wacana-wacana pertentangan. Sebenarnya wacana-wacana anti pemerintahan sekuler, anti demokrasi dan anti pancasila tersebut dapat dibaca melalui kritik analisis wacana. Foucault (1926-1984), salah seorang filsuf Prancis kontemporer, banyak menulis tentang wacana dan pengetahuan yang digulirkan untuk kepentingan-kepentingan kekuasaan. Foucault menyatakan bahwa wacana dominan yang diserukan bukanlah sebuah kebenaran atas wacana tersebut, melainkan bagian dari struktur wacana yang berupa sebuah strategi dalam mencapai tujuan. Dengan kata lain, sebuah wacana yang terus disuarakan bukanlah arti sesungguhnya, melainkan adalah strategi dalam meraih hal-hal yang berkenaan dengan kekuasaan.¹²¹

¹²¹ Michele Foucault, *Arkeologi Pengetahuan*, terj. Inyik Muzir, (Yogyakarta: Dive Press, 2012).

Para ikhwan dari Tim Hisbah, sebagaimana pengusung Islamisme lainnya, selalu menyalahkan sistem demokrasi dan alat atau perangkat yang menyertainya. Misalnya, pemilu yang selalu dihujat karena dianggap menyamakan manusia dan Tuhan dengan semboyannya “suara rakyat adalah suara Tuhan”. Mereka juga berargumen bahwa sebuah pemerintahan harus dipilih melalui *ahlu al-halli wa al-‘aqdi*, sekumpulan orang yang berhak memilih pemimpin dengan ilmu keagamaan yang lebih baik daripada orang lainnya. Pemilu dianggap menyalahi aturan *ahlu al-halli wa al-‘aqdi*, pemilu dinilai menyamakan suara orang yang paham agama dengan yang tidak paham agama, orang yang berpendidikan dengan orang yang tidak berpendidikan seperti para pemabuk, penjudi dan lain lain. Sebenarnya, makna yang tersembunyi dari wacana ini adalah bagaimana akses pendidikan itu dapat diperoleh semua kalangan masyarakat termasuk kaum pinggiran kota yang di sana terdapat berbagai macam kriminal. Melalui pendidikan yang layak, diharapkan masyarakat dapat memilih seorang pemimpin dengan tepat sesuai pertimbangan-pertimbangan rasional dan tidak terpengaruh dengan politik uang.

Demokrasi yang secara harfiah berarti kekuatan atau kedaulatan di tangan rakyat mereka sendiri sebagai pencuri hak Tuhan. Bagi para ikhwan, kedaulatan ada di tangan Tuhan, bukan manusia. Manusia sarat akan kelalaian-kelalaian, kezhaliman, dan dipenuhi oleh nafsu serakah meraih kekuasaan dan kesombongan. Penolakan kedaulatan rakyat tersebut sebenarnya menyimpan makna penantian akan sebuah pemerintahan yang lebih bersih, terbuka, adil dan egaliter. Bahkan, aksi yang terkesan anarkis menjadi sebuah strategi bagi mereka dalam menyampaikan sebuah wacana. Aksi tersebut menggambarkan sebuah

pesan agar penegakan hukum tidak dibiarkan melemah, mampu bertindak dengan tegas dan tidak menjadi penegak hukum yang korup. Pembacaan-pembacaan seperti ini yang tampaknya luput dari perhatian para akademisi dan pembuat kebijakan (*policy maker*). Pembacaan terhadap kelompok Islam radikal selama ini hanya dilakukan dari sisi pelanggaran kriminal dan kesalahan menafsirkan agama, sementara cenderung mengabaikan makna di balik seruan wacana-wacana dan aksi-aksi yang dilakukan oleh para anggota Tim Hisbah.

Jelas dalam konteks ini, keterlibatan masyarakat terhadap gerakan Islam radikal berawal dari ekspansi globalisasi yang tidak berpihak pada mereka. Kondisi politik yang tidak menentu dan banyaknya pemberitaan korupsi di berbagai media massa, menambah kekecewaan para ikhwan Tim Hisbah. Mereka lantas menyentuh kondisi ini dengan sistem demokrasi yang dianut di Indonesia dan menghasilkan kesimpulan bahwa sistem demokrasi membawa kepada kekacauan politik. Kesimpulan ini lalu dibawa dalam berbagai obrolan-obrolan, majelis kajian dan diskusi-diskusi kecil para ikhwan Tim Hisbah, menyebar ke berbagai segmen masyarakat yang cenderung bernasib sama dengan para anggota sebelumnya.

Kekecewaan di tengah dunia demokrasi ini menjadi satu identitas tersendiri. Manuel Castells menyatakan ketika identitas tersebut mulai dirasakan, mereka mencoba kembali pada identitas awal yang lebih tradisional, agama. Hasil rekonstruksi identitas inilah yang kemudian menjadi identitas Islam radikal, yang mana identitas ini bekerja sebagai reaksi perlawanan atas kemajuan yang tidak dapat dicapai. Dalam konteks ini kemajuan atau pencapaian janji-janji demokrasi

yang belum dirasakan, seperti pemerataan akses pendidikan, politik dan ekonomi. Castells kemudian “menggaris bawahi” bahwa pertumbuhan kelompok radikal ini mengindikasikan kelemahan perhatian negara atas masyarakat Muslim ketika goncangan globalisasi yang justru mengurangi kapasitas sosial ketika mereka dihadapkan dengan program-program pertumbuhan.¹²²

E. Hijrah Menuju Tim Hisbah: Sebuah Proses

Melalui kajian kaum muda yang berhijrah dan memalingkan diri dari globalisasi, terdapat dua model individu yang bergabung dalam kelompok Tim Hisbah. Pertama, individu yang lahir dan besar dalam masyarakat awam, tanpa memiliki latar belakang keagamaan yang mendalam, meminjam bahasa Clifford Geertz mereka berlatar belakang *abangan*, yang tergerus globalisasi, dan kemudian merasa tidak diuntungkan dengan nuansa keterbukaan dalam dunia demokrasi. Kedua, para pemuda yang pernah bergelut di “dunia hitam” atau premanisme, dunia yang orang-orang di dalamnya dianggap memiliki cacat dalam perilaku ini juga turut menyumbang banyak anggota di dalam kelompok laskar Islam militan. Satu kesamaan di antara dua model pemuda ini adalah mereka yang secara identitas pernah menjadi masyarakat yang tertekan karena kondisi sosial-politik. Pergaulan di era globalisasi, membuat para pemuda tersebut harus bersaing dengan sekian banyak orang di sekelilingnya. Pengalaman persaingan ternyata tidak menguntungkan para pemuda yang dalam masa produktifitas tinggi tersebut, situasi sosial-politik membuat mereka harus berjuang mempertahankan identitas sebagai seorang pemuda Muslim yang aktif dan ingin terlibat dalam

¹²² Manuel Castells, *The Power of Identity*, hlm.19-20.

proses interaksi sosial-politik. Merujuk pada Tinka Veldhuis dan Jorgen Staun, proses masyarakat menuju ke arah gerakan Islam radikal ini dapat dikaji melalui *Root Cause model*. *Root Cause model* sendiri adalah upaya pengklasifikasian penyebab dari bergabungnya masyarakat kepada gerakan-gerakan radikal. Model ini sebagai antitesa dari metode-metode sebelumnya yang diterapkan oleh para pembuat kebijakan dalam menganalisis mereka yang terlibat aksi radikalisme. Model klasifikasi penyebab sebelumnya itu adalah model bertahap (*phase model*).

Model bertahap banyak digunakan dalam menganalisis bagaimana proses radikalisasi di masyarakat. Model ini terdiri dari dua jenis: *top-down* dan *bottom-up*. Jenis model bertahap pertama adalah dengan membedakan tingkatan perbedaan dari sebuah proses radikalisasi, di mana seseorang dapat bertambah tingkat radikalnya sesuai dengan jenjang proses tersebut. Tahap pertama dimulai ketika seseorang mudah terkena bujuk rayu dari seorang pembawa ideologi radikal, yang disebut oleh Veldhuis dan Staun sebagai *radicaliser*. Bujukan *radicaliser* ini membuat perilaku beragama seseorang berubah menjadi lebih eksklusif. Setelah itu, proses dilanjutkan dengan mempersempit lingkaran pergaulan orang yang terbujuk radikalisme tersebut. Mereka tidak mau bergaul dengan orang yang tidak memiliki ideologi yang sama terhadap mereka, bahkan tidak jarang mereka menjauhi keluarga. Setelah itu, tahap terakhir seorang menjadi radikal adalah tahap di mana seseorang banyak melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang distimulasi oleh tayangan-tayangan pembantaian atau kondisi perang di beberapa negara konflik yang berkejolak.

Jenis kedua dari model bertahap ini dinamakan dengan *bottom-up*. Proses ini diawali dengan kondisi pre-radikalisasi, kondisi ini melihat seseorang pada dasarnya merupakan orang dengan kehidupan dan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh masyarakat kelas menengah pada umumnya. Mereka hidup dengan keluarga yang berasal dari kelas menengah, memiliki latar belakang Muslim, dan sedikit pernah tercatat kasus kriminal. Setelah itu proses radikalisasi berlanjut pada tahap *self-identification*. Tahap ini menggambarkan bagaimana seseorang secara gradual mengapresiasi terhadap interpretasi-interpretasi radikal. Biasanya tahap ini ditandai dengan krisis politik, dan kemudian pemicunya adalah kemiskinan dan diskriminasi sosial. Tahap ketiga seseorang akan menuju tahap indoktrinasi. Tahap ini yang membuat seseorang mengintensifkan diri mereka untuk mengadopsi semua keyakinan ideologi-ideologi salafi jihadis dan mengharuskan mereka melakukan aksi-aksi radikal. Setelah melakukan aksi dan mengintensifkan diri mereka kepada kelompok tertentu, pada tahap ke empat, seseorang baru diterima sebagai bagian dari identitas kelompok radikal tersebut.

Root cause model hadir sebagai penyempurna dari *phase model*. *Phase model* dianggap kurang menjadi panduan yang relevan untuk mengkaji proses seseorang yang terjun ke dalam dunia gerakan Islam radikal. Mengetahui orang-orang yang terlibat dalam gerakan radikal melalui dua model terdahulu, tidak lantas mengetahui akar masalah dari kemunculan sebuah gerakan radikal tersebut. Model ini dianalogikakan oleh Veldhuis dan Staun ibarat seseorang ingin mengkaji persoalan mengapa sebuah buku menjadi *best seller*, namun hanya mempelajari apa yang dimaksud dengan *best seller* saja, dan mengesampingkan

bagaimana kondisi sosial para pembeli, apa yang diangkat oleh seorang penulis, bagaimana penulis tersebut menyusun kata-kata, dan dalam situasi (budaya, sosial, ekonomi dan politik) seperti apa penulis menulis buku tersebut. Analisis dari sebuah buku *best seller* dengan cara seperti itu kurang mendalam dan mengakar, sehingga dicapai hasil yang bias. Begitu pula dengan mengkaji gerakan Islamis. Dengan menggunakan model tahapan, hanya akan mengetahui apa itu Islam radikal, bagaimana ciri-ciri fisik mereka? dan apa saja aksi yang dilakukan oleh kelompok Islamis tersebut. Tentu hasilnya hanya sebatas klasifikasi yang tidak mendalam dan tidak pula mengetahui akar permasalahan dari gerakan tersebut yang sebenarnya berhubungan pula dengan kajian-kajian interdisipliner, seperti sosial, ekonomi dan politik.

Root Cause model dimulai dengan membagi faktor penyebab menjadi dua tingkat: tingkat makro dan mikro. Faktor makro dinilai sebagai *pre-condition* dalam terciptanya sebuah proses radikalisisasi. Sedangkan faktor mikro digunakan untuk menilai seseorang yang ikut dalam gerakan, faktor mikro ini diklaim juga mampu menjelaskan mengapa sebagian orang dapat bergabung kepada kelompok radikal, dan mengapa sebagiannya lagi tidak bergabung, meskipun dengan kondisi yang sama. Untuk mengkaji individu sebagai satuan yang tidak terpisahkan dalam kaitannya dengan radikalisme, faktor mikro ini memiliki faktor sub-bagian yaitu sosial dan individual. Faktor sosial mencoba menggambarkan posisi individu dengan sebuah masyarakat, perkumpulan atau orang banyak lainnya. Sedangkan faktor individual berusaha menggambarkan keadaan dan proses seseorang, juga menjelaskan bagaimana seseorang menafsirkan sebuah kondisi politik, yang mana

dirinya berada dalam kondisi tersebut. Faktor ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mereka mengartikannya, dan merespon situasi tersebut.

Setelah mengkategorisasikan faktor penyebab kepada faktor makro dan mikro, selanjutnya kita harus membedakan antara penyebab (*causes*), yang menempatkan fondasi dalam sebuah aksi radikalisme, dan katalis (*catalyst*), yang secara tiba-tiba mempercepat aksi radikalisme tersebut.¹²³

Tabel 1. Root Cause Model Valdhuis dan Staun

Level	Penyebab (Causes)		Katalis (catalyst)
Level Makro		<ul style="list-style-type: none"> • Politik • Ekonomi • Kultur 	Peristiwa Pemicu
Level Mikro	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi sosial • Interaksi sosial dan proses kelompok • Deprivasi relatif 	Peristiwa Pemicu dan rekrutmen
	Individual	<ul style="list-style-type: none"> • Karakter Psikologis • Pengalaman Pribadi 	Peristiwa Pemicu dan rekrutmen

Tim Hisbah adalah sebuah kelompok yang lahir di tengah proses pertumbuhan demokrasi. Dapat dilihat dalam kasus Tim Hisbah, proses pertumbuhan demokrasi adalah hal yang menjadi faktor pada level makro. Sebagaimana pernah disinggung oleh Hoesteray bahwa pada masa pertumbuhan

¹²³ Tinka Veldhuis dan Jrgen Staun, "Islamist Radicalisation: A Root Cause Model," paper penelitian, Denhag: *Netherlands Institut of International Relation Clingendael*, 2009, hlm. 14-24.

demokrasi di Indonesia, organisasi-organisasi massa Islam banyak mengangkat simbolisme Islam untuk mencoba merebut kekuatan politik negara. Dengan kebebasan dan juga strategi, mereka mendekati para aparatur negara, kaum Islamis ini berusaha memaksakan idenya dengan menyerang aliran-aliran yang dianggap sesat (seperti Ahmadiyah dan Syiah), namun mereka juga berusaha agar tindakannya tersebut seakan terlihat masih di dalam jalur konstitusional.¹²⁴

Sementara, globalisasi dan modernisasi turut menyumbang kebangkitan para Islamis tersebut. Lusinan sarjana telah menjelaskan hal ini dalam karya-karya fenomenal. Gilles Kepel, misalnya, menyebut bahwa radikalisme Muslim (yang sering membawa nama jihad) adalah sebuah jalan yang ditempuh sebagai bagian dari hasil konflik antara pemikiran moderat dan radikal di dalam Islam sendiri yang tersebar pada era global.¹²⁵ Oliver Roy juga menyebut bahwa globalisasi menjadikan batasan antara Barat dan Islam memudar. Akibat memudarnya ini, disebut oleh Roy, sebagai arena deterritorialisasi. Agama semakin terputus dari teritorial spesifik atau budaya suatu wilayah, dan seiring dengan itu bentuk baru keagamaan membentuk komunitas yang mana mengorganisir hanya pada wilayah kuantitas pengikut, akibatnya umat menjadi suatu wacana transnasional. Agama bukan lagi dihubungkan dengan budaya setempat, namun dengan satu kumpulan

¹²⁴ James B. Hoestery, "Is Indonesia a Model For The Arab Spring? Islam, Democracy and Diplomacy," dalam jurnal *Middle East Studies Association of North America* (MESA), 2013, hlm. 61.

¹²⁵ Selengkapnya Pada karya Gilles Kepel, *The War for Muslim Minds: Islam and the West*, (Cambridge: Harvard University Press Jihad, 2002); *Jihad: The Trail of Political Islam*, (Cambridge: Harvard University Press, 2004).

perangkat normatif yang dapat diadaptasikan kepada seluruh manusia, apapun kulturnya.¹²⁶

Katalisator yang menjadi pelatuk yang secara tiba-tiba melesatkan peluru aksi-aksi radikal bisa terjadi karena berbagai hal: kekacauan nuansa politik, peminggiran dalam suara aspirasi, penegakan hukum, hingga kebrutalan aparat. Semua kondisi tersebut dapat mempercepat gerakan mereka dalam melakukan aksi-aksi tertentu. Dapat dilihat dari kasus Tim Hisbah, ketika aparat melakukan operasi untuk melumpuhkan Sigit Qardhawi, tidak sedikit para tetangga, kawan dan saudara Sigit yang kemudian menjadi simpatisan terhadap kelompok yang dibentuknya tersebut. Sikap para aparat yang dianggap cenderung arogan terhadap pemberantasan radikalisme justru dijadikan argumen pembalasan oleh para kawan Tim Hisbah. Penyerangan tanpa perlawanan terhadap Sigit sering dijadikan argumen oleh anggota Tim Hisbah bahwa yang sebenarnya anti terhadap kemanusiaan adalah aparat kepolisian, bukan kelompok Tim Hisbah yang dicitrakan sebagai kelompok teroris. Selain itu, bagi para ikhwan Tim Hisbah, aparat penegak hukum hanya menambah masalah hukum di masyarakat dengan melakukan praktek suap.¹²⁷

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada sub-bab sebelumnya, identitas sosial dapat menjadi penyebab proses radikalisme pada level mikro-sosial. Identitas yang teralienasi dari masyarakat dan aliran-aliran Islam *mainstream* dapat membuat seseorang terpancing untuk masuk ke dalam kelompok Tim Hisbah. Perasaan kolektif (*collective emotions*) yang senasib juga merupakan *pre-*

¹²⁶ Oliver Roy, *Globalised Islam: The search for a new Ummah*, (New York: Columbia University Press, 2004), hlm. 54.

¹²⁷ Wawancara dengan Agus Junaedi, dkk, Semarang Solo, Februari 2015.

condition seseorang dapat tertarik ke dalam anggota Tim Hisbah. Sementara, pada level mikro-individual, pengalaman personal, karakter individu, dapat membuat seseorang menjadi simpatisan ataupun anggota kelompok. Katalisator antara level mikro sosial maupun individual relatif memiliki kesamaan. Perekrutan sebagai simpatisan dengan aksi penentangan terhadap suatu aktifitas, aliran, ataupun kelompok lain, sebagaimana yang telah digambarkan dalam kasus Bagor dapat menjadi contoh percepatan seseorang mengikuti suatu kelompok Islamis. Selain itu Veldhuis dan Staun juga menyebut pengenalan dan pendekatan para aktor gerakan dengan suatu individu atau kelompok termasuk dalam katalisator radikalisasi pada level mikro sosial dan individual. Penyederhanaan dapat digambarkan melalui tabel di bawah:

Tabel 2. Proses hijrah anggota Tim Hisbah dengan analisis Root Cause Model

Level	Penyebab (Causes)		Katalis (catalyst)
Level Makro		Demokratisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Penyerapan aspirasi kurang merata • Masih lemahnya penegakan hukum
		Globalisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi global yang merugikan kelompok • Terpinggirnnya kelompok yang dirugikan
Level Mikro	Sosial	Identitas Sosial: “ <i>abangan</i> ” dan	<ul style="list-style-type: none"> • Alienasi terhadap identitas sosial tertentu

		mantan preman	
		<i>Collective Emotions:</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Bertemu dengan aktor penggerak (mobilisator) dari beberapa orang yang merasa memiliki nasib dan pengalaman yang sama • Merasa dibantu dan tertolong oleh kelompok Tim Hisbah • Karakter dan kepribadian yang keras
	Individual	Pengalaman individu	
		Karakter personal	

F. Gerakan Sosial: Payung Bersama

Beberapa sub-bab yang dikaji dalam bab ini telah banyak membahas dan menganalisis bahwa keterlibatan masyarakat terhadap Tim Hisbah bukan hanya karena kesalahan dalam interpretasi agama. Bergabungnya masyarakat akar rumput ke dalam kelompok ini dikarenakan berbagai faktor yang hadir dalam ruang publik sebagai gejala sosial. Demokratisasi dan globalisasi secara tidak disadari turut membantu melancarkan proses gerakan sosial tersebut. Demokratisasi yang mencoba lebih menyadarkan masyarakat bahwa betapa beragamnya kepentingan yang ada di Indonesia, harus menanggung konsekuensi logis. Keragaman tersebut ternyata benar-benar hadir dalam kehidupan

masyarakat tanpa mampu untuk dibendung. Semua orang berhak tampil dan berkesempatan mengisi ruang publik, yang tentunya dengan kualifikasi dan persaingan ketat.

Beberapa orang yang tidak mampu memenuhi kualifikasi dalam era global ini memiliki resiko teralinesasi dari masyarakat luas. Ketika sekelompok orang merasa dalam posisi yang dirugikan dan dalam perasaan tertindas secara identitas, maka sangat berpeluang untuk digerakkan sebagai usaha menuntut sesuatu yang tidak dimilikinya. Dalam hal ini doktrin Politik Islam hadir sebagai penggerak dari kegelisahan masyarakat. Doktrin-doktrin Islamisme yang diserap oleh kaum muda seperti ini memiliki ciri pemahaman totalistik dan formalistik, yang bersikap *letterlijk* dalam memahami teks-teks agama, sehingga harus merujuk perilaku Muhammad dan para sahabat secara literal dan cenderung menolak perubahan sosial. Pada saatnya mereka menjadikan doktrin ini sebagai obat frustrasi terhadap perubahan dunia yang begitu cepat, mendorong kaum muda untuk meluapkan respon-respon yang mewakili identitas pemuda; perlawanan, pemberontakan, pergerakan, gejolak jiwa, kegalauan, janji-janji hingga semangat optimisme. Doktrin agama dapat dimanfaatkan untuk merubah seseorang *from zero to hero*, dari sebelumnya merupakan sosok yang *nothing* menjadi pribadi yang *everything*.

Sangat sulit melakukan generalisasi mengenai motivasi-motivasi para pemuda untuk bergabung ke dalam kelompok Tim Hisbah. Menyimpulkan dengan sederhana bahwa motivasi kaum muda terlibat kelompok radikal karena permasalahan agama adalah sebuah usaha yang bias esensial. Agama bisa menjadi

motivasi kaum muda untuk terjun ke dalam kelompok radikal, namun agama sebenarnya hanyalah faktor penguat dari motivasi yang telah terbangun sebelumnya. Graham E. Fuller menyebut bahwa kebanyakan pemuda teradikalisasi oleh situasi lapangan: pendudukan asing, perasaan dipinggirkan atau dikalahkan; termasuk merasa mendapat perlakuan yang tidak adil, dan ada sedikit rasa balas dendam. Kalaupun tidak terbentuk secara langsung di lapangan, mereka dapat merasakan dari pemberitaan ketidakadilan dan kekacauan politik melalui berbagai perangkat elektronik seperti televisi. Seseorang yang telah memiliki pengalaman merasa dirugikan atas dirinya, keluarganya, komunitas dan identitasnya, akan berusaha terus untuk melawan semua yang dianggap sebagai musuh. Mereka cenderung berkeliling meneliti premis-premis teologi sampai menemukan pendapat utuh yang memberikan izin dan kewenangan baginya untuk bertindak lebih jauh dan radikal. Pengalaman pahit itu sudah ada terlebih dahulu, argumen agama datang setelahnya, suatu bentuk penguatan moral untuk mendukung tindakan yang sudah ditetapkan dalam hati.¹²⁸ Tujuan kaum muda yang terjun ke dalam aksi gerakan sosial adalah menjadikan gerakan sosial Islam sebagai payung yang menaungi di bawah derasnya terpaan hujan demokrasi dan globalisasi. Dengan gerakan sosial, kelompok Tim Hisbah dapat kembali untuk menampilkan sebuah identitas dengan membawa ideologi Islamisme, dan berharap bahwa identitas tersebut mampu mengatasi berbagai persoalan sosial-politik yang sedang melanda bangsa Indonesia.

¹²⁸ Graham E. Fuller, *A World Without Islam*, (New York: Little, Brown and Company, 2010), hlm.168.

Motivasi tersebut selalu ada di dalam hati para anggota gerakan dari awal terjun ke dalam kelompok, hingga melakukan berbagai aksi-aksi radikal. Aksi-aksi radikal tersebut cenderung terjadi ketika kecemasan muncul dan kelompok-kelompok tertentu tidak yakin mengenai solusi dan kompromi yang pernah ditawarkan oleh tatanan politik di masa lalu. Kecemasan kelompok meningkat secara dramatis ketika melewati sebuah kondisi dan peluang yang lebih terbuka untuk merundingkan kembali penerimaan atau peminggiran identitas (eksklusi dan inklusi), Bertrand menyebut kondisi ini sebagai titik-titik kritis (*critical junctures*). Kondisi ini menganalisis sebuah fenomena radikal yang menjadi pilihan atas solusi dari permasalahan. Fenomena ini terjadi dengan melewati masa ketidakadilan, diskriminasi dan ketidakberuntungan yang dirasakan. Ketika tiba sebuah momentum yang tepat seperti kondisi perang, krisis ekonomi dan perubahan rezim politik yang lebih terbuka, para kelompok ini menawarkan identitasnya baik etnis ataupun agama untuk membangun kembali sebuah tatanan baru yang akan dimulai setelah melewati kondisi titik-titik kritis tersebut.¹²⁹

Keberanian dan keyakinan menawarkan identitas dengan mengekspresikannya di ruang publik melalui aksi-aksi radikal tersebut merupakan bagian dari konsekuensi kebebasan berekspresi dalam dunia demokrasi. Karena tidak ingin dianggap melakukan tindakan anarkis dan konyol, para pemuda tersebut mewacanakan bahwa aksi-aksi yang dilakukan merupakan tindakan yang sakral di bawah bendera Islam dan patut mendapatkan apresiasi publik.

¹²⁹ Jacques Bertrand, *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia*, (Cambridge University Press, 2004), hlm.21-24.

BAB IV

DEMOKRASI DAN SURVIVALITAS TIM HISBAH

A. Serangan Terhadap Logika Demokrasi

Tekad dan motivasi bergabung dengan Tim Hisbah memaksa kaum muda harus terus bertahan dan mempertahankan sebuah benteng kecil gerakan Islamis. Kelompok tersebut berusaha bertahan dari arus global yang menjadikan demokrasi sebagai pilihan politik *mainstream* beberapa negara di dunia. Usaha pertahanan tersebut tentunya menimbulkan konflik-konflik kecil dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Usaha-usaha resistensi terhadap demokrasi semacam ini lebih jelas terlihat sebagai fenomena yang berkaitan dengan situasi sosial-politik daripada fenomena pertentangan yang bersifat teologis. Faktanya, kelompok-kelompok tersebut banyak mengutarakan argumen-argumen politik yang dibalut dengan doktrin-doktrin teologi ketika berusaha melawan argumen demokrasi mengenai kebebasan, keadilan, kesetaraan dan partisipasi masyarakat. Usaha-usaha tersebut dilakukan tidak lain dan tidak bukan agar tetap mampu mengikuti arus demokrasi yang menyeret masyarakat ke dalam isu-isu demokrasi, dan secara tidak disadari sebenarnya juga ikut menyeret para kelompok Islamis ke dalam arus tersebut.

Para kelompok Islamis melawan demokrasi justru dengan argumen dan logika demokrasi. Terdapat lima fokus argumen yang sering digunakan oleh kelompok Islamis dalam menolak demokrasi. Upaya ini disebut oleh Masdar

Hilmy sebagai *"fighting democracy from within"*.¹³⁰ Pertama, argumen mereka tertuju pada klaim kebenaran. Para pendukung demokrasi sering menyebut anggota kelompok Islamis adalah kelompok yang radikal karena memaksakan kehendak dan berusaha melakukan klaim-klaim kebenaran pada kelompok mereka sendiri. Namun pada kenyataannya, para pendukung demokrasi tersebut juga dinilai terperosok dalam lubang yang sama, yaitu menganggap demokrasi sebagai suatu kebenaran dan menafikan sistem politik lainnya sebagaimana yang diusung kalangan Islamisme.

Argumen kedua adalah berkaitan dengan kebebasan berekspresi. Kelompok-kelompok Islamis berpendapat bahwa para pendukung demokrasi, khususnya negara-negara Barat seperti Amerika dan sekutunya, tidak konsisten dalam mengimplementasikan kebebasan berekspresi dalam kehidupan publik. Para Islamis merujuk pada larangan simbol-simbol agama yang mencolok di Prancis sebagai contoh nuansa yang tidak demokratis dalam sebuah negara yang mengusung demokrasi.

Ketiga, para Islamisme memusatkan argumen pertentangannya pada prinsip multikulturalisme dalam dunia demokrasi. Negara-negara Barat dianggap memaksa dalam melakukan nuansa multikulturalisme terhadap budaya minoritas. Mereka berpendapat di beberapa negara yang menganut sistem demokrasi, minoritas Muslim didesak untuk menyerahkan identitasnya dan dipaksa untuk mengasimilasikan kepada identitas mayoritas yang mereka persepsikan sebagai identitas Kristen. Hak-hak mayoritas dijunjung tinggi, sementara hak-hak

¹³⁰ Masdar Hilmy, *Islamism and Democracy In Indonesia, Piety and Pragmatism*, hlm. 154-158.

minoritas dilumpuhkan, wacana ini begitu kuat di negara-negara yang menganut sistem demokrasi.

Pendekatan pemilihan politik juga menjadi konsentrasi dalam argumen para Islamis. Dalam pandangan mereka, pendukung demokrasi telah menggunakan standar ganda dalam hal advokasi dan pembangunan demokrasi pada negara-negara Muslim. Pendirian demokrasi selalu dicirikan dengan institusionalisasi pilihan politik, yaitu pemilihan umum. Kaum Islamis memandang bahwa negara-negara Barat belum terlihat serius mengkampanyekan pemilihan umum pada negara-negara Muslim. Mereka terlihat takut atas kemenangan yang akan terjadi pada partai-partai berbasis syariat Islam yang diraih dari pemilihan umum. Mereka harus menerapkan standar selanjutnya, yaitu hasil pemilihan umum harus menguntungkan pihak Barat. Jika hasil pemilihan umum dianggap merugikan, maka Barat berusaha mengintervensi perjalanan politik negara Muslim tersebut sebagaimana yang terjadi di Al-Jazair dan Mesir.

Kelima, perhatian kalangan Islamisme tertuju pada argumentasi konsistensi negara demokrasi dalam implementasi prinsip sekularisme, di mana agama dan negara tidak dapat turut campur antara urusan satu dan lainnya. Agama menjadi suatu urusan privat, sementara negara menjadi urusan publik. Negara tidak harus ikut campur dalam urusan privat. Kaum Islamis berpendapat bahwa sebagian negara-negara yang menganut sistem demokrasi tidak konsekuen dalam hal ini. Salah satu contoh ketika negara turut campur dalam hal berbusana sebagai ekspresi keberagaman Muslim. Larangan perempuan Muslim mengenakan jilbab adalah salah satu kebijakan yang melanggar prinsip sekularisme tersebut. Contoh

lain juga terdapat di negara Amerika Serikat, di mana kebijakan publik sering terlihat merupakan hasil dari refleksi keagamaan umat Kristen Protestan, karenanya Jeffrie Geovanie menyebut bahwa Amerika Serikat bukan negara sekuler, tetapi lebih tampak sebagai negara Protestan, terlebih ketika Partai Republik menguasai Kongres.¹³¹

Bab ini akan berusaha menguraikan hal serupa dengan pandangan Masdar Hilmy bahwa kalangan Islamisme menggunakan logika demokrasi dalam merespon arus demokrasi di berbagai negara Muslim. Kelompok Tim Hisbah berusaha bertahan di tengah arus demokrasi bukan hanya dengan argumentasi dan logika-logika demokrasi, tetapi juga dengan menggunakan instrumen-instrumen demokrasi. Sub-bab berikutnya diawali dengan gambaran mengenai demokrasi yang dapat menjadi jebakan bagi keberlangsungan sistem demokrasi itu sendiri, hal ini berakibat pada penggunaan instrumen-instrumen demokrasi oleh beberapa kelompok untuk kepentingan yang non demokratis.

B. Pertumbuhan Demokrasi Indonesia dan Beberapa Jebakannya

Meskipun Indonesia telah dianggap menganut sistem demokrasi semenjak 1945, namun menjelaskan pertumbuhan demokrasi dalam konteks keindonesiaan merupakan tugas yang sangat rumit. Salah satu alasannya adalah Indonesia merupakan negara yang mana masyarakatnya berada pada dilema normatifitas; di satu sisi Indonesia adalah negara yang mencoba menganut sistem demokrasi dengan hukum positif, di sisi lain masyarakat Indonesia tidak ingin keluar dari wilayah normatifitas agama Islam sebagai agama mayoritas penduduk. Hal

¹³¹ Jeffrie Geovanie, *The Pluralism Project, Potret Pemilu, Demokrasi dan Islam di Amerika*. (Jakarta: Expose, 2013). hlm.202.

dilematis ini menjadikan masyarakat Indonesia harus berjuang keras mencari penyesuaian idiosinkratis antara demokrasi (yang masih dirasakan oleh masyarakat Indonesia sebagai produk Barat) dan Islam sebagai suatu keyakinan hidup. Oleh karena itu, perdebatan-perdebatan yang sering mencuat di publik adalah mengenai kesesuaian antara Islam dan demokrasi.

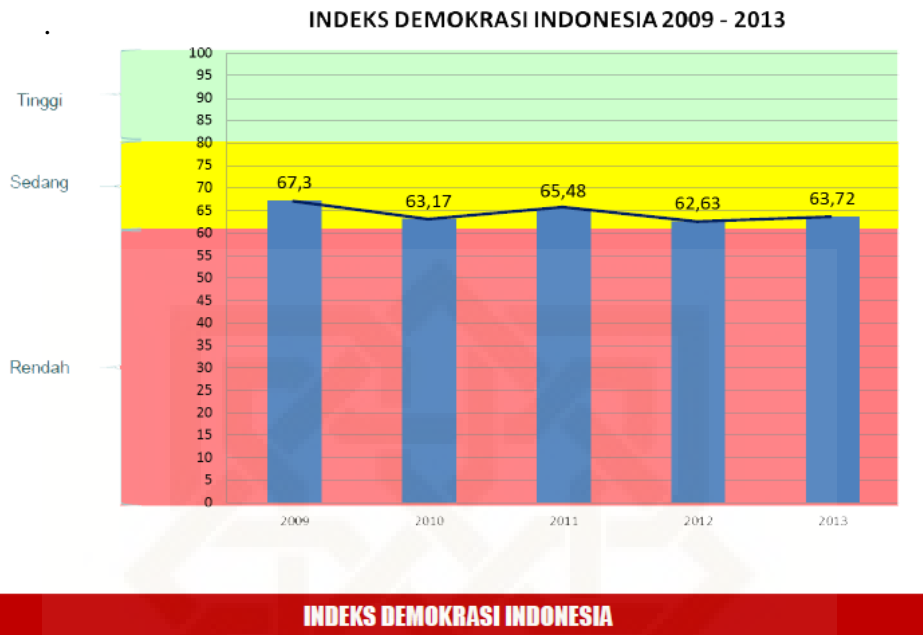
Demokrasi di Indonesia berjalan dengan sangat dinamis di usianya yang masih relatif muda, sehingga bagi beberapa kalangan, proses perjalanan ini sudah saatnya untuk diukur guna mengetahui pertumbuhannya selama ini. Data-data yang telah diolah oleh indikator demokrasi Indonesia (IDI) dapat menjadi acuan dalam melihat pertumbuhan demokrasi di Indonesia. Indikator Demokrasi Indonesia mengukur demokrasi berdasarkan tiga aspek: aspek kebebasan sipil, hak hak politik dan aspek kelembagaan demokrasi. Aspek kebebasan sipil biasanya selalu dikaitkan dengan kebebasan pengekspresian diri (*free self-expression*), kebebasan pergerakan dan kebebasan dari penangkapan yang sewenang-wenang. Aspek kebebasan sipil ini terdiri dari empat variabel kunci yang akan diukur: kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi. Aspek hak-hak politik (*political right*) meliputi: hak memilih dan dipilih, partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara aspek lembaga demokrasi memiliki lima variabel untuk diukur: pemilu yang bebas dan adil, peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), peran partai politik, peran birokrasi pemerintah daerah dan peradilan yang independen.

Dari semua indikator yang terkumpul pada tiap variabelnya, IDI mengemukakan tren demokrasi Indonesia mengalami angka fluktuatif sejak tahun 2009. Dalam capaian IDI 2012, kebebasan sipil mendapatkan nilai paling tinggi, kemudian diikuti oleh lembaga demokrasi yang mendapatkan poin sedang, serta aspek hak-hak politik yang masih tergolong rendah. Angka indeks kebebasan sipil masih jauh di atas kedua aspek lainnya (hak politik dan lembaga demokrasi). Namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, indeks kebebasan sipil alami penurunan sebesar 2,85 point. Penurunan diyakini sebagai akibat dari masih terdapatnya ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh unsur masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat (skor 43,94). Artinya, kebebasan berpendapat justru menghadapi tantangan lebih besar dari unsur masyarakat, bukan oleh pemerintah ataupun aparatur negara. Pada aspek hak-hak politik, maraknya demonstrasi dan unjuk rasa dengan kekerasan (skor 19,12) yang terjadi di berbagai belahan provinsi turut menyumbang rendahnya nilai indeks pada aspek tersebut.

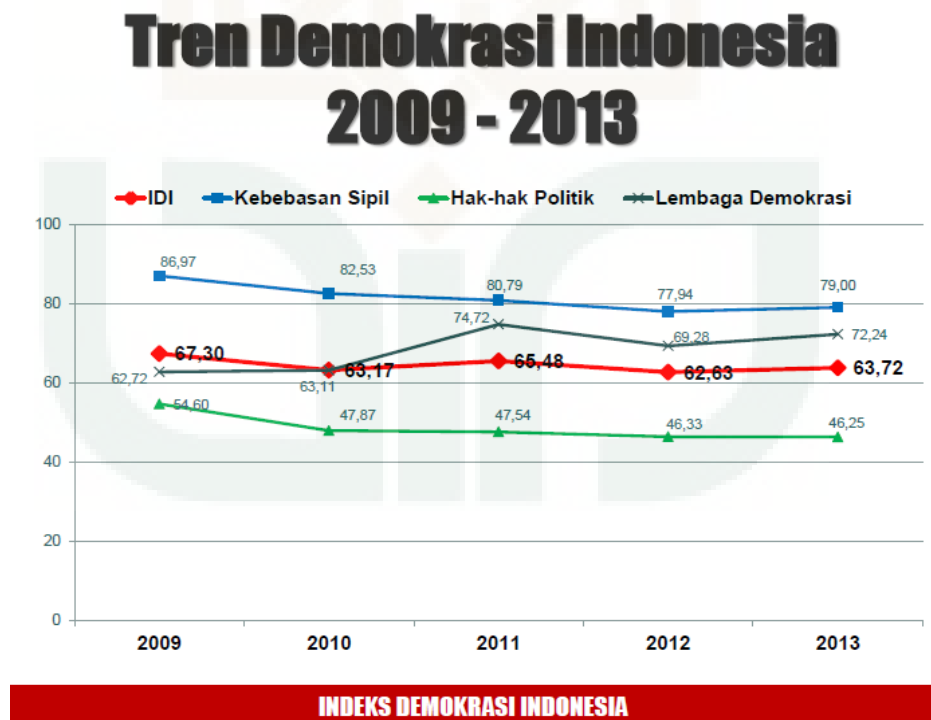
Secara umum, IDI menilai bahwa demokrasi Indonesia berada dalam kondisi sedang, di mana merupakan kondisi yang cukup aman untuk sebuah negara ketiga yang sedang dalam proses pertumbuhan demokrasi. Pengukuran terakhir IDI di Tahun 2013 menyatakan bahwa prosentase demokrasi Indonesia berada pada angka 63,72%, angka ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya, namun lebih rendah dari tahun 2009 ketika Indonesia dalam nuansa pemilihan umum.¹³²

¹³² Lihat Laporan Indeks Demokrasi Indonesia 2009-2013 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas), Badan Pusat Statistik (BPS) dan United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia. Laporan IDI juga dipresentasikan di Yogyakarta dengan judul

Gambar 1. Diagram Prosentasi Pertumbuhan Demokrasi Indonesia 2009-2013.



Gambar 2. Tren Pertumbuhan Demokrasi per variabel 2009-2013.



Beberapa variabel yang dinilai oleh IDI sangat sesuai dengan cita-cita perbaikan demokrasi yang telah dirumuskan dalam sebuah konferensi internasional oleh *International Commission of Jurist*. Dalam konferensi ini, tema yang ditekankan adalah mengenai aspek dinamis atas aturan hukum. Negara dengan sistem pemerintahan demokratis haruslah bertindak di bawah payung hukum yang ada dan telah disepakati bersama. Dikemukakan bahwa terdapat syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah *rule of law* yang meliputi enam hal:

1. Perlindungan konstitusional, dalam artian konstitusi harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin
2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
3. Pemilihan umum yang bebas
4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat
5. Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi
6. Pendidikan kewarganegaraan¹³³

Robert Dahl memberikan kritik di tengah arus pertumbuhan demokrasi tersebut. Menurut Dahl, masyarakat dengan berbagai ideologi yang berbeda lebih bersedia dipimpin dengan dengan sistem demokrasi karena terdapat tiga alasan yang meyakinkan. Pertama, demokrasi mempromosikan kebebasan individu dan kolektif, yang mana tidak dapat dipromosikan oleh pemerintahan otoriter. Kedua, demokrasi mempromosikan kemajuan manusia dengan menghargai keputusan

¹³³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm.176.

pribadi, kemandirian moral, hingga hak-hak individu selama keputusan pribadi tersebut bertanggung jawab atas keberlangsungan negara. Ketiga, demokrasi dapat meyakinkan masyarakat untuk melindungi kepentingannya sebagai warga negara seperti kepentingan-kepentingan ekonomi dan politik. Kepentingan tersebut terproteksi dengan janji keterbukaan dan kebebasan yang terus disuarakan oleh demokrasi. Namun, apabila promosi-promosi yang disuarakan dalam demokrasi mengalami hambatan, maka para elit politik harus bersiap-siap mendapat ancaman dari pihak-pihak yang dikecewakan oleh promosi-promosi demokrasi.¹³⁴

Tiga aspek yang telah menjadi karakteristik negara penganut sistem demokrasi dapat menjadi bumerang bagi kepentingan demokrasi itu sendiri. Hal ini dikarenakan ketiga aspek tersebut belum dapat dikelola dengan baik, sehingga kematangan dalam penerapan sistem demokrasi belum terjadi. Akibat yang timbul adalah aspek-aspek tersebut justru dijadikan oleh kelompok-kelompok penentang demokrasi sebagai senjata melawan negara. Apabila akibat tersebut tidak disadari, pelan tetapi pasti, demokrasi berada di ambang kekacauan sebagaimana fenomena politik di negara-negara Arab yang mencoba mengadopsi sistem demokrasi. Tesis mengenai ancaman demokrasi tersebut adalah tema kekhawatiran Graham E. Fuller dalam sebuah buku *Democracy Trap*. Menurut Fuller, demokrasi dapat menjadi sebuah jebakan ketika aspek-aspek yang menyertai demokrasi tersebut (seperti kebebasan, penjaminan hak-hak sipil dan politik, dan partisipasi masyarakat) menstimulasi kekacauan sosial-politik, akibat kesalah pahaman mengenai pertarungan politik. Kesalah pahaman ini terjadi terlebih setelah perang

¹³⁴ Robert Dahl, *Democracy and Its Critics*, (New Haven: Yale University Press, 1989), hlm. 311.

dingin berlalu, di mana demokrasi menjadikan dunia penuh dengan janji-janji kemajuan. Ketika kemajuan sebagaimana dijanjikan belum dapat diwujudkan, maka semua kelompok politik yang bersaing di tengah keterbukaan negara yang demokratis akan berusaha merebut kekuasaan justru untuk menerapkan solusi otoritarian.¹³⁵

1. Jebakan Kebebasan Sipil

Kebebasan sipil merupakan salah satu karakteristik dari pemerintahan demokratis. Kebebasan ini sebagai bentuk penghargaan negara atas hak-hak manusia yang dianggap sebagai masyarakat yang hidup dan ingin memajukan negara. Suatu negara belum dikatakan demokratis jika kebebasan sipil masih dalam belenggu negara. Indonesia mengalami kondisi semacam ini pada era Orde Baru, di mana tindakan-rindakan represif dipaksakan kepada warga negara dengan mengatas namakan stabilitas negara. Di era Reformasi, semua kalangan berusaha untuk membuka kebebasan tersebut. Praktik demokrasi tidak hanya dipandang dari institusi-institusi demokrasi yang telah hadir sebelumnya seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan pemilihan umum, yang dalam istilah William Case disebut demokrasi prosedural atau institusional. Kebebasan diharapkan menjadi tolak ukur untuk mewujudkan demokrasi secara substantif, karena kebebasan berkaitan dengan perilaku demokrasi (*democratic behaviour*). Praktik berdemokrasi haruslah merujuk pada dua standar antara institusi dan perilaku berdemokrasi. Case mengatakan demokrasi institusional

¹³⁵ Graham E. Fuller, *The Democracy Trap, Perils of The Post Cold War*, (New York: A Dutton Book, 1991), hlm.2-6.

semacam ini masih melanda negara-negara di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Case meyakini bahwa jika dalam jangka pendek, situasi politik di negara dengan demokrasi institusional tersebut cukup stabil, namun kualitas perilaku demokrasi masih cukup rendah dan dapat membahayakan dalam jangka panjang.¹³⁶

Ketika kebebasan sipil terbuka lebar, namun belum berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh sebagian kelompok, maka tentu akan melahirkan beberapa konflik sosial seperti radikalisme. Zachary Abuza memperkenalkan teori dalam membahas demokrasi dan radikalisme yang dikenal dengan garis linier. Teori garis linier menggambarkan bahwa gejala radikalisme berawal dari kebebasan yang terbuka dan demokratisasi di dunia Muslim, demokratisasi dan terbukanya kebebasan sipil ini menarik garis lurus hingga melahirkan kebangkitan Islam politik yang memanfaatkan kebebasan sipil tersebut. Islam politik ternyata tidak banyak melakukan perubahan signifikan atas kondisi sosial-politik, yang dinilai tidak lebih baik daripada kondisi sebelum memasuki nuansa demokrasi. Kondisi tersebut melahirkan kefrustasian masyarakat yang berujung pada aksi-aksi kekerasan atas nama agama. Salah satu akibat yang timbul atas terbukanya kebebasan sipil pada akhirnya akan mencederai demokrasi.¹³⁷

Kebebasan sipil adalah suatu lubang terbesar yang dapat menjadi jebakan bagi demokrasi itu sendiri. Sejak awal era Reformasi, Indonesia telah

¹³⁶ William Case, *Politics In Southeast Asia, Democracy or Less*, (New York: Curzon Press, 2002), hlm. 201.

¹³⁷ Zachary Abuza, *Political Islam and Violence in Indonesia*, (New York: Routledge, 2007), hlm. 95-96.

meratifikasi kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah diamandemen dengan menambahkan pasal mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) yang tertuang pada pasal 28, khususnya pada pasal 28 E ayat (3) bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Melalui suara kebebasan sipil yang terus diteriakkan oleh para pendukung demokrasi, beberapa kelompok Islamis seperti Tim Hisbah sebenarnya sangat diuntungkan. Para anggota Tim Hisbah mencoba memanfaatkan situasi kebebasan ini sebagai peluang untuk membentuk, konsolidasi dan mensosialisasikan identitas yang diperjuangkan. Kebebasan berkumpul ini sangat dirasakan oleh beberapa anggota Tim Hisbah, mereka sering menyangdingkan kondisi politik saat ini, dengan kondisi Orde Baru di mana para kelompok yang mendukung perjuangan dua aktor terdahulu; Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba’asyir sering dipantau dan dilumpuhkan gerakannya.¹³⁸ Sebagian mereka menilai bahwa dari segi keluasaan pergerakan dan penyebaran ideologi, rezim Reformasi lebih nyaman daripada rezim Orde Baru.

Tidak hanya dengan bebas untuk berkumpul, para anggota Tim Hisbah menggunakan kesempatan kebebasan sipil untuk mengemukakan pendapat di hadapan publik. Melalui logika ini, para anggota Tim Hisbah dan beberapa kelompok lain yang berada di bawah satu ideologi tanpa rasa takut menggunakan fasilitas-fasilitas publik untuk menyampaikan suara dan pendapat. Tim Hisbah dan beberapa kelompok Islamis di Solo sering

¹³⁸ Wawancara dengan beberapa orang Tim Hisbah, Semanggi Solo, Maret 2015.

menggunakan fasilitas publik seperti stadion dan masjid untuk menyuarakan pendapat dan kritiknya terhadap negara. Hal ini memang menjadi suatu konsekuensi yang harus diterima oleh negara demokratis ketika membuka peluang kebebasan. Negara harus siap menerima pendapat dari kelompok oposisi dan penentang kebijakan, bahkan dari penentang ideologi, selama para kelompok tersebut tidak melanggar hukum dengan melakukan tindakan-tindakan anarkis ataupun aksi-aksi separatis. Ketika para oposisi memanfaatkan suara kebebasan sipil hanya demi kepentingan kelompok, maka muncul berbagai lubang yang dapat menjadi jebakan di dalam dunia demokrasi.

2. Jebakan Hak Politik

Dalam hak-hak politik, terdapat dua hal yang perlu dilihat. Pertama, hak memilih dan dipilih, hal ini lebih berkaitan dengan pemilihan umum di mana semua warga mendapatkan porsi yang cukup. Kedua, partisipasi politik dan pengambilan keputusan dan pengawasan. Pada wilayah inilah berbagai permasalahan krusial yang terjadi di Indonesia. Keterlibatan masyarakat umumnya hanya terlihat ketika datangnya musim pemilihan umum, setelah itu, masyarakat seolah tidak memiliki suara. Permasalahan lain juga muncul dalam hubungan keterlibatan agama dalam kebijakan negara, sehingga berimplikasi terhadap kekerasan atas perbedaan agama dan keyakinan. Catatan serius datang dari SETARA Institut dan International NGO Forum On Indonesian Development (INFID), bahwa aksi pelanggaran terhadap kebebasan beragama

terus meningkat dari tahun 2007 sebanyak 216, hingga tahun 2012 menjadi 264 angka kekerasan.¹³⁹

Salah satu pemicu dari kekerasan atas nama agama ini adalah keterlibatan aktor-aktor agama (khususnya Islam) dalam mempengaruhi kebijakan publik. Ahmad Suaedy selaku koordinator Abdurrahman Wahid Centre for Interfaith Dialogue and Peace Universitas Indonesia (AW-Centre UI) mengambil contoh kasus Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan kekerasan agama di Indonesia. Suaedy menilai relasi antara pemerintah dengan MUI saat ini mengalami alterasi peran dan posisi. Suaedy menyampaikan, ketika zaman Orde Baru dikatakan bahwa *“MUI serve to the Government”*, di era Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden mencoba mengubah peran MUI menjadi *“from serve Government to serve ummah”*. Ketika masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, dengan berbagai fasilitas yang diberikan kepada MUI sebagai suatu lembaga yang dianggap memegang otoritas Islam, Suaedy menyimpulkan bahwa *“Government serve to MUI”*. Bagi Suaedy, negara sekarang tidak begitu kritis dengan pernyataan sesat berbagai golongan, dikarenakan negara belum berani memosisikan dirinya netral terhadap kebebasan dan berkeyakinan. Pemerintah masih larut dalam nuansa mayoritarian masyarakat Muslim di Indonesia. Dalam hal ini, MUI merasa sebagai pemegang otoritas Islam di Indonesia yang memiliki hak politik dalam menentukan kebijakan negara karena hidup dalam negara demokratis, sehingga

¹³⁹ Laporan Kebebasan Beragama di Indonesia 2010-2012, (Jakarta: INFID, 2013), hlm.3.

ketika terjadi kekacauan karena hubungan agama-negara, situasi ini kembali menjadi jebakan dalam dunia demokrasi.¹⁴⁰

Kecenderungan diangkatnya tendensi agama dalam wilayah politik dan pengambilan kebijakan berdampak pada kepercayaan diri kelompok-kelompok Islamis yang mengusung syariat Islam sebagai dasar negara. Dalam kasus Tim Hisbah, paling tidak terdapat dua dampak besar yang terlihat. Pertama, kelompok kecil tersebut merasa memiliki hak politik yang lebih dari warga negara lainnya (khususnya non Muslim) karena negara dianggap sangat membela kepentingan Islam. Dampak pertama ini membawa akibat kepada dampak kedua, yaitu anggapan keterlibatan negara dalam membela Islam tersebut seolah menjadi *doping* keberanian yang disuntikkan kepada para kelompok Islam radikal untuk bertindak.

Ketika sebuah kebijakan negara cenderung membela kepentingan Islam mayoritas, para kelompok Islam berani bertarung untuk mendukung kebijakan tersebut seperti kasus Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri terhadap pembatasan gerak Ahmadiyah di Indonesia. Wacana paling terbaru adalah tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai minuman keras (miras). Menanggapi isu ini, Beberapa kelompok Islam radikal berniat melakukan orasi di depan DPRD Solo menolak RUU tentang miras. Menurut para anggota kelompok Islam tersebut, peraturan tentang miras bukanlah peraturan Islam. Peraturan tersebut hanya pembatasan miras, bukan pelarangan, dan mereka beranggapan bahwa *madharat* yang ditimbulkan masih lebih banyak daripada

¹⁴⁰ Ahmad Suaedy, "Mainstreaming Intoleransi dan Agenda Pemerintahan Baru", Paper Diskusi Terbuka, dipresentasikan di Yayasan LkiS, Yogyakarta, LkiS, Maret 2014.

manfaatnya. Beberapa kelompok Islam di Solo bersuara lantang dalam menyuarkan aspirasi guna peneguhan identitas mereka sebagai pembela Islam. Melakukan demonstrasi adalah hak politik bagi setiap warga negara, namun sikap para Islamis yang terkesan tidak ingin berkompromi dalam menyuarkan hak politiknya menjadi sesuatu yang pahit dalam berdemokrasi. Ketika logika demokrasi digunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak demokratis, maka jebakan demokrasi yang disebutkan oleh Fuller telah terpasang besar di tengah jalan demokrasi Indonesia.

3. Jebakan lembaga atau Institusi Demokrasi

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, kebebasan sipil dan hak-hak politik sebagai pilar dari konsep demokrasi, tidak mungkin dapat teraktualisasi secara maksimal tanpa didukung oleh beberapa lembaga demokrasi. Dilihat dari perkembangannya, sebenarnya Indonesia telah lebih dahulu memiliki institusi-institusi demokrasi seperti DPR dan MPR, dan kemudian ketika reformasi ditambah dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Semua institusi tersebut menggambarkan sistem demokrasi secara simbolik di mana masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan suara-suara politik.

Para ahli sering membagi institusi tersebut menjadi institusi formal dan informal dalam rancang bangun institusi demokrasi. Institusi formal adalah institusi atau lembaga sebagaimana disebutkan pada paragraf di atas. Dalam definisi umum, institusi adalah peraturan dan prosedur yang tersusun dari interaksi sosial dengan meletakkan aktor-aktor, dan memaksa agar perilaku aktor tersebut sesuai dengan peraturan dan prosedur yang telah disusun

bersama pemangku kepentingan. Sedangkan institusi informal yang diutarakan oleh Helmke dan Levitsky adalah peraturan dan prosedur yang tersebar secara sosial, yang diciptakan, dikomunikasikan, dan dikuatkan di luar saluran dukungan resmi pemerintah. Bentuk dari institusi informal tersebut sangat beragam, dapat berupa Non Government Organization (NGO), perkumpulan, perserikatan yang berbasis tribal ataupun ideologi agama, identitas, tradisi kultural dan lain-lain.¹⁴¹ Definisi semacam ini tentu berkaitan dengan kebebasan sipil, di mana setiap warga negara berhak untuk berkumpul dan berserikat sesuai identitas yang diteguhkannya. Perkumpulan-perkumpulan tersebut di satu sisi dapat menjadi sinyal baik bagi kedewasaan demokrasi. Namun di sisi lain, institusi informal yang terbentuk karena proses kekecewaan terhadap demokrasi justru dapat membahayakan dan melukai proses demokrasi.

Munculnya jebakan institusi formal dapat diawali dari ketertarikan publik terhadap urusan politik, namun pada saat yang bersamaan timbul rasa ketidakpercayaan publik terhadap institusi demokrasi, termasuk ketidakpercayaan kepada putusan pengadilan. Pemberitaan akan bobroknnya institusi demokrasi yang terus disuarakan media massa membuat publik mempertanyakan ulang kredibilitas aktor yang memangku jabatan pada institusi publik tersebut. Bahkan tingkat ketidakpercayaan yang lebih tinggi bukan lagi ditujukan kepada pemangku jabatan, namun kepada institusi tersebut. Kombinasi antara ketertarikan terhadap politik dan ketidakpercayaan terhadap institusi politik

¹⁴¹ Gretchen Helmke dan Steven Levitsky (ed), *Informal Institution and Democracy, Lesson From Latin America*. (Maryland: John Hopkins University Press, 2006), hlm.5-6.

akan melahirkan warga negara yang teralineasi.¹⁴² Pada dasarnya, para anggota Islamisme sangat tertarik pada urusan-urusan politik. Ketertarikan tersebut dapat dilihat dari wacana yang terus mereka suarakan sebenarnya adalah wacana beraroma politik dan pemerintahan, hanya saja dengan menggunakan bahasa politik Islam abad tengah; khalifah (penguasa politik), khilafah (institusi politik), syari'ah (konstitusi negara dan hukum-hukum atau undang-undang turunan), Tauhid (identitas universal warga negara) dan lain sebagainya.

Ketidakpercayaan ini merangsang para Islamis untuk membentuk institusi tandingan atau hanya sekedar bertindak secara kolektif guna memaksa kebijakan dengan ancaman kekerasan. Sebagai contoh adalah kasus gugatan penetapan presiden nomor1/PNPS 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, yang kemudian diangkat menjadi UU pada tahun 1969. Pada tahun 2009, beberapa kalangan melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan secara individu mencoba untuk menggugat UU PNPS ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945 mengenai kebebasan beragama. Sidang ini dinilai istimewa karena terdapat 11 pemohon (7 di antaranya LSM dan 4 lainnya perorangan), menghadirkan 60 pakar ataupun saksi ahli lebih dari 56 pengacara. Sidang ini juga dipenuhi oleh beberapa massa Islam yang berkumpul di Balkon gedung Mahkamah Konstitusi yang mengepalkan tangan, berteriak, memekikkan kalimat takbir menggambarkan sebuah ancaman kepada pihak-pihak terkait apabila UU

¹⁴² Saiful Mujani, *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*, (Jakarta: Gramedia, 2007), hlm. 200.

penodaan agama ini dihapus.¹⁴³ Dengan demikian, para Islamis memaksakan jiwa mayoritarianisme dalam negara demokrasi justru dengan cara-cara dan prinsip demokrasi.

Melalui fenomena di atas, dapat dilihat bahwa sebuah institusi atau lembaga yang hanya menjadi simbol demokrasi, tetapi tidak menunjukkan komitmen yang kuat atas terselenggaranya pemerintahan yang baik akan membuat beberapa lubang. Lubang-lubang tersebut kemudian dapat menjadi jebakan bagi jalannya demokrasi di dalam sebuah negara, yang digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu yang ingin berkuasa secara otoriter. Jebakan demokrasi secara tidak disadari telah terjadi di berbagai dunia Muslim. Merujuk pada Azyumardi Azra, seorang intelektual Muslim yang sering menggunakan teori jebakan demokrasi untuk menganalisis persoalan politik yang melanda negara-negara Arab. Pembukaan demokrasi di Tunisia dan Mesir menghasilkan rezim-rezim Islamis. Mengikuti teori logika jebakan demokrasi, ketika kekuatan politik Islamis memenangkan Pemilu, kemudian menggunakan demokrasi untuk kepentingan dan agenda mereka sendiri. Hasilnya, ketidakpuasan terus meningkat yang berujung pada pelengseran Presiden Mursi di Mesir untuk digantikan pemerintahan bentukan militer.¹⁴⁴

¹⁴³ The Wahid Institute, *Jurnal Nawala*, edisi No 11/TH.IV November 2009 – Februari 2010.

¹⁴⁴ Lihat tulisan Azyumardi Azra di berbagai media: “Jebakan Demokrasi” dalam: <http://nasional.kompas.com/read/2012/03/10/02124097/Jebakan.Demokrasi>, diakses pada 28 April 2015; “Demokrasi: Pelajaran Reflektif” dalam <http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/14/03/13/n2bn5x-demokrasi-pelajaran-reflektif>, diakses pada 28 April 2015.

C. Gerakan Islamis Di Tengah Arus Demokrasi

Tidak dapat dipungkiri bahwa kebebasan sipil, hak politik setiap warga, dan lembaga-lembaga demokrasi yang independen adalah karakter khusus pada sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. Ketiga aspek tersebut ibarat aliran sungai yang harus dilalui oleh setiap warga negara ketika hidup di dalam arus demokrasi. Beberapa kelompok seperti Tim Hisbah berusaha melawan arus demokrasi karena kekhawatiran dan ketakutan akan masa depan yang terus dihantam bebatuan di dalam arus tersebut. Upaya melawan arus yang terus dilakukan oleh Tim Hisbah sebenarnya adalah sebuah usaha mengaktualisasikan diri dan memposisikan ulang sebuah identitas yang terbelenggu selama masa pemerintahan otoriter dan perlawanan terhadap stigmatisasi teroris. Pada akhirnya, Tim Hisbah melakukan ekspansi di tengah lapisan masyarakat yang memiliki kefrustasian dan kekecewaan karena kemampuan yang terbatas dalam menghadapi tantangan situasi demokrasi dan globalisasi yang semakin dinamis.

Ekspansi Tim Hisbah dapat terwujud karena proses pertumbuhan demokrasi dan globalisasi yang membuka hambatan-hambatan partisipasi masyarakat luas. Tim Hisbah lahir sebagai konsekuensi atas keterbukaan dari proses demokratisasi tersebut, oleh karena itu mereka mengaktualisasikan diri dengan cara-cara dan perangkat-perangkat yang disesuaikan dengan nuansa demokrasi, seperti membentuk gerakan sosial sebagai aktualisasi kebebasan sipil, membangun jejaring massa, keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan, hingga kritik terhadap institusi sebagai proses *check and balances*. Pada konteks inilah, Tim Hisbah hadir di permukaan untuk berusaha merebut ruang publik

dengan memanfaatkan kesempatan politik yang terus berubah. Namun, dalam berbagai hal kelompok-kelompok semacam Tim Hisbah sekaligus meletakkan ancaman yang mengingkari prinsip demokrasi seperti HAM, pluralisme dan multikulturalisme yang tumbuh seiring dengan proses pertumbuhan demokrasi. Kembali mengutip Barber, bahwa gerak langkah ke depan terkadang dikejutkan dengan langkah mundur ke belakang secara tiba-tiba. Dalam sejarah peneguhan identitas melawan globalisasi di dalam era yang demokratis, “jihad” tidak hanya memberontak melawan demokrasi dan globalisasi (McWorld), tetapi juga bersekongkol dengannya. Sementara itu, demokrasi dan globalisasi tidak hanya membahayakan munculnya aksi-aksi jihad, tetapi juga turut membentuk dan menggerakkan jihad. Jihad dan McWorld saling berlawanan namun juga sekaligus saling membutuhkan.¹⁴⁵

1. Membentuk Gerakan Sosial: Aktualisasi Kebebasan Sipil

Dalam kurang lebih satu dekade setelah era Reformasi dimulai, publik banyak disuguhkan dengan berbagai macam gerakan-gerakan Islam yang dipandang radikal, anggota yang ikut dalam gerakan tersebut menolak sistem pemerintahan demokratis yang telah dianut oleh Indonesia. Fenomena ini banyak melahirkan sebuah pertanyaan di masyarakat seputar, apa tuntutan dari gerakan Islam? Mengubah suatu negara menjadi sebuah Negara Islam dan mengganti UUD Republik Indonesia menjadi al-Quran dan as-Sunnah? Mengapa? Sementara pertanyaan tersebut belum dapat dijawab dengan baik, publik kembali disuguhkan dengan semacam aksi teatrical lainnya berupa

¹⁴⁵ Benjamin R. Barber, *Jihad vs McWorld, Terrorism's Challenge to Democracy*, (New York: Ballantine Books, cet. 2001), hlm. 4.

pengejaran, penangkapan, penahanan hingga pemberlakuan hukuman mati terhadap aktor-aktor yang dianggap sebagai sumber teror. Di tahun-tahun berikutnya, publik masih disugahi dengan maraknya gerakan-gerakan Islam dengan kriteria yang sama, bahkan dalam jumlah yang lebih banyak. Hukuman mati bagi para aktor gerakan ternyata tidak membuat gerakan Islam padam. Organisasi dan gerakan baru kembali dideklarasikan secara swasta oleh orang-orang yang tertarik dengan wacana gerakan Islamis.

Pembacaan mengenai gerakan Islam seperti Tim Hisbah yang selama ini banyak terdengar masih pada asumsi bahwa kemunculan gerakan Islam adalah akibat dari suatu kesalahan dalam penafsiran ayat, ditambah dengan rasa frustrasi akibat kemiskinan dan ketidakpahaman akan adanya interpretasi agama yang lebih plural. Pembacaan yang simplistik semacam ini akan mengarahkan kita pada kesalahan dalam menganalisis sebuah persoalan yang akan dipecahkan dan ditemukan solusinya. Meskipun kecil dan berskala lokal, Tim Hisbah bukanlah sebuah gerakan brutal dan irasional yang terbentuk karena provokasi dari aktor-aktor tertentu dan bergerak tanpa ada kesadaran politik. Gerakan ini adalah gerakan rasional yang sebenarnya sadar akan politik, kesadaran akan nuansa politik yang terbuka membuat mereka menggunakan gerakan sosial sebagai bagian dari strategi untuk tetap bertahan di tengah derasnya arus demokrasi.

Tim Hisbah yang terpengaruh oleh nuansa demokrasi sebenarnya bertendensi sebagai gerakan dengan tujuan memiliki kontrol atas lembaga pemerintahan, perubahan sosial, dan memiliki ruang-ruang pertarungan yang

sah di hadapan publik. Esposito dan Voll mengatakan bahwa dalam era keterbukaan, di mana setiap orang berhak untuk membuka dirinya sesuai identitas dan ideologi yang dianutnya, memunculkan kuatnya tuntutan terhadap partisipasi masyarakat dan mengentalnya identitas-identitas komunal. Dua fenomena tersebut saling berkaitan, dan ini menunjukkan upaya individu dan kelompok untuk melakukan tindakan yang mereka anggap sebagai kontrol atas berbagai perkembangan besar yang terjadi di dalam suatu wilayah. Gerakan-gerakan yang hadir dalam era keterbukaan ini sebenarnya memiliki arah kepada kontrol perkembangan tersebut, sekaligus bertujuan sebagai gerakan pemberdayaan dan identitas.¹⁴⁶

Tim Hisbah sebagai salah satu gerakan radikal yang berkembang di Solo, bukanlah sekelompok orang yang berkumpul hanya karena kesalahan interpretasi agama. Meskipun para anggota Tim Hisbah seringkali bertindak atas nama agama dengan cara-cara yang melukai demokrasi, bukan berarti hal tersebut dapat dengan mudah digeneralisir bahwa kelompok seperti Tim Hisbah adalah musuh abadi bagi demokrasi karena interpretasi agama yang terus menyuarakan penolakan atas demokrasi. Dengan membentuk sebuah gerakan sosial, mereka pada dasarnya berpegang pada salah satu prinsip demokrasi, yaitu kebebasan sipil.

Semangat anggota dan simpatisan Tim Hisbah dalam membentuk dan terjun untuk sebuah kemajuan gerakan sosial, adalah semangat dalam mempertahankan kebebasan sipil yang memberi kesempatan setiap warga

¹⁴⁶ John L. Esposito dan John O. Voll, *Demokrasi di Negara-Negara Muslim; Problem dan Prospek*, terj. Rahmani Astuti, (Bandung: Penerbit Mizan, 1999), hlm. 13.

negara untuk berkumpul dan berserikat. Melalui gerakan sosial, Tim Hisbah juga mencoba untuk membangun masyarakat sipil (*civil society*), melakukan aktifitas yang sama seperti masyarakat sipil lainnya untuk membebaskan diri dari cengkraman kekuasaan otoriter. Berhubungan dengan masyarakat sipil ini, Gellner mengatakan, karena tidak dapat menjamin dan meyakinkan beberapa pihak akan terlaksananya kehendak Tuhan di atas bumi, mereka kemudian memaksakan kehendak Tuhan yang dimulai pada diri mereka sendiri dengan komunitas-komunitas yang sebenarnya mencerminkan sebuah masyarakat sipil.¹⁴⁷

2. Membangun Jejaring dan Demonstrasi Massa: Aktualisasi Hak Berpolitik

Dengan semangat politik yang dimiliki, tanpa diiringi dengan kapasitas yang sesuai dengan tuntutan globalisasi, para kaum muda tersebut terpedal dari arena pertarungan di dalam institusi formal. Di luar pertarungan itulah mereka tergabung dalam institusi informal berbentuk gerakan sosial. melalui gerakan tersebut mereka mencoba kembali mengkomunikasikan dan menyuarakan identitas kepada orang di sekitarnya, namun dalam bahasa berbeda dan dengan semangat yang diklaim berasal dari suatu agama yang sakral.

para aktivis mencoba bertahan di dalam arus demokrasi dengan memanfaatkan jejaring yang luas di kawasan Solo dan sekitarnya. Jaringan mereka terbangun dari masjid-masjid di kawasan padat penduduk, yang mana masjid tersebut jarang diperhatikan oleh warga setempat sehingga minim

¹⁴⁷ Ernest Gellner, *Membangun Masyarakat Sipil: Prasyarat Menuju Kebebasan*, terj. Ilyas Hasan, (Bandung: Mizan 1995.), hlm. 53.

kegiatan keagamaan selain shalat berjamaah. Dengan kosongnya masjid di beberapa sudut kota Solo, menjadi satu tantangan bagi kelompok Tim Hisbah untuk lebih mewarnai masjid dengan kegiatan-kegiatan yang meniupkan ruh ideologis, mereka mengawali kegiatan ideologis tersebut dengan mengadakan kajian-kajian rutin di masjid tersebut. Pengajian yang diadakan terbuka untuk umum, namun para ustadz yang mengisi kajian rutin telah ditentukan sesuai dengan ideologi yang diyakini. Tim Hisbah menjadikan tujuh masjid sebagai tempat untuk membangun jaringan sosial. Sebagian adalah masjid besar dan sebagainya lagi kecil (mushalla) yang terletak disudut-sudut gang ataupun permukiman warga.

Para ikhwan tersebut tidak menemukan kesulitan yang berarti dalam mengumpulkan jaringan dan memobilisasi massa untuk melakukan sebuah aksi, di era globalisasi dan modernisasi seperti saat ini. Mereka mengikis secara perlahan hubungan sosial dan hanya mengintensifkan hubungan dengan kelompok yang memiliki ideologi yang sama. Para antropolog telah banyak membahas mengenai globalisasi dan perangkat penghubung antara beberapa batasan-batasan dan elemen-elemen masyarakat. Barber menyebut salah satunya adalah keniscayaan teknologi. Barber juga mengatakan bahwa ketika suatu komunitas menuntut kekuatan dengan cara-cara tribal dan fundamental (Barber menyebut dengan Jihad), tetapi melalui keniscayaan perangkat globalisasi, maka asumsi yang muncul adalah jihad via globalisasi, dan bukan jihad versus globalisasi atau demokrasi. Globalisasi dan demokrasi turut

melayani bahkan membungkus dan memasarkan jihad.¹⁴⁸ Appadurai juga menyebut *technoscapes*, yaitu pembawa perubahan relasi antar manusia dalam globalisasi.¹⁴⁹ Teknologi mampu membuat batasan-batasan antar kelompok, dan sekaligus menyatukan batasan lainnya. Dengan teknologi *smartphone*, anggota Tim Hisbah membuat jejaring online, membatasi diri dari lingkup sosial di luar ideologi mereka dalam sebuah grup percakapan pada aplikasi Whatsapp. Mereka berkumpul, berbagi informasi, belajar, dan berkeluh kesah secara digital. Bahkan dengan sangat mudah mobilisasi dan pengumpulan jaringan dilakukan melalui media tersebut.

Sebelum menjalankan aksinya, para ikhwan selalu berkoordinasi dengan yang beberapa kelompok lainnya. Selain itu, masyarakat awam di luar anggota atau simpatisan juga ikut dilibatkan dalam wacana aksi-aksi yang akan dilakukan. Ketika beberapa masyarakat menyatakan dukungannya, maka kelompok-kelompok Islamis tersebut dengan mudah menggeneralisir bahwa aksi yang dilakukannya telah mendapat dukungan dari masyarakat luas. Wacana ini diperkuat dengan tulisan-tulisan di berbagai media cetak lokal, seperti buletin Aitam dan majalah Koran Panji yang disebar rutin pada hari Jum'at dan dapat dikonsumsi oleh masyarakat secara gratis. Proses mobilisasi yang begitu mudah tersebut mempercepat gerak mereka dalam melancarkan suatu aksi. Mereka berkumpul dengan cepat di sebuah tempat yang telah ditentukan untuk melancarkan aksi-aksi *sweeping* atau aksi politik lain

¹⁴⁸ Benjamin R. Barber, *Jihad Vs McWorld*, hlm. 155-157.

¹⁴⁹ Arjun Appadurai, "Disjuncture and Difference in The Global Cultural Economy," dalam jurnal terbitan *Theory, Culture and Society Centre*: Nottingham Trent University, Vol 7, 1990, hlm. 297.

misalnya demonstrasi massa memaksa penolakan rancangan peraturan daerah (Raperda) mengenai minuman keras. Dalam kasus demonstrasi ini, puluhan Ormas Islam melakukan *long march* dimulai dari Masjid Agung Solo menuju Gedung DPRD dan rumah dinas Walikota Solo. Aksi beberapa kelompok ini ditanggapi secara politis oleh Walikota Solo Hadi Rudyatmo. Walikota mengatakan bahwa meskipun berbeda dalam keyakinan agama, namun ia juga memiliki pendapat yang sama mengenai aspirasi kelompok-kelompok Islam Solo dalam penolakan raperda minuman keras, Walikota menunjukkan bahwa dirinya bukanlah sosok Walikota yang pro terhadap minuman keras.¹⁵⁰ Sikap politis Walikota ini semakin dianggap memperteguh identitas Tim Hisbah bahwa kelompoknya adalah pasukan terdepan dalam membela Islam sebagai suatu agama yang diyakini mengedepankan moral. Dengan demikian, Tim Hisbah berkeyakinan wacana-wacana Islam dapat dengan mudah mempengaruhi kebijakan pemerintahan dengan cara pengerahan massa kelompok Islamis di Solo.

Jaringan yang mereka bentuk bukan hanya pada kelompok-kelompok informal. Beberapa Islamis Solo mencoba berdialog dengan demokrasi melalui pendirian suatu wadah yang menaungi kelompok-kelompok kecil seperti Tim Hisbah. Misalnya adalah Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS). Dewan Syariah Kota Surakarta dibentuk dan dideklarasikan pada tanggal 8 Maret 2013 di masjid Mujahidin Banyuanyar Solo dan diketuai oleh Mu'inudinillah Basri, seorang Doktor di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Lembaga ini

¹⁵⁰ "Walikota Tolak Perda Miras", <https://www.islampos.com/walikota-solo-tolak-perda-miras-99924/>. Diakses pada 21 April 2015. Lihat Pula harian kabar Solo Pos edisi 29 Februari 2014.

merupakan wadah koordinasi semua kelompok laskar yang ada di Solo. Seakan mengesampingkan Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga keagamaan yang dibentuk Negara secara politis,¹⁵¹ beberapa gerakan Islamis di Solo lebih merujuk kepada DSKS daripada MUI. Majelis Ulama Indonesia digunakan sebagai kekuatan pendukung agar suara para kelompok Muslim terkesan memiliki dukungan dari negara, dan lebih memudahkan proses berdialog dengan pemerintah mengenai urusan Islam. Dalam setiap aksi, Tim Hisbah dan kelompok Islam di Solo lainnya selalu melibatkan DSKS dan MUI. Dewan Syariah Kota Surakarta sendiri memiliki jaringan yang melibatkan beberapa profesor dari beberapa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dan swasta (PTKIN dan PTKIS) di Solo, seperti IAIN Surakarta dan UMS.¹⁵²

Jaringan lain yang digunakan oleh Tim Hisbah adalah Tim Pengacara Muslim (TPM). Sebenarnya TPM bermula dari kasus Ja'far Umar Thalib, komandan Laskar Jihad Ahlussunnah wal Jama'ah ketika membela umat Islam yang dianggap menjadi korban ketidakadilan hukum pada peristiwa berdarah di Ambon Januari 1999.¹⁵³

Tim Pengacara Muslim mengawali pandangannya bahwa Indonesia adalah termasuk target propaganda yang salah dan tidak adil oleh Negara-Negara Barat, khususnya Amerika Serikat. Hal ini mereka yakini karena

¹⁵¹ Berbagai literatur buku dan penelitian tentang MUI dapat dibaca pada karya Ahmad Suaedy, "Mainstreaming Intoleransi dan Agenda Pemerintahan Baru" Paper, LkiS, Maret, 2014; Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h221-227.

¹⁵² Profil DSKS dapat diakses melalui situs resmi Dewan Syariah Kota Surakarta <http://dewansyariah.com/>. Diakses pada tanggal 29 April 2015.

¹⁵³ Mengenai TPM Pusat, dapat diakses langsung di <http://tpmpusat.weebly.com/tentang-tpm.html>, diakses pada tanggal 30 April 2015.

Indonesia adalah negara Muslim terbesar yang ditakuti apabila Muslim di negara tersebut bangkit dan bersatu. Para aktivis TPM menganggap bahwa penangkapan beberapa aktivis Islam adalah bagian dari konspirasi yang dilancarkan beberapa pihak, oleh karena itu menurut mereka, perlu ada lembaga untuk membantu melawan ketidakadilan dan perbuatan-perbuatan konspiratif tersebut. Mereka mengaku terpanggil untuk membela hak-hak hukum ketika diminta bantuannya oleh para tersangka teroris maupun tersangka tindakan anarkisme. Jumlah kasus yang pernah ditangani TPM hingga kini diklaim mencapai lebih dari 200 kasus yang melibatkan isu-isu kekerasan yang menimpa aktivis Muslim.

Tim Pengacara Muslim menganggap institusinya bekerja secara profesional sebagai Penasihat Hukum untuk memastikan para terdakwa mendapat perlakuan proses hukum yang benar (*The due process of law*). TPM mengklaim selalu mendorong penerapan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) secara benar dan konsekuen serta penghormatan terhadap HAM para terdakwa.

Sedangkan di Solo, TPM berawal dari berdirinya organisasi bernama Front Perlawanan Penculikan (FPP). Organisasi ini didirikan oleh seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta bernama Kholid, dibantu dengan beberapa kawan lainnya pada tahun 2003 di Kota Solo, Jawa Tengah. FPP sering bergerak membela dan mendampingi hak-hak hukum para korban penculikan dan penangkapan oleh Densus 88 yang menurut kalangan Islamisme di Solo hanyalah tuduhan tidak berdasar dituduh terkait jaringan

teroris pasca Bom Bali I dan Bom Bali II di Solo dan sekitarnya. Merespon hal tersebut Kholid bersama beberapa temannya mendirikan posko pengaduan dan bantuan hukum bagi para keluarga korban penculikan dan penangkapan yang dilakukan oleh Densus 88. Posko tersebut tidak hanya memberikan bantuan dan perlindungan hukum bagi para korban penculikan namun mereka juga melakukan penggalangan dana masyarakat untuk membantu para keluarga korban penculikan dan penangkapan densus 88. Penggalangan dana tersebut memang tidak sia-sia dilakukan oleh Kholid dan kawan-kawan karena setiap harinya bisa mengumpulkan uang sekitar dua juta rupiah. Agar usaha pembelaan para korban penculikan dan penangkapan terhadap para aktivis masjid, santri, dan aktivis ormas Islam dapat berjalan secara sistematis dan terorganisir, maka dibentuklah FPP sebagai perwujudan lembaga yang terorganisir. Setelah lama berjalan, perlu organisasi yang lebih mapan dan memiliki jaringan kerja yang kuat agar dapat membela para aktivis Islam. Problem tersebut membuat kholid terpacu untuk melebarkan jaringan kerja, dengan bergabung kepada Tim Pembela Muslim.¹⁵⁴

Tim Pengacara Muslim dilibatkan ketika beberapa anggota Tim Hisbah tersandung kasus yang melanggar hukum. Kasus terbaru adalah kasus kawanan ikhwan yang terlibat dalam aksi *sweeping* para pemabuk di wilayah Baturono, Solo pada Maret 2015. Aksi ini melibatkan lima ikhwan yang pada akhirnya mendekam di tahanan Polresta Surakarta. Dalam kejadian ini, para ikhwan Tim Hisbah tersebut dilaporkan oleh beberapa orang yang merasa menjadi korban

¹⁵⁴ Muh. Zuhdan, "Gerakan Advokasi Kelompok Islam," Workshop Penyusunan Modul HAM, Resolusi Konflik, dan Gerakan Sosial, Pusat Studi HAM (PUSHAM) UII, Desember 2008, hlm. 5.

dengan tuduhan kekerasan fisik. Kurang dari 24 jam, para ikhwan yang terlibat kasus tersebut diringkus aparat kepolisian dan ditahan selama kurang lebih satu minggu. Selama masa tahanan, para ikhwan lainnya menghubungi TPM untuk membantu menjadi pengacara di pengadilan.

Beberapa orang yang berada dalam lingkaran gerakan Islamis Solo bahkan mengatakan telah melahirkan sebuah semangat baru dalam pembelaan lima orang laskar Hisbah yang ditahan pihak kepolisian. Karena kejadian tersebut, mereka membentuk kelompok advokasi baru yang dinamakan Tim Advokasi Umat (TAU). Tim gabungan ini terdiri dari 12 orang sarjana yang telah memiliki sertifikat sebagai advokat dan diketuai oleh M. Kalono, aktor lama dalam gerakan Islamis di Solo. Dalam kasus lima tersangka dari Tim Hisbah, mereka menuntut keadilan kepada dua orang yaitu Agus Junaedi dan Rudi yang sebenarnya dianggap tidak terlibat dalam aksi kekerasan, mereka berdua dianggap hanya mengunjungi lokasi setelah peristiwa *sweeping* terjadi.¹⁵⁵

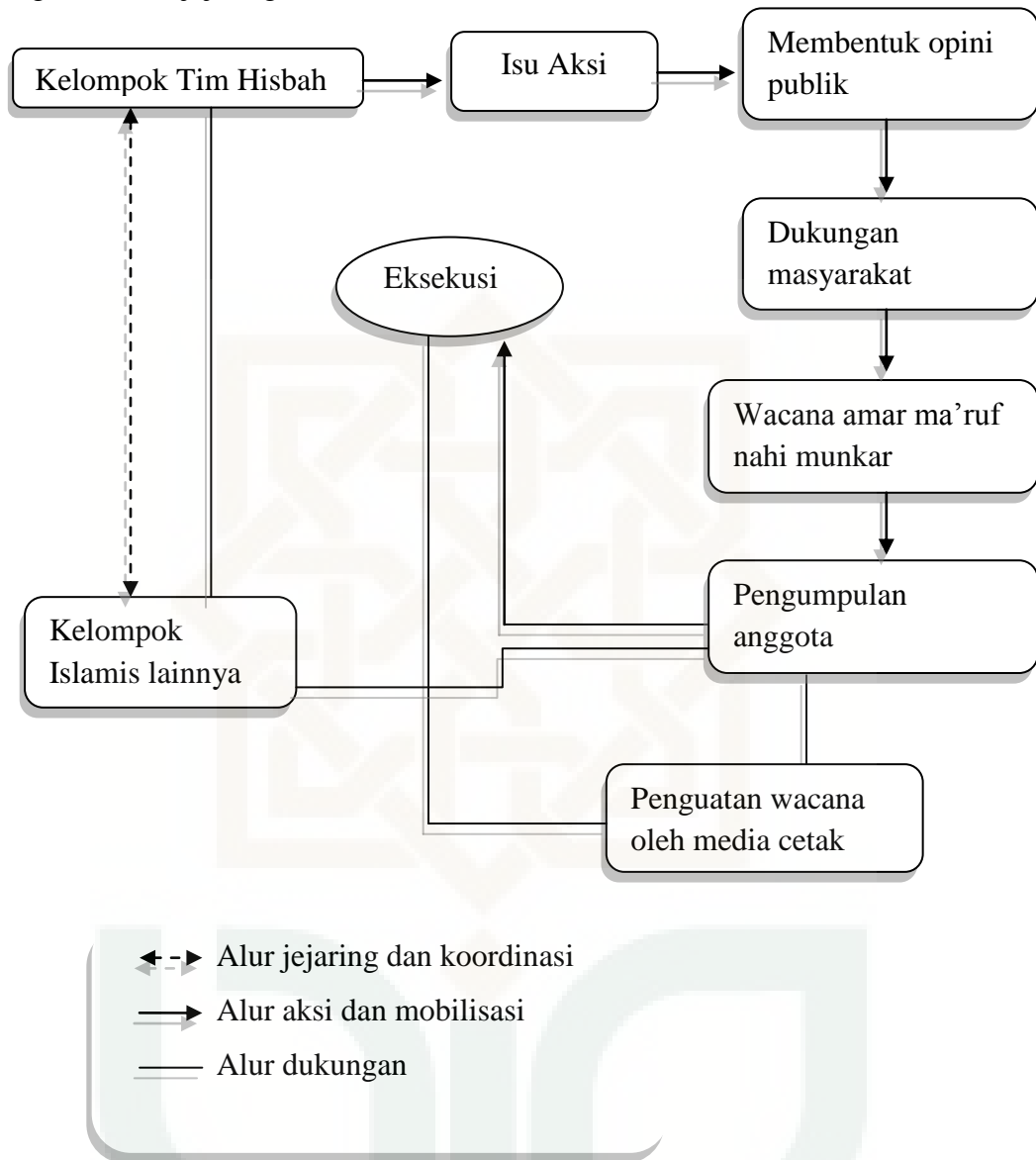
Melalui berbagai fenomena yang terlihat dalam kasus Tim Hisbah, aktivisme Islam tidaklah unik, gerakan tersebut memiliki elemen-elemen yang mirip dengan semua gerakan sosial. Organisasi perkumpulan, pernyataan sikap, identitas kolektif dan hal-hal lain dari gerakan Islam mirip dengan yang ada pada gerakan-gerakan lain di seluruh dunia. Mereka menggunakan jejaring yang terbentuk selama masa kekuasaan represif untuk membentuk suatu identitas kolektif. Ketika rezim politik mulai terbuka secara perlahan, tuntutan

¹⁵⁵ Wawancara dengan Edi Lukito, Yusuf parmadi dan Widodo, Tipes, Solo Mei 2015

politik semakin kuat dan sekaligus menjadikan ongkos partisipasi politik semakin tinggi, begitu juga ongkos pembelaan keadilan yang membuat ekspresi politik konvensional tidak tersedia bagi gerakan Islamis. Sebagai alternatif, orang-orang beralih ke jaringan-jaringan informal untuk mengorganisasi dan menuntut kepentingan mereka. Jaringan kompleks yang saling terikat tersebut merupakan inti dari gerakan-gerakan Islamis. Jaringan-jaringan yang terbangun tersebut memiliki dwifungsi utama, yaitu sebagai sabuk pengikat identitas kolektif dan juga sarana yang paling mudah dan praktis untuk membentuk gerakan sebagai ekspresi menyampaikan hak-hak politik. Kompleksitas gerakan-gerakan atau kelompok Islamis inilah yang disebut oleh Diane Singerman sebagai dunia yang berjejaring sebagai ekspresi politik lokal sebuah identitas kolektif masyarakat yang mengusung wacana-wacana Islamisme.¹⁵⁶

¹⁵⁶ Lihat Diana Singerman, "The Networked World of Islamist Social Movements", dalam Quintan Wiktorowicz, *Islamic Activism...*, hlm. 143-159.

Bagan 2. Alur jejaring, mobilisasi dan aksi Tim Hisbah



3. Aksi-aksi Radikal: Aktualisasi Kritik Terhadap Institusi Demokrasi

Dengan mengaktualisasikan kebebasan sipil dan hak-hak politik, ditambah dengan pengakuan masyarakat dan beberapa lembaga formal atas aspirasi kelompok Islamis tersebut, membuat mereka lebih percaya diri memosisikan dirinya sebagai pembela Islam. Kepercayaan diri mampu membuat mereka bersedia ikut ke dalam aksi-aksi radikal sebagai upaya untuk

merebut dan mengambil alih tugas negara. Kekerasan pada dasarnya merupakan tindakan legal jika digunakan oleh negara demi melindungi masyarakat dari berbagai ancaman. Namun kegagalan negara melindungi masyarakat dari dampak-dampak yang dianggap sebagai kemaksiatan tersebut, dapat melegitimasi keabsahan para anggota Tim Hisbah memonopoli penggunaan kekerasan tersebut.

Para ikhwan selalu mengklaim bahwa tindakannya tidak serta merta turun ke jalan melakukan *sweeping* atau aksi radikal lain. Aksi tersebut selalu melalui berbagai tahapan: dimulai dengan tahap pemantauan, peringatan dan pelaporan. Sebelum melakukan aksi, para ikhwan selalu mengkoordinasikan dengan warga setempat, menggali informasi mengenai target yang akan dilawan. Ketika masyarakat memberikan sinyal positif atas tindakan yang akan dilakukan, mereka dengan cepat mempersiapkan pasukan untuk eksekusi target. Sinyal positif ini biasanya biasanya ditandai dengan pernyataan bahwa warga resah atas perilaku para pemuda yang selalu bergerombol dan mengkonsumsi minuman keras. Laskar Hisbah tersebut tidak langsung diterjunkan sebelum perwakilan Tim Hisbah melakukan pelaporan terlebih dahulu kepada aparat kepolisian. Setelah beberapa kali melakukan pelaporan dan tidak ada tindakan serius dari aparat kepolisian, maka ini merupakan waktu untuk para ikhwan bergerak melakukan aksi.¹⁵⁷

Dengan melakukan aksi-aksi radikal tersebut, para ikhwan sebenarnya memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang masih terjadi pada negara

¹⁵⁷ Wawancara Agus Junaedi, Semanggi, Solo Maret 2015

demokratis, terutama dalam masalah penegakan hukum. Para ikhwan tersebut tidak buta terhadap hukum yang tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagian mereka mengerti mengenai delik pemidanaan, sebagian mereka juga mengetahui KUHP pasal 492 (1) dan (2) mengenai gangguan yang diakibatkan oleh orang yang mabuk, pasal 303 tentang perjudian, dan beberapa hukum pidana lain. Mereka berusaha mengincar kelemahan dalam penegakan hukum tersebut sebagai peneguh identitas di tengah masyarakat bahwasannya mereka berhak didukung demi wacana-wacana Islamisme yang disuarakan, yang diklaim dapat memperbaiki segala permasalahan di Indonesia.

Aksi-aksi radikal tersebut sebenarnya adalah ruang kritik yang disuarakan Tim Hisbah di dalam arus demokrasi agar tetap dapat dianggap sebagai warga yang berkontribusi terhadap kemajuan penegakan hukum. Meskipun para ikhwan menghadirkan wacana strategi ketika memobilisasi kelompok dan menjalankan aksi-aksi radikalnya, namun bukan berarti aksi radikal tersebut dapat serta merta dibenarkan dalam perspektif hukum. Bahkan ketua Tim Hisbah sendiri sangat menyayangkan aksi kekerasan dan pengrusakan yang berlebihan, hal ini menurutnya ditakutkan akan merubah niat menjadi hanya sebatas unjuk kekuatan dan akan berdampak negatif bagi keberlangsungan organisasi.¹⁵⁸ Walaupun telah melanggar prosedur, tidak ada salahnya jika kekuatan, aspirasi dan aksi radikal dari para kelompok Islamis

¹⁵⁸ Wawancara Agus Junaedi, Solo 11 Februari 2015.

tersebut dianggap sebagai kekuatan-kekuatan masyarakat sipil Islam lainnya sebagai bahan introspeksi akan lemahnya penegakan hukum di Indonesia.

Persoalan agama dan radikalisme tampaknya masih akan berlanjut di masa-masa mendatang. Dengan melihat aksi yang dilancarkan kaum Islamis Sebagai sebuah aksi protes, Fuller menyampaikan pesan dalam sebuah buku bahwa pertanyaan yang seharusnya diajukan bukan mengapa aksi-aksi radikal terjadi? Namun lebih tepat mengenai mengapa aksi-aksi tersebut datang lebih awal dari yang diperkirakan. Ideologi perlawanan ada di mana saja, Islam hanya salah satu ideologi yang kebetulan saat ini mewakili perlawanan terhadap penguasa.¹⁵⁹ Dengan redaksi yang berbeda, Norma Permata mengingatkan bahwa persoalan Islam dan radikalisme dapat dikatakan merupakan persoalan laten dalam kehidupan kolektif manusia, yang sewaktu waktu dapat muncul. Hal ini dikarenakan keduanya mewakili dorongan perilaku dasar manusia yaitu dorongan untuk membuat tindakan anarkis di satu sisi, dan dorongan terhadap tindakan-tindakan suci sebagai bentuk tuntutan akan perubahan di sisi lain. Aksi-aksi radikal sebenarnya dapat menjadi cermin introspeksi karena gejala tersebut telah melewati paling tidak tiga faktor kunci. Pertama, luasnya jarak sosial yang memisahkan kelompok kaya dan miskin, terdidik dan terbelakang; kedua, instabilitas kehidupan sosial-ekonomi dan politik; ketiga, kentalnya tradisi agama dengan nuansa doktriner di kalangan masyarakat akar rumput.¹⁶⁰

¹⁵⁹ Baca selengkapnya Graham E. Fuller, *A World Without Islam*, hlm 1-19.

¹⁶⁰ Ahmad Norma Permata, "Terorisme sebagai Fenomena Agama: Sebuah Pembacaan Sosiologis", pengantar buku, diunduh dari: https://www.academia.edu/1975714/Agama_dan_Terorisme, Mei, 2015.

Meskipun jebakan-jebakan demokrasi yang mencerminkan aktualisasi tindakan digunakan para kelompok Islamis sebagai usaha meneguhkan identitasnya di era demokrasi dan globalisasi, Indonesia dapat selalu terlepas dari jebakan tersebut. Dimulai dari masa pemberontakan di awal dekade kemerdekaan hingga masa transisi politik dari otoritarian ke era Reformasi, Indonesia telah mampu melewatinya secara gemilang. Noorhaidi menyebut keberhasilan ini tidak lepas dari empat kunci utama. Pertama, Indonesia memiliki Pancasila sebagai ideologi negara yang menaungi semua masyarakat dengan ragam suku, agama dan kepentingannya. Kedua, masyarakat sipil Muslim (*Muslim civil society*) yang kuat, dengan Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai tulang punggungnya. Ketiga Tentara yang rela kembali ke barak dan membuang *privileges* yang telah diberikan oleh rezim Orde Baru. Keempat, kelas menengah yang terus tumbuh seiring akses pendidikan dan ekonomi yang semakin terbuka bagi banyak lapisan masyarakat.¹⁶¹

Islamisme dan demokrasi sepintas terlihat sebagai dua sisi yang saling bertolak belakang. Pandangan semacam itu lahir dari pembacaan yang simplistik; bahwa karena kaum Islamis terus mengusung wacana kontra demokrasi, maka Islamisme tentu berlawanan dengan demokrasi. Pandangan akan berbeda jika pembacaan lebih diarahkan kepada lahirnya wacana Islamis di tengah ruang demokrasi. Nuansa demokrasi yang penuh keterbukaan melahirkan sikap rasionalitas masyarakat yang ingin mengekspresikan diri

¹⁶¹ Noorhaidi Hasan, "Rethinking Islam Politik: Paradigma Baru Pembacaan Gejolak Politik di Dunia Muslim," *Teks Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Politik Islam Kontemporer*, disampaikan di hadapan Rapat Senat Terbuka UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, September 2014, hlm. 26.

dalam panggung demokrasi, usaha pengekspresian diri inilah yang membuat mereka seakan sengaja menjadi radikal, sembari mencari cara lain agar dapat diterima secara konstituional dengan menggunakan perangkat-perangkat demokrasi. Melalui cara seperti itu, dapat dikatakan kalangan Islamis bersikap kooperatif yang mana merupakan salah satu komponen dalam pemerintahan yang demokratis.

